

PERKEMBANGAN TRIWULAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Tantangan saat ini, peluang masa depan

Juni 2011



THE WORLD BANK | BANK DUNIA

PERKEMBANGAN TRIWULANAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Tantangan saat ini, peluang masa depan

Juni 2011



THE WORLD BANK | BANK DUNIA

Investing in Indonesia's Institutions

for Inclusive and Sustainable Development

Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia menyajikan perkembangan utama ekonomi Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Laporan ini menempatkan perkembangan dalam konteks jangka panjang dan global, serta menilai terhadap prospek ekonomi dan kesejahteraan sosial Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dalam ekonomi Indonesia.

Laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini disusun dan dihimpun oleh tim analisa makroekonomi kantor perwakilan Bank Dunia di Jakarta dan dipandu oleh Shubham Chaudhuri (Lead Economist) dan Enrique Blanco Armas (Senior Economist): Magda Adriani (harga komoditas), Andrew Blackman (sektor eksternal, ASEAN dan tren PMA-Penanaman Modal Asing), Andrew Carter (penerimaan pemerintah), Andrew Ceber (rekening nasional dan risiko), Fitria Fitrani (tren PMA), Faya Hayati (harga), Ahya Ihsan (belanja fiskal dan tantangan infrastruktur), Kiyoshi Taniguchi (lingkungan internasional) dan Ashley Taylor. Tambahan kontribusi diterima dari Henry Sandee dan Natalia Cubillos Salcedo (Master Plan dan konektivitas) dan Neni Lestari dan Djauhauri Sitorus (perbankan). Arsianti dan Ashley Taylor berbagi tugas penyuntingan dan produksi. Jason Allford, Enrique Blanco Armas, Soekarno Wirokartono, Sjamsu Rahardja, Della Y.A.Temenggung, Stephen L. Magiera menyumbangkan komentar mendetil dan input. Farhana Asnap, Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, Marcellinus Winata, Nugroho dan Randy Salim mengatur distribusi dan Titi Ananto, Sylvia Njotomihardjo dan Nina Herawati memberi bantuan administrasi.

Dokumen ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Nicolas Novianto dan diedit oleh Magda Adriani, Fitria Fitrani, Ahya Ihsan, Wahyoe Soedarmono, dan Arsianti.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisa Bank Dunia atas ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai *the World Bank* serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id

Untuk mendapatkan publikasi terkait melalui e-mail, silakan menghubungi madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan menghubungi ataylor2@worldbank.org.

Daftar isi

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif: Tantangan saat ini, peluang masa depan	viii
A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL	1
1. Beberapa Sumber ketidakpastian dalam perekonomian global	1
2. Sementara pertumbuhan relatif terbatas pada triwulan 1 tahun 2011, outlook jangka pendek masih tetap kokoh	2
3. Aliran masuk portofolio dan PMA tetap kuat sementara surplus perdagangan menyempit	5
4. Inflasi <i>headline</i> telah turun tetapi risiko inflasi tetap ada	6
5. Peningkatan harga bahan pangan sebelumnya tampaknya akan mempengaruhi pengukuran kemiskinan di bulan Maret 2011	9
6. Aliran masuk modal portofolio telah kembali dengan deras tetapi mulai melemah belakangan ini	10
7. Meningkatnya belanja subsidi bahan bakar dan tantangan pencairan anggaran	13
8. Ketidakpastian membayangi outlook	17
B. PERKEMBANGAN TERBARU PEREKONOMIAN INDONESIA	21
1. ASEAN 2011: Kepemimpinan Indonesia	21
a. Indonesia dan ASEAN.....	21
b. ASEAN dan integrasi ekonomi wilayah Asia Timur.....	21
c. Peningkatan Ekonomi ASEAN.....	22
d. Prioritas Indonesia bagi ASEAN	23
2. Kebangkitan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia?	25
a. Pola PMA ke Indonesia telah mengalami perubahan pada tahun-tahun terakhir	25
b. Walaupun nilai aliran masuk meningkat, jumlah PMA relatif terhadap PDB masih tetap lemah	28
c. Outlook yang positif untuk PMA ke Indonesia... ..	29
d. ...yang sebetulnya dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan peningkatan iklim investasi, infrastruktur dan keterampilan.....	30
C. INDONESIA 2014 KE DEPAN: SEBUAH PANDANGAN SELEKTIF	32
1. Menangani tantangan infrastruktur Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan	32
2. Konektivitas dan Masterplan tahun 2011-2025	36
a. Menggabungkan pendekatan sektoral dan regional terhadap pembangunan.....	36
b. Meningkatkan konektivitas Indonesia	38
c. Penerapan Masterplan	42
d. Menuju ke depan	42
LAMPIRAN: GAMBARAN EKONOMI INDONESIA	44

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1: Perhatian pasar yang meningkat pada peringkat resiko utang di Yunani.....	1
Gambar 2: Harga rata-rata Minyak mentah Indonesia tahun 2011 sampai sekarang mencapai lebih dari asumsi anggaran.....	1
Gambar 3: Pertumbuhan triwulan melambat di triwulan 1/2011, turun dari nilai tertingginya pada triwulan 4/2010,.....	3
Gambar 4: ...terutama dengan melemahnya belanja pemerintah dan ekspor bersih.....	3
Gambar 5: Aliran masuk modal mendominasi catatan keseluruhan aliran masuk neraca pembayaran.....	5
Gambar 6: Inflasi <i>headline</i> dan keranjang kemiskinan telah turun bersama-sama dengan inflasi harga bahan pangan tetapi inflasi inti mulai meningkat.....	6
Gambar 7: Pengaruh harga energi dan bahan pangan domestik ke inflasi inti di Indonesia cukup tinggi.....	6
Gambar 8: Peningkatan harga pada akhir tahun 2010 turun lebih lambat di kulakan dibanding g puncak-puncak harga yang lalu.....	7
Gambar 9: Harga kulakan) beras tetap tinggi dalam nilai nominal dan riil.....	7
Gambar 10: Penyerapan pekerja terus menerus meningkat.....	9
Gambar 11: Meski sempat pulih dari penurunan pada awal tahun, harga saham Indonesia kembali menurun pada beberapa minggu terakhir.....	10
Gambar 12: Aliran dana masuk pulih dengan kuat selama bulan April tetapi kemudian melemah di bulan Mei.....	10
Gambar 13: Pengumpulan cadangan devisa diikuti peningkatan kepemilikan asing atas aset Indonesia.....	12
Gambar 14: Pertumbuhan hutang riil terus meningkat sementara bunga pinjaman riil naik tipis dengan jatuhnya inflasi.....	12
Gambar 15: Tren turun <i>lifting</i> minyak Indonesia dan tren asumsi anggaran awal yang terlalu besar.....	14
Gambar 16: Belanja subsidi menguat, tetapi realisasi belanja modal tetap lemah ...	14
Gambar 17: Indonesia dapat menjadi pendorong pertumbuhan global pada tahun 2025... ..	20
Gambar 18: ...dan berpotensi menjadi salah satu negara berkembang terbesar.....	20
Gambar 19: Tren meningkatnya aliran PMA ke Indonesia.....	26
Gambar 20: Rangkaian data BKPM dan Neraca Pembayaran mengikuti tren yang sama tetapi dengan perbedaan yang signifikan.....	27
Gambar 21: Aliran PMA Indonesia terhadap PDB tetap relatif rendah dibanding negara dibanding di wilayah yang sama.....	29
Gambar 22: ...dan dibandingkan dengan aliran ke ekonomi kaya sumberdaya berpenghasilan menengah dan tinggi.....	29
Gambar 23: Investasi infrastruktur Indonesia turun tajam pasca krisis Asia.....	33
Gambar 24: Peringkat Indonesia termasuk yang terendah dalam indeks kualitas infrastruktur.....	33
Gambar 25: ...dengan kinerja yang rendah untuk berbagai jenis infrastruktur.....	33
Gambar 26: Kualitas jalan daerah di Indonesia telah menurun secara bertahap.....	34
Gambar 27: Masalah infrastruktur semakin menjadi penghalang utama bagi kegiatan perusahaan di Indonesia.....	34
Gambar 28: Mencapai transformasi ekonomi melalui strategi Masterplan.....	36
Gambar 29: Masing-masing dari enam koridor ekonomi memiliki penekanan pembangunan yang berbeda.....	37
Gambar 30: Penerapan pendekatan tulang ikan dan titik tinta kepada konektivitas dalam pulau.....	39
Gambar 31: Variasi biaya transportasi – menjauhkan kota-kota dan membawanya lebih dekat.....	41

DAFTAR GRAFIK LAMPIRAN

Gambar Lampiran 1: Pertumbuhan PDB.....	44
Gambar Lampiran 2: Kontribusi terhadap PDB (pengeluaran).....	44
Gambar Lampiran 3: Kontribusi terhadap PDB (sektor).....	44
Gambar Lampiran 4: Penjualan sepeda motor dan kendaraan bermotor.....	44
Gambar Lampiran 5: Indikator konsumen.....	44
Gambar Lampiran 6: Indikator kegiatan industri.....	44
Gambar Lampiran 7: Aliran perdagangan riil.....	45
Gambar Lampiran 8: Balance of Payments.....	45
Gambar Lampiran 9: Neraca perdagangan.....	45
Gambar Lampiran 10: Cadangan internasional dan dana capital asing.....	45

Gambar Lampiran 11: Term of trade dan implicit ekspor dan impor berdasarkan chained Fisher-Price indices	45
Gambar Lampiran 12: Inflasi dan kebijakan moneter	45
Gambar Lampiran 13: Rincian tingkat harga konsumen	46
Gambar Lampiran 14: Tingkat inflasi negara tetangga.....	46
Gambar Lampiran 15: Harga beras domestic dan internasional.....	46
Gambar Lampiran 16: Tingkat kemiskinan, bekerja, dan tidak bekerja.....	46
Gambar Lampiran 17: Indeks saham regional.....	46
Gambar Lampiran 18: Indeks spot dollar dan rupiah.....	46
Gambar Lampiran 19: Yield obligasi 5 tahunan mata uang lokal.....	47
Gambar Lampiran 20: Spread EMBI obligasi pemerintah dengan obligasi dollar amerika	47
Gambar Lampiran 21: Perbandingan tingkat kredit bank umum	47
Gambar Lampiran 22: Indikator keuangan sektor perbankan	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pertumbuhan diproyeksikan akan meningkat secara bertahap pada tahun 2011 dan 2012	viii
Tabel 2: Proyeksi PDB agregat untuk tahun 2010 dan 2011 tetap tidak berubah.....	4
Tabel 3: ...dan diproyeksikan untuk tetap kuat hingga tahun 2011 dan 2012	5
Tabel 4: Sensitivitas penerimaan terhadap volume lifting minyak	14
Tabel 5: Peningkatan subsidi bahan bakar telah mendorong revisi naik proyeksi defisit anggaran Bank Dunia tahun 2011	17
Tabel 6: Dampak skenario harga eceran beras pada inflasi pada triwulan 4/2011.....	18
Tabel 7: Aliran PMA regional menjadi makin penting.....	26
Tabel 8: Manufaktur tetap menjadi bagian terbesar dari aliran masuk PMA ke Indonesia.....	27
Tabel 9: Aliran masuk PMA masih terpusat di pulau Jawa, terutama di ibukota.....	28

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel Lampiran 1: Realisasi dan estimasi anggaran belanja pemerintah.....	48
Tabel Lampiran 2: Neraca pembayaran.....	48

DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Perkembangan harga terakhir di Indonesia.....	7
Kotak 2: Potensi Indonesia dalam perkembangan dunia yang multi-poros	20
Kotak 3: Sumber-sumber data yang berbeda mengenai aliran masuk PMA ke Indonesia	27
Kotak 4: Outlook yang optimistik, tetapi tantangan tetap ada: pandangan perusahaan afiliasi Jepang di Indonesia	31
Kotak 5: Pembahasan tentang infrastruktur dan pertumbuhan – suatu ulasan singkat	35
Kotak 6: Jarak geografis vs jarak ekonomis di Indonesia.....	41

SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB	: Asian Development Bank	LDR	: Loan to Deposite Ratio
APBN	: Anggaran Perencanaan Belanja Negara	CMI	: Chiang Mai Initiative
APEAC	: ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation	MDG	: Millenium Development Goal
ASEAN	: Association of South East Asian Nation	MP3EI	: Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
BI	: Bank Indonesia	NPL	: Non Performing Loan
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal	NTT	: Nusa Tenggara Timur
Bulog	: Badan Umum Logistik	OPEC	: Organization Petroleum Exporting Countries
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara	PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
CAR	: Capital Availability Ratio/Rasio Kecukupan Modal	PLN	: Perusahaan Listrik Nasional
CMI	: Chiang Mai Initiative	PMA	: Penanaman Modal Asing
CPO	: Crude Palm Oil (Minyak Kelapa Sawit mentah)	PPP	: Peraturan Pemerintah Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat	RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
EAS	: East Asia Summit	RTRWN	: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
EMBIG	: Emerging Market Bond Index Global	SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
EU	: European Uni	SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
FTA	: Free Trade Agreement/Perjanjian Perdagangan bebas	SISLOGNAS	: Sistem Logistik Nasional
IHK	: Indeks Harga Konsumen	SISTRANAS	: Sistem Transportasi Nasional
IMF	: International Monetary and Finance	SUN	: Surat Utang Negara
JETRO	:Japanese External Trade Organization	TKI	: Teknologi Komunikasi dan Informasi
K/L	: Kementerian dan Lembaga	UU	: Undang-Undang
KSEI	: <i>Kustodion Sentral Efek Indonesia</i>		

Ringkasan Eksekutif: Tantangan saat ini, peluang masa depan

Kinerja ekonomi Indonesia tetap positif tetapi perkembangan terakhir menunjukkan tantangan-tantangan terhadap kebijakan yang berlaku dan risiko yang berkaitan dengan perkembangan tersebut

Kinerja ekonomi Indonesia hingga pertengahan tahun 2011 adalah positif. Pertumbuhan yang kuat diikuti dengan aliran masuk investasi PMA dan portofolio modal. Neraca sektor publik dan keuangan tetap kuat. Akan tetapi perkembangan pada triwulan terakhir telah mengingatkan akan sejumlah tantangan atas kebijakan yang berlaku di Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, peluncuran Master Plan pemerintah tahun 2011-2025 berfokus pada investasi dan reformasi kebijakan yang dapat membantu Indonesia meraih peluang pertumbuhan di masa depan

Triwulanan edisi bulan Maret 2011 menyebutkan bahwa peningkatan harga komoditas bahan pangan dalam dan luar negeri membawa kembali ke pengalaman tahun 2008. Peningkatan pengeluaran subsidi bahan bakar pada tahun sejak awal tahun 2011 sampai saat ini makin memperjelas persamaan ini, dengan penekanan ulang terhadap risiko fiskal, *opportunity cost* dan distorsi ekonomi. Laju pencairan belanja pemerintah yang lemah pada program-program inti menggambarkan tantangan-tantangan untuk meningkatkan layanan publik dan infrastruktur. Selain itu, walaupun belakangan ini terjadi penurunan dalam harga beras, rumah tangga miskin masih tetap lemah terhadap guncangan produksi dalam negeri berikutnya. Akhirnya, walaupun terdapat kaitan langsung yang terbatas antara Indonesia dan zona Euro, peningkatan penghindaran risiko internasional yang berasal dari krisis hutang Yunani, dengan potensi implikasi pasar dari suatu *default* (kegagalan pembayaran), jika terjadi, merupakan peringatan akan potensi guncangan dari luar negeri yang dapat memicu aliran balik modal jangka pendek dari Indonesia.

Pertumbuhan sedikit menurun pada dibanding triwulan pertama tahun 2011 tetapi masih kuat pada 6,5 persen tahun-ke-tahun

Tiga bulan terakhir pencapaian perkembangan makroekonomi yang kuat. Pertumbuhan PDB pada triwulan pertama tahun 2011 sejalan dengan perkiraan pada 6,5 persen tahun-ke-tahun, turun dari pertumbuhan yang biasanya kuat di tingkat 6.9 persen yang tercatat pada triwulan terakhir tahun 2010. Pertumbuhan konsumsi investasi dan swasta juga mempertahankan prestasinya. Sebaliknya, ekspor bersih dan belanja pemerintah menghambat pertumbuhan triwulanan. Mencerminkan kecondongan pencairan belanja menjelang akhir tahun, kinerja konsumsi pemerintah adalah termasuk yang paling rendah yang pernah tercatat. Sektor jasa seperti perdagangan besar dan eceran, transportasi dan komunikasi dan keuangan, terus menjadi pendorong utama pertumbuhan, yang mencerminkan kekuatan permintaan domestik. Pertumbuhan pertanian melemah bersama-sama dengan pertambangan dan konstruksi.

Outlook dasar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berubah walaupun terdapat ketidakpastian di ekonomi global

Proyeksi headline PDB untuk tahun 2011 dan 2012 tidak berubah dari Triwulanan edisi bulan Maret 2011 pada masing-masing sebesar 6,4 persen dan 6,7 persen. Sebagian besar pendorong utama pertumbuhan domestik tidak berubah meskipun terdapat peningkatan ketidakpastian seperti telah disinggung di atas. Sebagai contoh, meskipun pemulihan AS berjalan lemah dan adanya dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami di Jepang, dinamika pokok pertumbuhan global tetap relatif kuat, dengan sedikit revisi turun untuk proyeksi pertumbuhan para mitra dagang utama Indonesia. Tentu saja, terdapat risiko penurunan dari outlook ini ke sektor riil jika terjadi penurunan sektor keuangan yang besar yang disebabkan oleh pemotongan hutang pada zona Euro.

Tabel 1: Pertumbuhan diproyeksikan akan meningkat secara bertahap pada tahun 2011 dan 2012

		2009	2010	2011	2012
Produk Domestik Bruto	(persen perubahan tahunan)	4,6	6,1	6,4	6,7
Indeks harga konsumen*	(persen perubahan tahunan)	2,6	6,3	5,7	5,9
Saldo anggaran**	(persen PDB)	-1,6	-0,6	-1,8	n,a,
Pertumbuhan mitra dagang utama	(persen perubahan tahunan)	-1,0	6,6	4,3	4,7

Catatan: * Triwulan 4 pada laju inflasi Triwulan 4. ** Angka tahun 2011 adalah Anggaran yang disetujui

Sumber: Kementerian Keuangan, BPS via CEIC, Consensus Forecasts Inc., dan Bank Dunia

Tingginya harga minyak membebani fiskal dari subsidi energi

Meskipun terjadi koreksi turun pada bulan Mei, harga minyak masih tetap tinggi. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia adalah 113 dolar Amerika per barel selama lima bulan pertama 2011, dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar 80 dolar Amerika per barel. Pada lima bulan pertama tahun 2011, belanja subsidi energi telah meningkat, yang merupakan seperempat dari total belanja pemerintah pusat, tidak termasuk transfer,. Pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai pilihan reformasi subsidi tetapi sifat dan waktu pelaksanaan kebijakan baru masih belum jelas. Sementara sisi lain dari tingginya harga minyak adalah peningkatan penerimaan, peningkatan itu telah sebagian diimbangi dengan penurunan produksi minyak, sehingga dampak keseluruhan dari tingginya harga minyak adalah peningkatan defisit. Meskipun dengan lemahnya pencairan belanja program inti, termasuk belanja modal dan sosial, proyeksi defisit anggaran Bank Dunia 2011 untuk defisit anggaran tahun 2011 telah direvisi naik menjadi 1,2 persen GDP (dari 0,9 persen pada Triwulan edisi bulan Maret dan dari perkiraan APBN pada 1,8 persen).

Inflasi *headline* telah turun tetapi masih terdapat sejumlah risiko di sekitar outlook...

Inflasi *headline* telah berangsur turun dari 7 persen di bulan Januari 2011 menjadi sedikit di bawah 6 persen di bulan Mei 2011. Seperti pada waktu peningkatannya pada semester kedua tahun 2010, penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga bahan pangan, terutama harga beras dan cabai. Akan tetapi inflasi inti berangsur naik dan walaupun perkiraan inflasi investor asing telah mengalami penurunan, perkiraan harga domestik mulai bergerak naik. Dengan tingkat inflation di kisaran target Bank Indonesia, BI Rate dibiarkan tidak berubah sejak bulan Februari. Melihat ke depan, tanpa perubahan kebijakan, misalnya kebijakan subsidi energi, inflasi *headline* IHK diproyeksikan akan mencapai 5,7 pada triwulan terakhir tahun 2011 dan sedikit meningkat hingga 2012. Inflasi keranjang kemiskinan (*poverty basket*) diproyeksikan untuk turun menjadi 5,8 persen pada triwulan akhir tahun 2011. Akan tetapi masih terdapat banyak risiko, terutama yang berhubungan dengan harga beras dan energi.

...sementara peningkatan harga beras yang lalu cenderung t akan menghalangi dampak positif dari peningkatan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja untuk pengentasan kemiskinan

Walaupun telah terjadi beberapa penurunan dari harga beras yang meningkat pada semester kedua tahun 2010, peningkatan yang lalu tersebut tampaknya akan menghalangi kemajuan pengentasan kemiskinan. Di sisi lain terdapat dampak positif dari kuatnya pertumbuhan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Penciptaan pekerjaan berkualitas tetap menjadi masalah, terutama bagi kaum muda Indonesia, yang membutuhkan upaya-upaya, seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan dan mendorong penyesuaian antara pekerja dan kesempatan kerja.

Aliran masuk modal ke Indonesia tetap kuat ...

Aliran sejumlah besar dana yang masuk di tahun 2010, masih berlanjut pada triwulan pertama tahun 2011. Aliran portofolio pulih dari aliran keluar pada bulan Januari, walaupun kemudian melemah di bulan Mei, sementara aliran masuk PMA mencatat tren naik. Pengelolaan dampak aliran masuk ini tetap menjadi tantangan kebijakan. Bank Indonesia terus memperkenankan apresiasi terkendali, sesuai dengan pergerakan valuta regional, dan menerapkan tambahan kebijakan makro-prudential, seperti perpanjangan *holding period* bagi Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Cadangan devisa telah meningkat, juga diikuti oleh ekposur terhadap potensi aliran keluar modal asing. Indonesia telah menunjukkan peningkatan daya tahan terhadap gejolak pasar keuangan internasional pada beberapa tahun terakhir, tetapi keputusan apapun atas krisis hutang Yunani dapat secara signifikan meningkatkan penghindaran risiko oleh investor internasional, yang akan menguji daya tahan peningkatan tersebut.

...pergerakan naik PMA memiliki potensi untuk memberikan serangkaian manfaat bagi ekonomi

Walaupun sumbangan sumbangan PMA terhadap PDB masih rendah dibandingkan dengan masa sebelum krisis keuangan tahun 1997/1998 dan dibandingkan dengan negara perbandingan di wilayah yang sama, aliran masuk PMA menjadi semakin gencar karena daya tarik sumberdaya alam Indonesia, besarnya pasar domestik dan relatif rendahnya biaya buruh. Peningkatan PMA yang lebih besar dapat membantu mengimbangi risiko-risiko yang berhubungan dengan aliran masuk portofolio dan juga memiliki potensi, bila bersama dengan kebijakan pendukung dalam bidang-bidang seperti pendidikan, keterampilan dan infrastruktur, untuk meningkatkan pertumbuhan Indonesia melalui investasi keuangan dan melalui saluran-saluran lain seperti transfer teknologi dan keterkaitan dengan jaringan pasokan dunia.

Peningkatan konektivitas dan reformasi kebijakan dapat meningkatkan outlook pertumbuhan jangka menengah dan merupakan bagian penting dari Masterplan Pemerintah tahun 2011-2025...

Meningkatkan konektivitas Indonesia tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan domestik tetapi juga menarik lebih banyak PMA. Tantangan inilah yang menjadi persoalan inti dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk tahun 2011-2025 yang bertujuan untuk menempatkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi dunia terbesar pada tahun 2025. Pilar pertama dari rencana itu adalah pengembangan enam koridor ekonomi regional, melalui investasi di sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi dan yang memiliki keunggulan komparatif daerah. Dibutuhkan dukungan dari pilar kedua dan ketiga, yaitu meningkatkan konektivitas dan memperkuat sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana itu memiliki potensi untuk menjadi alat transformasi tetapi keberhasilan penerapan akan membutuhkan identifikasi kebijakan dan prioritas investasi bersama-sama dengan komitmen politik dan koordinasi untuk menanganinya.

Masterplan itu menargetkan investasi sebesar 468 miliar dolar Amerika untuk periode tahun 2011-2025 dengan 45 persen adalah infrastruktur. Pengalaman menunjukkan bahwa dibutuhkan peningkatan proses pengadaan dan anggaran serta kapasitas penyerapan untuk mengefektifkan alokasi fiskal yang lebih besar terhadap belanja modal. Target investasi sektor swasta yang ambisius juga akan memerlukan kebijakan pendukung, seperti kemitraan pemerintah-swasta dan pendalaman pasar keuangan domestik.

...tetapi masih terdapat banyak tantangan bila Indonesia hendak mencapai potensinya sebagai pendorong utama pertumbuhan dunia pada beberapa dekade yang akan datang

Indonesia merupakan ekonomi berkembang yang dinamis, memainkan peran yang makin berkembang di panggung internasional melalui, misalnya, keanggotaannya di dalam G20 dan posisinya sebagai ketua ASEAN sekarang. Akan tetapi, kejadian-kejadian pada triwulan terakhir merupakan peringatan mengenai tantangan yang harus dihadapi untuk menempatkan dan melaksanakan kebijakan dan investasi yang dibutuhkan bagi Indonesia untuk mencapai potensinya sebagai pendorong utama pertumbuhan dunia pada beberapa dekade berikutnya.

A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL

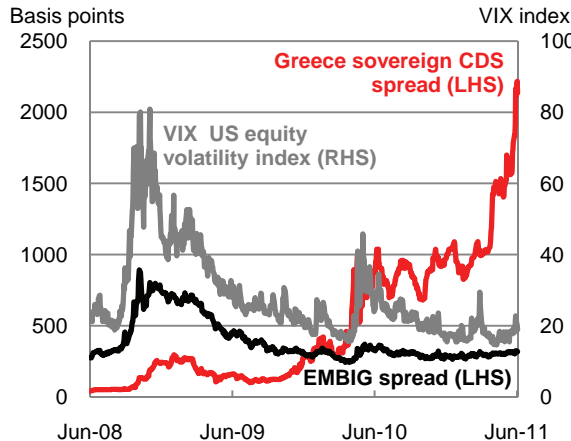
1. Beberapa Sumber ketidakpastian dalam perekonomian global

Pembangunan selama kuartal terakhir menunjukkan ketidakpastian yang masih berlangsung dalam lingkungan ekonomi internasional, walaupun dinamika pertumbuhan global yang mendasari nampak cukup kuat.

Perekonomian global selama tiga bulan terakhir telah ditandai oleh ketidakpastian yang sedang berlangsung. Selain volatilitas harga energi internasional dan harga komoditas yang lebih luas, pasar keuangan telah menjadi perhatian utama baru-baru ini seiring krisis utang publik di Yunani yang semakin intensif (Gambar 1), dengan potensi penjalaran semakin lebih besar berpengaruh ke anggota-anggota zona Eropa lain, dan juga ke sektor perbankan. Akibatnya muncul keengganan untuk mengambil risiko yang bisa menurunkan ketertarikan investor terhadap aset negara berkembang. Meskipun demikian, hingga saat ini, telah terdapat sedikit peningkatan selisih imbal hasil terhadap obligasi pemerintah (*sovereign spreads*) dikarenakan investor terus mencari imbal hasil di dalam lingkungan dengan tingkat suku bunga rendah di negara berpenghasilan tinggi.

Dalam hal prospek pertumbuhan global, pemulihan AS menunjukkan beberapa kelemahan, misalnya, di dalam pasar tenaga kerja dan data harga properti, sehingga menurunkan proyeksi pertumbuhan untuk 2011. Selain itu, bencana gempa bumi dan tsunami telah menimpa kegiatan perekonomian jangka pendek di Jepang. Sementara ketidakpastian di tingkat global mungkin telah meningkat, pertumbuhan riil global, didorong oleh kinerja yang kuat dari negara-negara ekonomi berkembang, diproyeksikan relatif stabil pada 3,2 persen pada 2011, dan naik menjadi 3,6 persen pada 2012 (Bank Dunia, Prospek Ekonomi Global, Juni 2011). Tentu saja, terdapat risiko penurunan prospek global tersebut, saat sektor riil terkena dampak langsung jika kerugian besar di sektor keuangan yang tidak dapat dibendung akibat kegagalan surat utang di zona Eropa.

Gambar 1: Perhatian pasar yang meningkat pada peringkat risiko utang di Yunani
(perbedaan suku bunga saham eksternal, poin dasar; indeks VIX)



Gambar 2: Harga rata-rata Minyak mentah Indonesia tahun 2011 sampai sekarang mencapai lebih dari asumsi anggaran
(USD per barel)



Catatan: VIX measures 30-day implied volatility of the S&P 500, CDS is credit default swap, EMBIG is JP Morgan Emerging Market Bond Index
Sumber: Thomson Financial Datastream

Sumber: DepKeu, US Energy Information Agency and World Bank

Harga komoditas global tetap tinggi meskipun ada koreksi penurunan pada bulan Mei

Dampak perkembangan internasional tersebut ditransmisikan ke Indonesia melalui jalur permintaan eksternal, terkait dengan arus perdagangan dan modal. Dampak harga komoditas ini sangat penting mengingat keragaman ekspor Indonesia dan sensitivitas fiskal Indonesia terhadap harga minyak. Harga komoditas global dikoreksi pada bulan Mei di tengah kekhawatiran atas risiko penurunan prospek global tersebut di atas. Harga energi menurun sebesar 6,5 persen dan harga non-energi sebesar 4,7 persen pada bulan tersebut, sebagian karena apresiasi dolar AS. Namun, harga energi tetap naik 9,1 persen dan harga non-energi naik 7,2 persen selama tiga bulan sejak Februari. Selain itu, mempertimbangkan faktor-faktor penentu sisi penawaran di tengah ketidakpastian

prospek permintaan, koreksi masih belum terjadi sampai saat ini yang dapat mengakibatkan tren penurunan harga. Selama jangka pendek, harga komoditas diperkirakan tetap tinggi. Perkiraan Bank Dunia untuk bulan Juni 2011 menunjukkan adanya kenaikan harga yang tinggi untuk tahun 2011, dimana akan diikuti oleh penurunan harga pada tahun 2012. Namun, harga di tahun 2012 secara riil baik untuk indeks energi dan non-energi diperkirakan masih akan tetap berada di atas tingkat harga di tahun 2008.

Tingginya harga minyak dan pangan di tingkat internasional terus menjadi perhatian bagi banyak negara, termasuk Indonesia

Setelah terjadi penurunan tajam pada bulan Mei, harga minyak mendapat perhatian lebih besar dikarenakan implikasi dari ketidakpastian atas resolusi gejolak yang terjadi di Libya, Syria dan Yaman, berkurangnya cadangan minyak, serta ketidakmampuan OPEC pada awal Juni untuk mencapai kesepakatan tentang peningkatan kuota produksi dan harapan akan peningkatan permintaan pada semester kedua tahun ini. Namun pada akhir Juni, harga minyak turun tajam, setelah adanya persetujuan dari Badan Energi Internasional untuk melepaskan pasokan tambahan dari cadangan mereka.

Harga minyak mentah Indonesia telah mengikuti pergerakan pasar internasional yang turun dari harga tertingginya yang mencapai hampir USD 130 per barel pada akhir April hingga USD 120 pada awal Juni, menyebabkan harga rata-rata dalam lima bulan pertama tahun 2011 menjadi USD 113 per barel (Gambar 2). Seperti yang dibahas lebih rinci di bawah, harga minyak yang tinggi memberikan tekanan lebih besar pada posisi fiskal Indonesia, dimanapengeluaran yang dianggarkan untuk subsidi bahan bakar dan energi akan lebih besar.

Beralih ke harga pangan internasional, secara keseluruhan harga turun sekitar 6 persen dari puncaknya baru-baru ini pada bulan Februari. Meskipun demikian, harga gandum naik 1 persen selama periode ini, dimana harga yang jatuh pada bulan Maret telah diimbangi dengan kenaikan harga saat ini. Sebagai contoh, pada bulan Mei, harga gandum internasional naik 5,7 persen dikarenakan kekhawatiran atas terjadinya kekeringan di beberapa bagian Eropa, meskipun harga beras internasional telah turun secara bertahap.

2. Sementara pertumbuhan relatif terbatas pada triwulan 1 tahun 2011, outlook jangka pendek masih tetap kokoh

Pertumbuhan PDB termoderasi pada triwulan 1 tahun 2011...

Setelah catatan yang sangat kuat di triwulan 4, tak mengherankan bila pertumbuhan PDB di triwulan 1 mengalami perlambatan (Gambar 3). Pertumbuhan tahun-ke-tahun mencapai 6,5 persen, turun dari 6,9 persen pada triwulan penutup tahun 2010. Berdasarkan penyesuaian musiman, pertumbuhan triwulanan juga turun, setelah mencapai catatan nilai tertinggi pada triwulan akhir tahun 2010, turun menjadi 1,0 persen, di bawah nilai rata-rata 10-tahunannya. Hasil dari triwulan pertama secara umum konsisten dengan yang diperkirakan pada proyeksi Triwulanan edisi bulan Maret 2011, sehingga outlook untuk tahun 2011 dan 2012 tetap masing-masing sebesar 6,4 persen dan 6,7 persen. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan selama triwulan itu berlangsung, ketidakpastian akan proyeksi dasar itu telah meningkat (seperti dibahas di bawah).

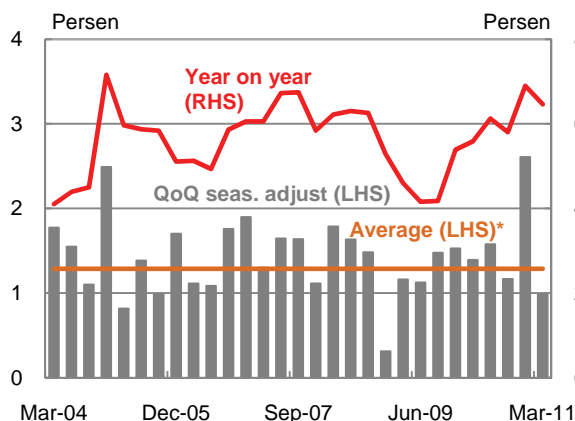
...mencerminkan kelemahan dalam ekspor bersih dan belanja pemerintah

Pada dasar triwulanan dengan penyesuaian musiman, baik ekspor bersih dan belanja pemerintah mengurangi pertumbuhan PDB, secara bersama-sama sebesar 2 poin persentase (Gambar 4). Belanja pemerintah riil sangat lemah pada triwulan pertama, dengan belanja turun sebesar 11,4 persen dengan penyesuaian musiman, yang merupakan triwulanan yang paling lemah selama satu dekade. Data fiskal menunjukkan bahwa sekitar 15 persen dari alokasi anggaran satu tahun penuh untuk belanja pegawai dan material (dua kelompok yang mempengaruhi statistik PDB) telah dicairkan pada triwulan pertama. Hal ini umumnya konsisten dengan laju pencairan triwulan pertama selama dua tahun terakhir.

Konsumsi swasta dan investasi tetap masih cukup tinggi walaupun belanja konstruksi melemah, sekali lagi hal ini kemungkinan mencerminkan masalah pencairan sektor publik. Kepercayaan konsumen telah meningkat pada indeks Danareksa, yang menyertakan konsumen berpenghasilan rendah dan dengan demikian mencerminkan dampak dari turunnya harga bahan pangan, tetapi telah menunjukkan gerakan yang berlawanan pada indeks BI. Indeks BI turun karena perkiraan lapangan kerja yang lebih rendah dan keprihatinan akan kenaikan harga di masa depan.

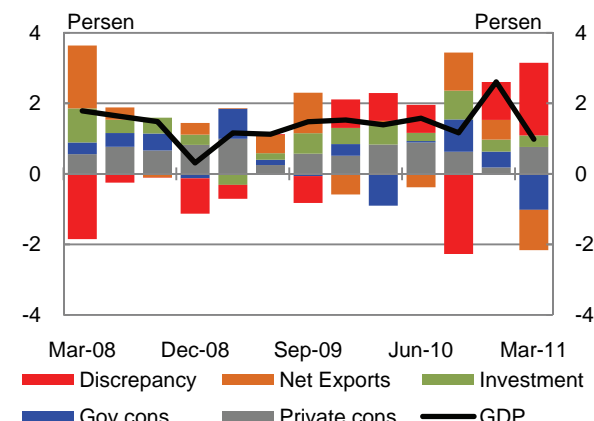
Beban pertumbuhan ekspor bersih tercermin dari terus bergelornya impor riil terhadap datarnya ekspor riil. Ekspor turun sebesar 0,3 persen, sementara impor meningkat sebesar 2,6 persen. Pertumbuhan impor tersebut konsisten dengan permintaan domestik yang terus melaju lebih cepat dari mitra-mitra dagang utama Indonesia.

Gambar 3: Pertumbuhan triwulanan melambat di triwulan 1/2011, turun dari nilai tertingginya pada triwulan 4/2010,... (persentase perubahan dalam PDB riil)



Catatan: * Rata-rata pertumbuhan triwulanan-ke-triwulanan sejak [triwulan 1/2000]
Sumber: BPS dan penyesuaian musiman staf Bank Dunia

Gambar 4: ...terutama dengan melemahnya belanja pemerintah dan ekspor bersih (kontribusi ke pertumbuhan triwulanan-ke-triwulanan dengan penyesuaian musiman, persen)



Catatan: Kontribusi mungkin tidak berjumlah ke pertumbuhan PDB secara keseluruhan karena penyesuaian musiman dari tiap rangkaian individual
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

Perdagangan eceran dan kulakan dan jasa memimpin pada sisi produksi

Harga perdagangan eceran dan kulakan terus menjadi salah satu pendorong pertumbuhan utama pada sisi produksi, yang mencerminkan kuatnya konsumsi domestik. Pertanian melemah dan pertambangan dan konstruksi jatuh. Sektor konstruksi mencatat pertumbuhan yang sangat rendah pada triwulan pertama, pada laju pertumbuhan yang paling lemah hampir selama 10 tahun terakhir, yang mungkin mencerminkan masalah dengan pencairan belanja modal pemerintah. Penjualan semen, yang dapat digunakan sebagai indikator dari kegiatan konstruksi, sebetulnya meningkat cukup kuat pada triwulan itu, meningkat di atas 15 selama setahun pada bulan Maret 2011. Kontribusi manufaktur terhadap pertumbuhan triwulanan menurun setelah menguat pada triwulan akhir tetapi dengan basis tahun-ke-tahun, pertumbuhan berada di atas 5 persen untuk dua triwulan terakhir, yang pertama kali sejak tahun 2007. Tekstil, besi dan baja, dan peralatan transpor telah menjadi kontributor utama.

Pengaruh dari gempa bumi dan tsunami Jepang terhadap PDB Indonesia tampaknya akan terbatas secara agregat, walaupun sektor-sektor seperti otomotif telah terpengaruh

Sejumlah manufaktur mobil dan sepeda motor Indonesia terpengaruh oleh kelangkaan bahan baku dari Jepang karena pabrik-pabrik di negara itu terkena dampak tsunami dan gempa bumi. Distributor mobil terbesar Indonesia memperkirakan bahwa produksi pada pabrik perakitan kendaraannya akan jatuh sebesar 15 persen pada triwulan kedua. Melihat pada dampak perdagangan, data perdagangan Jepang menunjukkan bahwa ekspor Jepang ke Asia turun sebesar 6,6 persen pada bulan, dan ekspor ke Indonesia juga turun sebesar 12,9 persen. Sebagian besar ekspor tersebut adalah komponen yang dikirimkan ke Indonesia untuk perakitan. Akan tetapi dampak apapun terhadap Indonesia pada triwulan kedua tampaknya akan terbatas dengan sifat sektor manufaktur Indonesia yang relatif terdiversifikasi.

Outlook bagi pertumbuhan Indonesia pada tahun 2011 tetap kuat, walaupun dengan perubahan komposisi relatif terhadap Triwulanan edisi bulan Maret 2011

Proyeksi PDB *headline* untuk tahun 2011 dan 2012 tidak berubah dari Triwulanan edisi bulan Maret 2011 masing-masing pada 6,4 persen dan 6,7 persen (Tabel 2). Pergerakan dalam PDB riil yang dicatat pada tiga bulan pertama tahun 2011 sebagian besar seperti yang diperkiraan pada Triwulanan bulan Maret. Selain itu, walaupun dengan ketidakpastian internasional yang disinggung di atas, pendorong *baseline* pertumbuhan relatif tetap stabil dalam hal pertumbuhan global dan kondisi ekonomi domestik. Telah terdapat perubahan dalam komposisi proyeksi pertumbuhan. Sebagai contoh, pertumbuhan konsumsi swasta telah direvisi naik untuk mengimbangi lemahnya investasi dan belanja pemerintah.

Asumsi yang mendasari outlook makro untuk tahun 2011 dan 2012 telah sedikit mengalami revisi untuk mencerminkan perkembangan tahun berjalan seperti terlihat pada apresiasi kurs tukar terhadap dolar Amerika, naiknya harga minyak dan jatuhnya inflasi (sehingga menurunkan potensi peningkatan BI Rate). Secara khusus, asumsi harga minyak telah dinaikkan ke harga rata-rata yang relatif konservatif sebesar 105 dolar Amerika per barel karena rata-rata tahun 2011 berjalan adalah 113 dolar Amerika. Asumsi ini menyiratkan penurunan bertahap harga minyak dari sekitar 120 dolar Amerika pada awal bulan Juni menjadi harga yang membuat harga rata-rata bagi sisa tahun 2011 pada sedikit di bawah 100 dolar Amerika. Juga terdapat sedikit penurunan pada pertumbuhan mitra perdagangan utama, mencerminkan dampak gempa bumi dan tsunami di Jepang, kelemahan di AS dan revisi terhadap pertumbuhan PDB Singapura.

Tabel 2: Proyeksi PDB agregat untuk tahun 2010 dan 2011 tetap tidak berubah (persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain)

	Tahunan			Tahun ke triwulan Desember			Revisi terhadap tahunan	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2011	2012
1, Indikator ekonomi utama								
Total belanja konsumsi	4,0	5,2	6,2	4,9	5,4	6,3	-0,1	0,1
Belanja konsumsi swasta	4,6	4,9	5,0	4,4	5,3	5,7	0,2	0,1
Konsumsi pemerintah	0,3	6,6	13,6	7,3	5,5	9,6	-2,2	0,1
Pembentukan modal tetap bruto	8,5	9,2	9,9	8,7	9,8	10,5	-0,8	-0,2
Ekspor barang dan jasa	14,9	12,9	10,5	16,1	8,0	10,3	1,2	-1,9
Impor barang dan jasa	17,3	16,9	12,6	16,9	12,3	12,8	4,7	-0,5
Produk Domestik Bruto	6,1	6,4	6,7	6,9	6,5	6,8	0,0	0,0
Pertanian	2,9	3,4	3,9	4,1	3,8	2,5	-0,2	-0,6
Industri	4,7	4,9	5,2	5,3	5,3	5,1	-0,2	-0,1
Jasa	8,4	8,6	8,8	5,8	9,2	8,6	0,3	0,1
2, Indikator Eksternal								
Neraca pembayaran (miliar AS\$)	30,3	24,8	26,0	n/a	n/a	n/a	8,1	11,2
Neraca berjalan (miliar AS\$)	5,7	2,8	4,5	n/a	n/a	n/a	0,5	1,8
Neraca Perdagangan (miliar AS\$)	21,3	18,6	21,0	n/a	n/a	n/a	1,4	2,7
Neraca keuangan (miliar AS\$)	26,1	22,5	21,5	n/a	n/a	n/a	8,3	9,5
3, Pengukur ekonomi lainnya								
Indeks harga konsumen	5,1	5,9	6,1	6,3	5,7	5,9	-0,4	-0,1
Indeks keranjang kemiskinan	8,4	7,8	7,0	11,1	5,8	6,9	-0,5	0,0
PDB Deflator	8,0	9,2	9,6	8,0	9,9	9,5	-0,2	-0,7
PDB Nominal	14,6	16,2	17,0	15,0	17,0	16,9	-0,2	-0,8
4, Asumsi ekonomi								
Kurs tukar (IDR/USD)	9074	8713	8650	8977	8650	8650	-187,5	-250,0
Suku bunga	6,4	6,8	7,0	6,5	7,0	7,0	-0,2	-0,5
Indonesian crude price (USD/bl)	79,4	105,1	97,0	86,2	97,0	97,0	15,1	7,0
Pertumbuhan mitra dagang utama	6,6	4,3	4,7	5,5	4,9	4,7	-0,1	-0,1

Catatan: Proyeksi aliran perdagangan berkaitan dengan neraca nasional, yang mungkin terlalu membesarkan pergerakan sebenarnya dalam volume perdagangan dan mengecilkan pergerakan harga karena perbedaan dalam rangkaian harga. Revisi dibuat sesuai dengan IEQ bulan Maret 2011.

Sumber: Kemenkeu, BPS, BI, CEIC dan proyeksi Bank Dunia

3. Aliran masuk portofolio dan PMA tetap kuat sementara surplus perdagangan menyempit

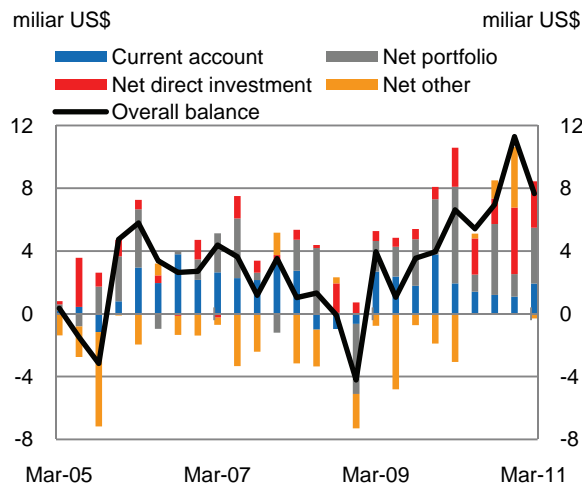
Keseluruhan aliran masuk neraca pembayaran pada triwulan 1/2011 hanya lebih rendah dari catatan nilai tertinggi pada triwulan 4/2010

Keseluruhan aliran masuk neraca pembayaran pada triwulan pertama mencapai 7,7 miliar dolar Amerika, nilai tertinggi kedua yang pernah tercatat. Surplus neraca berjalan adalah 1,9 miliar dolar Amerika, sementara total aliran masuk pada neraca modal dan keuangan mencapai 6,2 miliar dolar Amerika (Gambar 5). Cadangan devisa mencapai 118 miliar dolar Amerika pada akhir bulan Mei, atau setara dengan 6,9 bulan impor dan hutang luar negeri Pemerintah.

Aliran portofolio bangkit kembali dan PMA terus berjalan kuat

Aliran masuk ke neraca keuangan pada triwulan 1/2011 walaupun sempat mengalami penurunan pada triwulan 3 dan 4 tahun 2010, merupakan nilai ketiga tertinggi dalam catatan, meneruskan aliran masuk selama tujuh triwulan berturut-turut yang merupakan periode terpanjang pasca krisis tahun 1997-1998. Aliran portofolio menunjukkan pemulihan yang kuat, walaupun terdapat pelemahan pada awal tahun. Kuatnya PMA tetap berlanjut (lihat Bagian B) dengan 4,5 miliar dolar Amerika dalam aliran masuk bruto sementara nilai bersih investasi langsung mencapai 3 miliar dolar Amerika. Kekuatan aliran PMA melanjutkan tren menuju investasi dengan jangka waktu yang lebih panjang, relatif terhadap aliran portofolio.

Gambar 5: Aliran masuk modal mendominasi catatan keseluruhan aliran masuk neraca pembayaran...
(miliar dolar Amerika)



Catatan: Kesalahan dan penghilangan tidak ditunjukkan
Sumber: BI

Tabel 3: ...dan diproyeksikan untuk tetap kuat hingga tahun 2011 dan 2012
(miliar dolar Amerika)

	2008	2009	2010	2011	2012
Keseluruhan Neraca Pembayaran	-1,9	12,5	30,3	24,8	26,0
Neraca Berjalan	0,1	10,6	5,7	2,8	4,5
Perdagangan	9,9	21,2	21,3	18,6	21,0
Pendapatan	-15,2	-15,1	-20,3	-20,9	-21,8
Transfer	5,4	4,6	4,6	5,1	5,3
Neraca Modal & Keuangan	-1,8	4,9	26,1	22,5	21,5
Neraca Modal	0,3	0,1	0,0	0,2	0,2
Neraca Keuangan	-2,1	4,8	26,1	22,3	21,3
PMA	3,4	2,6	10,6	12,4	14,5
Portofolio	1,8	10,3	13,2	13,5	13,1
Lainnya	-7,3	-8,2	2,2	-3,6	-6,3
Cadangan^(a)	51,6	66,1	96,2	118,1	

Catatan: Kesalahan dan penghilangan tidak ditunjukkan. ^(a) cadangan 2011 per akhir bulan Mei 2011
Sumber: BI dan proyeksi Bank Dunia

Neraca perdagangan terus menyempit mencerminkan kekuatan relatif permintaan domestik

Neraca perdagangan Indonesia menyempit pada triwulan 1/2011 relatif terhadap triwulan 4/2010, bergerak menjadi 6,2 miliar dolar Amerika, yang mencerminkan surplus 8,4 miliar dolar untuk barang-barang dan defisit 2,2 miliar dolar Amerika untuk jasa. Pertumbuhan impor meninggalkan ekspor. Secara triwulanan, pertumbuhan ekspor umumnya tetap lambat, dengan peningkatan pada sektor manufaktur yang diimbangi dengan penurunan sektor pertanian dan pertambangan. Pada sisi impor, barang input setengah jadi berprestasi dengan baik, terutama elektronik, mesin dan besi baja. Neraca migas terus turun dengan konsumsi domestik terus meningkat kuat. Data bulanan menunjuk pada berlanjutnya penurunan neraca perdagangan barang, yang menurun ke 1,6 miliar dolar Amerika di bulan April, tetapi nilainya masih dua kali lipat dari surplus bulan April 2010.

Melihat ke depan, aliran masuk neraca pembayaran diperkirakan akan tetap kuat, walaupun lebih rendah dari catatan tahun 2010 karena surplus neraca berjalan menyempit dan aliran masuk modal menurun

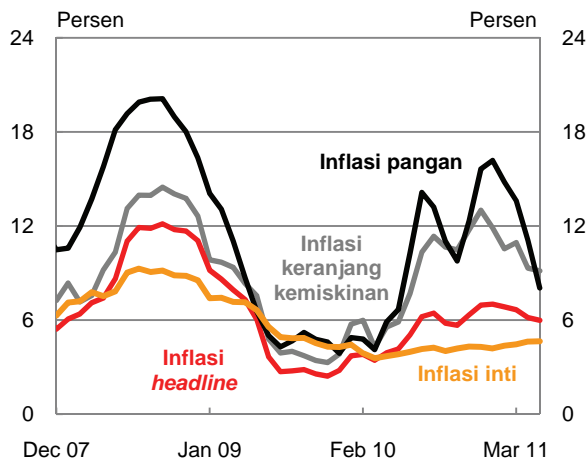
Neraca perdagangan diproyeksikan akan terus menyempit di tahun 2011 dan 2012 yang mencerminkan kekuatan kegiatan domestik (tidak hanya pada sisi impor tetapi juga pada pembayaran jasa profesional, usaha dan transportasi). Selain itu defisit pendapatan juga diperkirakan akan melanjutkan tren ekspansinya (didorong oleh repatriasi keuntungan) dan transfer yang berjalan akan tetap stabil. Sebagai akibatnya surplus neraca berjalan diproyeksikan akan terus mengikuti tren turun, yang membuka kemungkinan menjadi defisit. Akan tetapi, sebagai pengimbang hal ini adalah aliran modal yang terus berlanjut, walaupun telah termoderasi, dengan hasil bersih aliran masuk keseluruhan neraca pembayaran tahun 2011 dan 2012 sebesar 22 miliar dolar Amerika per tahun.

4. Inflasi headline telah turun tetapi risiko inflasi tetap ada

Mengikuti penurunan harga pangan, inflasi headline IHK turun dari 7 persen di bulan Desember 2010 menjadi sedikit di bawah 6 persen di bulan Mei 2011

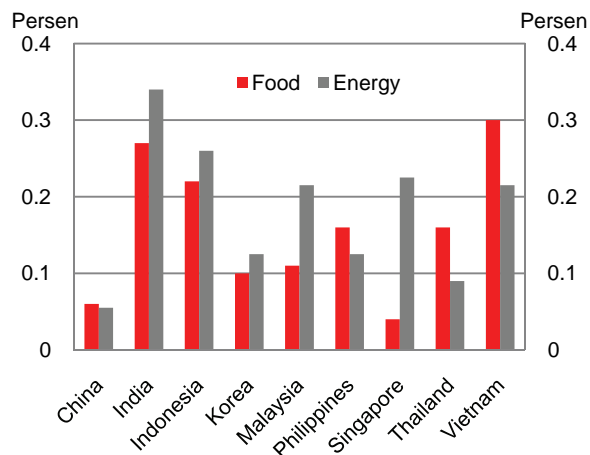
Inflasi headline IHK telah berangsur turun dari 7 persen di bulan Januari 2011 menjadi sedikit di bawah 6 persen di bulan Mei 2011 (Gambar 6). Seperti peningkatan inflasi pada semester kedua tahun 2010, gejala harga bahan pangan telah mendorong penurunan dalam inflasi headline belakangan ini. Inflasi harga pangan turun dari 16,2 persen di bulan Januari menjadi 10,2 persen di bulan Mei (walaupun untuk hampir seluruh bahan pangan, rata-rata laju inflasi masih tetap berada di atas keseluruhan keranjang). Tingkat indeks harga bahan pangan IHK turun sebesar 4,4 persen pada periode ini dengan adanya pasokan dari panen raya. Sebagai contoh, harga cabai turun sebesar 77 persen selama periode ini dan harga eceran beras dalam negeri turun sebesar 7,6 persen dari nilai tertingginya pada awal tahun 2011.

Gambar 6: Inflasi headline dan keranjang kemiskinan telah turun bersama-sama dengan inflasi harga bahan pangan tetapi inflasi inti mulai meningkat (perutumbuhan tahun-ke-tahun)



Sumber: BPS dan Bank Dunia

Gambar 7: Pengaruh harga energi dan bahan pangan domestik ke inflasi inti di Indonesia cukup tinggi (persentase)



Catatan: Dampak peningkatan 1 persen harga energi dan bahan pangan domestik. Didapatkan dari regresi inflasi inti atas harga pangan dan domestik saat ini dan yang lalu, dan celah output. Harga tingkat pedagang besar digunakan untuk India. Sumber: Perkiraan staf IMF

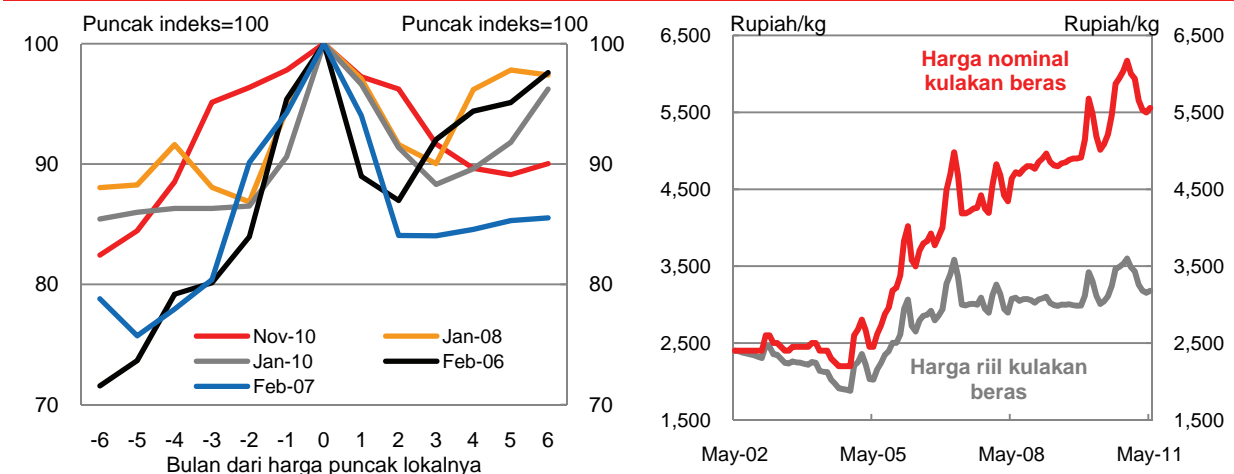
Kotak 1: Perkembangan harga terakhir di Indonesia

Gangguan cuaca sepanjang tahun 2010 telah menurunkan pasokan beras di beberapa daerah di Indonesia. Penurunan produksi beras dalam negeri menyebabkan peningkatan harga beras yang cukup tinggi. Gambar 8 membandingkan guncangan harga beras terakhir dengan guncangan-guncangan yang lain sejak tahun 2005. Mencermati jalur ke harga nominal di tingkat pedagang besar tertinggi pada lima tahun terakhir menunjukkan bahwa guncangan harga terakhir pada tahun 2010 ternyata berbeda dengan guncangan-guncangan sebelumnya. Nilai tertingginya dicapai relatif dini, pada bulan November, setelah peningkatan yang relatif stabil selama enam bulan dan kemudian sebagian dari kenaikan itu berangsur-angsur menurun di bulan-bulan berikutnya. Guncangan sebelumnya terjadi pada bulan Januari atau Februari segera sebelum masa panen dan laju peningkatan harga berlangsung jauh lebih cepat dan umumnya pada periode waktu yang lebih singkat. Serupa dengan itu, turunnya harga pada tiga bulan setelah puncak harga pada guncangan-guncangan yang lalu berlangsung lebih cepat dibanding penurunan yang terjadi setelah nilai puncak pada bulan November 2010, sebagian besar karena kedekatan masa panen dengan nilai-nilai puncak harga yang lalu. Sejak bulan November 2010, harga beras di tingkat pedagang besar telah mulai melemah, turun sebesar 15 persen, karena panen dan impor beras oleh Bulog. Pada guncangan harga beras yang lalu, harga-harga kembali meningkat setelah 3-6 bulan dari puncak harga (dengan pengecualian pada guncangan harga tahun 2007 yang diikuti oleh peningkatan harga yang relatif lesu dan pada tahun itu Bulog mengimpor beras setiap bulan untuk membantu meningkatkan pasokan). Harga beras telah menunjukkan peningkatan sejak minggu pertama bulan Mei hingga bulan Juni dan pada bulan-bulan berikutnya diperkirakan akan mengalami peningkatan harga beras yang berkaitan dengan bulan Ramadhan.

Harga beras hingga akhir tahun akan sangat bergantung kepada kualitas panen dan keputusan Pemerintah atas tambahan impor beras. Adanya kendala yang berkaitan dengan perkiraan produksi beras dan pola cuaca, bagian terakhir dari chapter ini akan mempelajari empat skenario yang berbeda terhadap peningkatan harga beras dan dampaknya kepada pengukuran inflasi.

Gambar 8: Peningkatan harga pada akhir tahun 2010 turun lebih lambat di kulakan dibanding g puncak-puncak harga yang lalu
(Indeks nominal harga beras kulakan dengan setiap rangkaian diindeks ke 100 pada nilai harga puncak)

Gambar 9: Harga kulakan) beras tetap tinggi dalam nilai nominal dan riil
(Harga nominal kulakan, harga riil dideflasi dengan inflasi inti dan harga 2002)



Catatan: Berdasar harga kulakan kualitas rendah IR-64 III
Sumber: BPS dan Bank Dunia

Catatan: Berdasar harga kulakan kualitas rendah IR-64 III
Sumber: BPS dan Bank Dunia

Melihat pada tren jangka panjang, harga nominal dari kulakan beras telah meningkat sebesar rata-rata 9.7 per tahun sejak 2002. Secara riil, harga kulakan beras telah meningkat sebesar rata-rata 3,1 persen per tahun sejak 2002. Harga kulakan tertinggi di bulan November 2010 adalah harga nominal dan riil yang tertinggi dengan harga-harga secara riil tetap berada di atas rata-rata tahun-tahun yang lalu (Figure 9).

Inflasi inti telah meningkat walaupun perkiraan inflasi melemah dengan pergerakan pada inflasi headline

Inflasi inti telah meningkat secara bertahan ke nilai tertinggi selama 20 bulan terakhir sebesar 4,6 persen dengan mulai meningkatnya biaya pakaian dan jasa. Tingkat harga inti telah meningkat sebesar 1,6 persen dari nilai basis yang tidak disesuaikan secara musiman dari bulan Desember 2010 hingga Mei 2011 (dibanding peningkatan sebesar 1,2 persen dari periode yang sama hingga Mei 2010). Perkiraan IMF menunjukkan bahwa pengaruhnya kepada inflasi inti harga bahan pangan dan energy dalam negeri cukup besar di Indonesia (Gambar 7). Seperti dibahas pada IMF Asia and Pacific Regional Economic Outlook bulan April 2011, tingginya tingkat pengaruh itu dapat mencerminkan tidak saja beban belanja (seperti bahan pangan, termasuk makanan yang disiapkan, yang merupakan 25 persen dari bobot keranjang harga inti Indonesia) tetapi juga kerangka kebijakan moneter dan kemampuan untuk mengendalikan perkiraan inflasi.

Perkiraan inflasi di Indonesia telah menyusut seperti ditunjukkan oleh hasil survei para ekonom profesional, walaupun demikian survei BI akan perkiraan harga enam bulan ke depan menunjukkan bahwa terdapat rasa waswas konsumen akan potensi penyesuaian subsidi pemerintah untuk bahan bakar dan listrik, dan naiknya harga bahan pangan mengikuti bulan Ramadan.

Outlook bagi inflasi IHK sangat bergantung pada tingkat harga energi yang diatur dan harga beras dalam negeri di masa depan

Walaupun inflasi headline mencatat tren yang menurun, masih banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi inflasi, khususnya yang berhubungan dengan harga makanan dan energi. Tekanan naik dikarenakan oleh peningkatan harga gandum dan energi dunia. Pengaruh langsung dari peningkatan harga tersebut yang dimulai sejak awal tahun 2011 yang diperkuat oleh pembatasan impor beras dan subsidi bahan bakar Indonesia. Padahal walaupun tanpa penyesuaian kebijakan pengaruh tidak langsung tetap dapat terjadi. Sebagai contoh, produk penyulingan minyak merupakan bahan input setengah jadi, menunjukkan indikasi perubahan pada asumsi harga minyak yang nantinya akan berujung pada harga konsumen. Pada harga beras, seperti telah disinggung sebelumnya, masa depan harga beras sangat sulit untuk diperkirakan, hal ini disebabkan karena sukarnya menilai keberhasilan panen dan cuaca hingga akhir tahun. Hal ini dapat menjadi peningkatan atau penurunan risiko bagi perkiraan inflasi dasar (lihat analisis skenario pada bagian risiko).

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi outlook inflasi termasuk kondisi kredit dalam negeri yang tampaknya akomodatif, yang dapat memberikan dorongan naik bagi harga-harga. Akhirnya, apresiasi kurs tukar yang terus berlangsung dapat menempatkan tekanan turun kepada harga-harga (walaupun sesuai pembahasan di bawah, apresiasi kurs tukar riil yang berlaku lebih tidak jelas dibanding dolar Amerika).

Menimbang seluruh faktor tersebut, dan mengasumsikan tidak adanya perubahan kebijakan, inflasi *headline* IHK diproyeksikan akan mencapai 5,7 persen di triwulan akhir tahun 2011 sebelum mulai berangsur naik menjadi 5,9 persen di bulan Desember 2012 yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan ekspansi kredit yang lebih tinggi. Inflasi keranjang kemiskinan diproyeksikan akan turun menjadi 5,8 persen pada triwulan akhir tahun 2011 dengan asumsi tidak ada goncangan harga yang lain dan meningkatnya pengaruh dari tingginya tingkat dasar dari harga bahan pangan tahun 2010. Untuk tahun 2012, dengan meningkatnya pergerakan pertumbuhan, diproyeksikan bahwa inflasi akan melaju menjadi rata-rata 6,1 persen selama setahun dengan inflasi keranjang kemiskinan meningkat menjadi 7 persen.

Harga-harga keseluruhan ekonomi terus meningkat secara bertahap melalui triwulan 1 tahun 2010 dan diperkirakan akan mencapai 9,2 persen di tahun 2011

Inflasi PDB deflator meningkat menjadi 8,4 persen pada triwulan pertama tahun 2011, melanjutkan peningkatannya secara bertahap dari nilai rendahnya sebesar 5,3 persen pada triwulan ketiga tahun 2009. Inflasi harga investasi berada sedikit di bawah 8 persen sementara harga konsumsi swasta turun sesuai dengan jatuhnya IHK, dan seperti umumnya terjadi pada triwulan pertama, besaran inflasi belanja pemerintah meningkat tajam menjadi di atas 10 persen.

Melihat ke depan, tren naik inflasi PDB deflator diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun 2011 (dengan inflasi deflator triwulan terakhir sebesar 9,9 persen) sebelum turun di tahun 2012. Outlook tahun 2011 tidak dibantu oleh lemahnya kegiatan dan harga konstruksi pada bulan Maret triwulan 2011 yang merupakan hasil paling rendah dari perhitungan dengan penyesuaian musiman selama 10 tahun.

5. Peningkatan harga bahan pangan sebelumnya tampaknya akan mempengaruhi pengukuran kemiskinan di bulan Maret 2011

Harga beras telah turun dari nilai puncaknya pada akhir tahun 2010 tetapi peningkatannya hingga bulan Maret 2011 tampaknya akan menghalangi manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam kemajuan pengentasan kemiskinan

Mengikuti penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2010 menjadi 13,3 persen, survei rumah tangga Susenas bulan Maret 2011 akan memberikan data kemiskinan nasional terakhir bagi Indonesia. Sepanjang tahun hingga bulan Maret 2011, pertumbuhan PDB riil mencapai 6,5 persen, memberikan dorongan kuat pada pendapatan riil, yang bergantung pada tingkat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan upah. Namun sebaliknya, tren positif ini juga diperlemah oleh peningkatan harga bahan pangan, serta peningkatan inflasi keranjang kemiskinan pada bulan Maret 2011, yaitu peningkatan harga rata-rata pada sejumlah barang kebutuhan dasar yang dikonsumsi oleh kaum miskin, dimana mencapai 10,9 persen per tahun. Seperti dibahas pada Bagian B dari *Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia* edisi bulan Maret 2011, guncangan harga bahan pangan yang cukup besar dapat meningkatkan tingkat kemiskinan, walaupun pertumbuhan PDB menguat, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2005-06. Melihat ke tahun 2012 mendatang, jalur mendasar yang biasa digunakan untuk menurunkan inflasi keranjang kemiskinan, seiring dengan pertumbuhan yang kuat, diproyeksikan dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan (meskipun hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh perubahan kebijakan, misalnya, dalam hubungannya dengan program perlindungan sosial, harga bahan pangan atau bahan bakar).

Penyerapan tenaga kerja telah terus menerus meningkat ...

Selama setahun sampai dengan bulan Februari 2011, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di Indonesia terus menerus bergerak naik. Total penyerapan meningkat sebesar 3,6 persen (3,9 juta orang) dibandingkan dengan peningkatan angkatan kerja sebesar 2,9 persen (3,4 juta orang). Sebagai akibatnya, angka pengangguran resmi Indonesia turun menjadi 6,8 persen di bulan Februari 2011 dari 7,4 persen satu tahun sebelumnya.

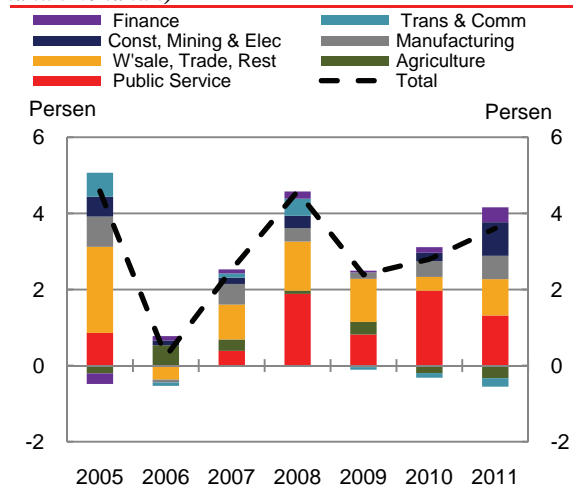
Secara lintas sektoral, penyerapan tenaga kerja di sektor keuangan meningkat sebesar 26 persen sepanjang tahun, nilai catatan tertinggi; dan sektor konstruksi mencatat peningkatan sebesar 15 persen (laju tercepat sejak tahun 1997/1998). Penyerapan di sektor pertanian

terus menurun selama dua tahun berturut-turut, sebesar 1 persen, tetapi tetap menjadi sektor dengan pekerja paling banyak, yaitu sebesar 40 persen dari seluruh tenaga kerja. Sektor pelayanan publik meningkat sebesar 9 persen sepanjang tahun dan telah memberikan kontribusi lebih dari sepertiga dari pertumbuhan tenaga kerja secara keseluruhan sejak bulan Februari 2010. Laju pertumbuhan yang tinggi pada sektor keuangan memberi kontribusi 11 persen dari seluruh tenaga kerja baru sejak bulan Februari 2010, walaupun porsinya dari total tenaga kerja hanyalah sebesar 1,5 persen.

...tetapi penciptaan pekerjaan yang produktif masih menjadi prioritas, terutama bagi tenaga muda

Melihat angkatan kerja keseluruhan, tingkat pengangguran bagi tenaga kerja muda usia (yang berusia antara 15 hingga 24 tahun) cenderung lebih tinggi daripada kelompok usia lain untuk. Data dari survei angkatan kerja Sakernas bulan Agustus 2010 menunjukkan bahwa setengah dari seluruh penduduk usia muda di Indonesia berada di dalam angkatan kerja dan tingkat pengangguran mereka berada pada angka 18 persen dibandingkan dengan 3 persen jumlah pengangguran untuk angkatan kerja dari kelompok usia lain. Tingkat pengangguran tenaga kerja muda yang enam kali lebih besar daripada kelompok usia lain tersebut adalah 2,5 kalilebih besar jika dibandingkan dengan nilai rata-rata pengangguran usia muda di tingkat global.

Gambar 10: Penyerapan pekerja terus menerus meningkat
(kontribusi poin persentase terhadap pertumbuhan tahun-ke-tahun)



Catatan: Poin data adalah untuk bulan Februari
Sumber: Sakernas dan Bank Dunia

Terdapat berbagai alasan di balik besarnya tingkat pengangguran tersebut. Di satu sisi, angkatan kerja muda mungkin lebih memilih untuk menunggu sampai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Di sisi yang lain, hal tersebut dapat mencerminkan keterbatasan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan dan keterbatasan akses terhadap informasi lapangan kerja. Peraturan tenaga kerja juga dapat menghalangi penciptaan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan. Untuk memaksimalkan potensi keuntungan dari posisi demografis yang dapat dipetik Indonesia pada satu dekade mendatang, seiring dengan terus menurunnya rasio ketergantungan, pemilihan kebijakan yang tepat harus dibuat untuk mendukung percepatan penciptaan pekerjaan dan meningkatkan hasil-hasil yang dapat diperoleh sebagai dampak dari penyerapan tenaga kerja. Untuk mendukung pertumbuhan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, Pemerintah dapat mempercepat upaya dalam mereformasi sistem pemutusan hubungan kerja untuk meningkatkan perlindungan dan mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pelatihan kewirausahaan dan akses terhadap pendidikan berkualitas serta memberikan pelayanan yang lebih baik untuk menghubungkan pemberi kerja dan pencari kerja.

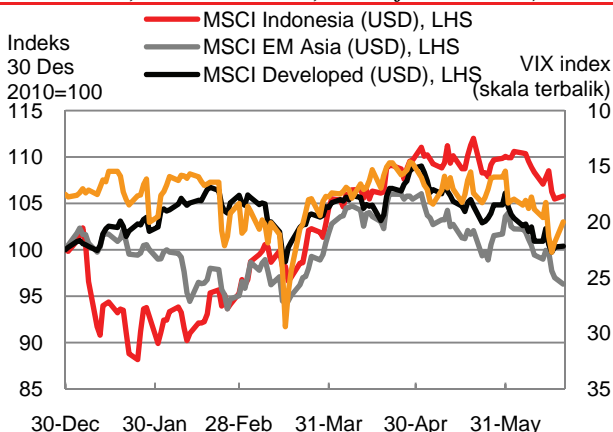
6. Aliran masuk modal portofolio telah kembali dengan deras tetapi mulai melemah belakangan ini

Harga aset Indonesia telah kembali pulih dari penurunan di akhir tahun 2010 dan awal 2011 tetapi belakangan ini terkena pengaruh dari peningkatan ketidakpastian di pasar global

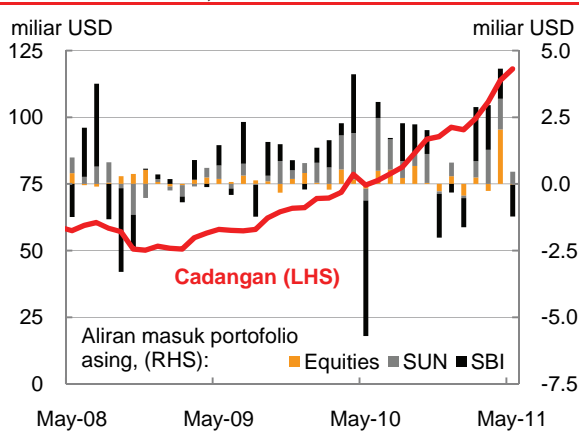
Pada triwulan terakhir harga-harga aset keuangan Indonesia telah memperoleh kembali penurunan yang terjadi pada awal tahun 2011. Pada periode sejak Triwulanan edisi Maret, yaitu dari tanggal 15 Maret hingga 20 Juni, harga saham-saham di Indonesia telah meningkat sebesar 5,8 persen (7,7 persen untuk indeks saham MSCI dalam dolar Amerika), imbal hasil (yield) obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah turun hampir 1 poin persentase ke 6,9 persen dan rupiah telah meningkat sebesar 2,3 persen terhadap dolar Amerika. Spread telah meningkat sebesar 2,3 persen terhadap dolar Amerika. Spread obligasi negara asing mengalami sedikit penurunan ke sedikit di atas 200 basis poin.

Akan tetapi, sejak awal bulan Juni, kekhawatiran atas penyelesaian krisis fiskal Yunani dan potensi penyebaran dampaknya ke anggota-anggota zona Euro yang lain, telah turut mendorong peningkatan ketidakpastian pasar dan penurunan saham-saham di belahan bumi lainnya (Gambar 11). Namun demikian, dampaknya terhadap harga aset Indonesia relatif terbatas. Spread obligasi negara asing hanya mengalami sedikit peningkatan walaupun harga saham telah jatuh. Indeks dolar Amerika MSCI Indonesia telah turun 3,8 persen sejak tanggal 1 Juni, walaupun penurunan ini lebih rendah dari yang terjadi di negara-negara berkembang di Asia secara keseluruhan atau untuk pasar saham di Negara-negara maju.

Gambar 11: Meski sempat pulih dari penurunan pada awal tahun, harga saham Indonesia kembali menurun pada beberapa minggu terakhir (indeks saham, 30 Des 2010=100; indeks fluktuasi VIX)



Gambar 12: Aliran dana masuk pulih dengan kuat selama bulan April tetapi kemudian melemah di bulan Mei (miliar dolar Amerika)



Catatan: Indeks VIX mengukur fluktuasi 30-hari yang diperkirakan dari indeks 500 S&P seperti tersirat dari harga kontrak option

Sumber: Thomson Financial Datastream dan Bank Dunia

Catatan: "Aliran" SUN (surat utang negara) dan SBI (sertifikat BI) menunjukkan perubahan kepemilikan

Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia

Portofolio aliran dana masuk pulih dari bulan Februari hingga April 2011 tetapi terjadi aliran keluar bersih di bulan Mei

Pemulihan harga aset Indonesia dari bulan Februari ke April mencerminkan kembalinya aliran masuk portofolio modal, terutama ke SBI dan SUN (Gambar 12). Kepemilikan SBI oleh investor asing meningkat dari 7,1 miliar dolar Amerika pada akhir bulan Februari menjadi 10,2 miliar dolar Amerika pada akhir bulan April. Kepemilikan ini berakhir setelah bulan Mei dengan penurunan ketersediaan SBI secara keseluruhan (bagian dari kepemilikan asing meningkat tipis menjadi 39 persen) dan berlakunya aturan *minimum holding period*, yang semula adalah satu bulan menjadi enam bulan. Setelah derasnya aliran masuk pada tiga bulan sebelumnya, modal asing yang masuk ke SUN juga mulai menyusut di bulan Mei. Akan tetapi, aliran ke SUN meningkat secara drastis pada minggu-minggu pertama bulan Juni (hingga 1,2 miliar dolar Amerika dari akhir Mei menjadi 27,6 miliar dolar Amerika pada tanggal 16 Juni), yang mungkin disebabkan karena peraturan baru tentang kepemilikan SBI tersebut. Pembelian bersih saham oleh investor asing terus berlanjut menuju neraca dengan sumbangan portofolio aliran modal masuk yang lebih kecil (dengan kuatnya aliran di bulan April yang terutama disebabkan oleh pembelian bersih yang signifikan selama satu hari).

Pendorong pemulihan aliran dana masuk hingga bulan April adalah bagian dari aliran keluar pada akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011

Pendorong kembalinya aliran dana masuk yang deras, terutama ke SBI dan SUN, dari bulan Februari hingga April, dapat dilihat sebagai kebalikan dari penentu aliran keluar yang terjadi sebelumnya. Dari sisi daya tarik domestik, inflasi *headline* telah menunjukkan penurunan yang diikuti oleh menurunnya perkiraan inflasi. Serupa dengan hal tersebut, setelah optimisme relatif pada permulaan tahun telah terjadi peningkatan ketidakpastian pada pertumbuhan ekonomi Negara maju., yang makin menunjukkan pertumbuhan Indonesia relatif lebih tinggi. Faktor-faktor lain yang mendorong aliran masuk ke Indonesia lebih stabil, yang termasuk, sebagai contoh, peningkatan berkelanjutan dalam kepercayaan kredit seperti terlihat pada peningkatan peringkat negara dari S&P pada awal bulan April 2011 hingga satu tingkat di bawah *investment grade*. Bahkan sejak tahun 2009, Indonesia *spread* hutang luar negeri Indonesia yang diperdagangkan, hampir sejalan dengan sub-indeks *investment grade* EMBIG (Emerging Market Bond Index Global) dari JP Morgan.

Pengelolaan aliran dana masuk Indonesia merupakan tantangan kebijakan yang terus berlangsung sementara krisis hutang zona Euro merupakan pengingat akan bahaya aliran dana masuk ke Indonesia berkaitan dengan guncangan dari luar negeri

Kebijakan BI untuk menanggapi aliran dana masuk adalah menggabungkan pengelolaan peningkatan dengan serangkaian kebijakan *macro-prudential*. Rupiah telah meningkat sebesar 4,7 persen terhadap dolar Amerika sejak akhir tahun 2010. Pergerakan terhadap pelemahan dolar ini secara umum sejalan dengan yang dialami oleh valuta regional lain dan kurs tukar riil efektif Indonesia sebetulnya tetap stabil sepanjang tahun (tetapi hingga bulan Mei 2011, tetap 6,2 persen lebih tinggi dari nilai bulan Desember 2009). Pengumpulan cadangan devisa tetap berlanjut, mencapai 118 miliar dolar Amerika pada akhir bulan Mei 2011, lebih tinggi sebesar 20 miliar dolar Amerika sejak pertengahan bulan Februari, dan hampir dua kali lipat dari nilai pada akhir tahun 2009. Cadangan ini cukup untuk menutupi impor dan pembayaran hutang resmi untuk tujuh bulan (atau sekitar 2,5 kali nilai hutang luar negeri jangka pendek dengan sisa jatuh tempo pada akhir bulan April). Akan tetapi, eksposur terhadap aliran dana keluar untuk valuta asing juga telah meningkat sesuai dengan peningkatan cadangan risiko (Gambar 13). Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangan di zona Euro dapat mengingatkan kita akan potensi guncangan yang dapat menghantam kelemahan Indonesia terhadap aliran dana masuk kembali.

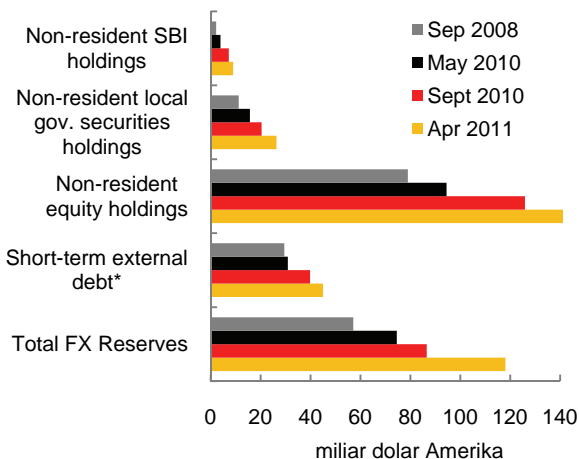
Dengan turunnya inflasi ke kisaran sasaran BI, BI Rate tetap tidak berubah sejak Triwulanan edisi Maret

BI Rate tetap tidak berubah sejak peningkatan sebesar 25 basis poin di bulan Februari menjadi 6,75 persen. Inflasi telah turun ke kisaran angka sasaran BI untuk tahun ini sebesar 5 +/-1 persen sehingga perkiraan pasar akan peningkatan lebih lanjut telah dipindahkan ke menjelang akhir tahun. Pengumuman kebijakan BI yang terakhir menunjukkan bahwa apresiasi rupiah adalah "sejalan dengan apresiasi nilai tukar di wilayah Asia", akan memperkuat gabungan kebijakan moneter dan upaya *macro-prudential* dengan menekankan pengelolaan aliran masuk modal dan likuiditas dalam negeri. Hal ini telah dipandang sebagai petunjuk akan adanya penyesuaian lebih lanjut dalam pemenuhan giro wajib minimum oleh beberapa pelaku pasar.

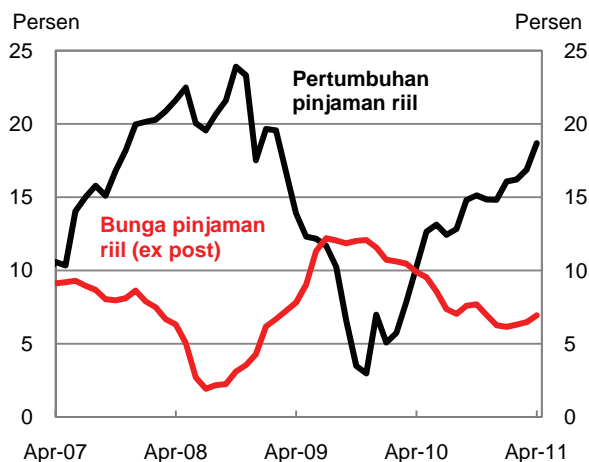
Beralih kepada indikator moneter, peningkatan aset luar negeri bersih BI secara umum telah diimbangi dengan peningkatan hutang kepada pemerintah pusat (yang mencerminkan rendahnya belanja pada awal tahun). Operasi pasar terbuka telah memainkan peran yang lebih terbatas (dengan terus meningkatnya penggunaan fasilitas deposito berjangka dibanding SBI). Sejak meningkat di penghujung tahun 2010 dalam

kaitannya dengan peningkatan giro wajib minimum, jumlah agregat uang sempit (*narrow money*) telah bertahan relatif stabil sementara pertumbuhan uang luas (*broad money*) hingga akhir bulan April 2011 adalah sekitar 15 persen.

Gambar 13: Pengumpulan cadangan devisa diikuti peningkatan kepemilikan asing atas aset Indonesia (miliar dolar Amerika)



Gambar 14: Pertumbuhan hutang riil terus meningkat sementara bunga pinjaman riil naik tipis dengan jatuhnya inflasi (suku bunga riil; pertumbuhan pinjaman tahun-ke-tahun, persen)



Catatan: * pinjaman luar negeri jangka pendek sesuai sisa waktu jatuh tempo (nilai April 2011 adalah sampai akhir IHK tahun-ke-tahun bulan Maret 2011)
Sumber: BI, KSEI, CEIC dan Bank Dunia

Catatan: Suku bunga riil ex post terdeflasi dengan inflasi
Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia

Indikator harga dan kuantitas menunjukkan bahwa kondisi kredit mendukung gambaran kinerja sektor riil

Kita melihat bahwa triwulan akhir adalah kelanjutan dari tren-tren kondisi kredit yang terakhir. Pertumbuhan nominal hutang mencapai 26 persen tahun-ke-tahun di bulan April. Dengan menurunnya inflasi, laju pertumbuhan ex post riil telah meningkat menjadi 18,7 persen, naik dari 14,8 persen pada akhir bulan Desember tetapi masih berada di bawah puncak-puncak nilai di tahun 2008 (Gambar 14). Kredit modal kerja masih menjadi penyumbang terbesar untuk pertumbuhan tahunan hingga bulan April, diikuti dengan kredit investasi dan kredit konsumen.

Indikator makro-prudential perbankan tetap kuat...

Sehubungan dengan harga kredit, suku bunga kredit nominal tetap stabil, pada kisaran 13 persen, dan juga suku bunga ex post riil yang naik tipis dengan inflasi yang bergerak turun. Efektifitas kebijakan BI yang mengharuskan bank-bank untuk mengumumkan suku bunga dasar kredit (*prime lending rate*) mereka untuk mendukung intermediasi masih sulit diukur. Sebagai contoh, kebijakan itu tidak membuat suku bunga kredit akhir dapat dibandingkan dengan kredit dari bank lain karena walaupun *prime rate* menyertakan biaya dasar dana, *overhead* dan margin keuntungan, ia tidak menyertakan premi risiko dari debitur.

Headline indikator kehati-hatian sektor perbankan telah tetap stabil dan kuat. Rasio kecukupan modal (CAR) untuk keseluruhan perbankan umum adalah 17,8 persen di bulan April 2011 dan rasio kredit bermasalah kotor (*gross NPL*) pada 3,2 persen. Dengan pesatnya pertumbuhan kredit dibanding pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 18 persen, rasio pinjaman terhadap tabungan (LDR) telah meningkat menjadi 80 persen di bulan April. Rasio kredit terhadap simpanan (LDR) beberapa bank umum besar berada dibawah nilai minimal target BI (78 hingga 100 persen), yang berlaku sejak bulan Maret, karena mereka memilih untuk menerima sanksi aturan simpanan wajib tersebut demi mempertahankan kesehatan usaha mereka sekarang dan juga strategi perusahaan mereka.

...walaupun terdapat keprihatinan tentang risiko operasional yang berkaitan dengan kasus penyelewengan yang baru terjadi

Kasus penyelewengan yang baru terjadi di Citibank dan Bank Mega menyoroti suatu rangkaian risiko operasional. BI telah memberi sanksi kepada kedua bank tersebut dan juga telah membekukan kegiatan *wealth management* pada 23 bank. Pembekuan itu diakhiri pada awal bulan Juni yang memungkinkan beberapa bank untuk melanjutkan operasi, sementara yang lain dikenakan beberapa pembatasan dan ada yang operasinya tetap dibekukan sampai terjadi peningkatan sistem. Dampak risiko operasi seperti itu sesuai dengan pedoman kecukupan modal sesuai dengan Basel tampaknya akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan. Kasus-kasus tersebut menyoroti betapa pentingnya sistem kendali internal yang kuat dan mekanisme pengawasan untuk melindungi terhadap kerugian dan potensi dampak negatif lain dalam hal nama baik bank, yang bagi bank yang tidak memiliki sumber dana yang kuat, dapat menyebabkan timbulnya risiko likuiditas.

7. Meningkatnya belanja subsidi bahan bakar dan tantangan pencairan anggaran

Kinerja fiskal di tahun 2011 hingga saat ini sangat dipengaruhi oleh dampak naiknya harga minyak dan masalah pencairan anggaran

Tren fiskal pada lima bulan pertama tahun 2011 ditandai dengan relatif kuatnya realisasi penerimaan dan lemahnya belanja program-program inti pemerintah. Peningkatan harga minyak telah meningkatkan penerimaan yang berhubungan dengan minyak tetapi juga diiringi oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi bahan bakar. Penerimaan pemerintah pusat pada lima bulan pertama tahun ini mencapai Rp 421 triliun, naik sebesar 18,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2010. Belanja mencapai Rp 364 triliun, meningkat sebesar 23,5 persen dari tahun 2010, karena realisasi subsidi energi yang lebih kuat telah menutupi lemahnya belanja inti. Sebagai akibatnya surplus fiskal pada lima bulan pertama tahun 2011 berjumlah Rp 57 triliun per akhir bulan Mei.

Perkembangan harga komoditas telah membantu pertumbuhan ekonomi pada lima bulan pertama tahun berjalan...

Penerimaan pajak dan non-pajak mengalami pertumbuhan yang sama hingga bulan Mei, masing-masing sebesar 18,6 persen dan 17,5 persen, dibandingkan periode yang sama tahun 2010. Pengaruh peningkatan harga komoditas terlihat dengan jelas. Sebagai contoh, penerimaan pajak dan non-pajak minyak dan gas, dimana gas semakin meningkat proporsinya, menyumbang 4 persen dari keseluruhan pertumbuhan penerimaan sebesar 18,3 persen. Pajak ekspor, walaupun hanya 3 persen dari seluruh penerimaan pada periode tersebut, hanya berkontribusi 1/5 dari pertumbuhan penerimaan dikarenakan kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO).

...dan merupakan penentu utama proyeksi penerimaan tahun 2011...

Bank Dunia memproyeksikan total penerimaan untuk tahun 2011 akan mencapai Rp 1.189 triliun, meningkat sebesar Rp 41 triliun dari proyeksi pada Triwulanan edisi bulan Maret 2011. Dengan tidak adanya pengumuman kebijakan penerimaan baru di tahun 2011, revisi naik atas penerimaan mencerminkan kenaikan asumsi harga minyak oleh Bank Dunia dari 90 dolar Amerika menjadi 105 dolar Amerika per barel. Juga terdapat sedikit revisi naik terhadap penerimaan non-migas, karena karena pandangan yang lebih optimistik terhadap arus perdagangan impor; meningkatkan bea impor.

...dan juga asumsi *lifting* volume minyak

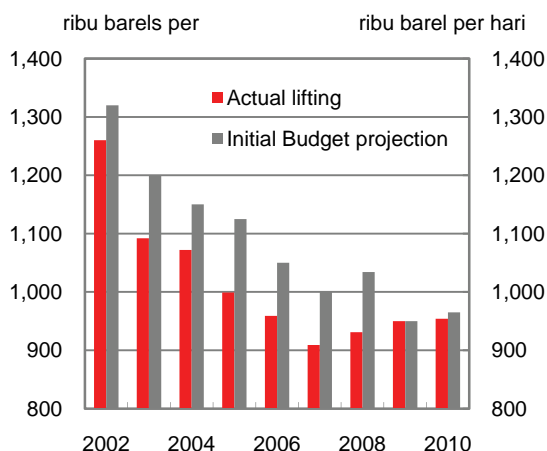
Berbalik dengan penguatan harga minyak, *lifting* minyak diperkirakan akan berada di bawah asumsi anggaran awal rata-rata di atas 970.000 barel per hari untuk tahun 2011. Angka dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rata-rata *lifting* dari bulan Januari hingga Maret adalah 872.000 barel per hari. Rendahnya *lifting* disebabkan oleh berbagai faktor seperti penghentian operasi yang tidak direncanakan, kurangnya investasi pada sektor tersebut, keterbatasan teknologi dan peralatan, buruknya cuaca dan dampak dari penerapan pembatasan *cabotage*.¹ Rendahnya angka *lifting* di tahun 2011 sejalan dengan tren penurunan umum yang ditunjukkan dalam dekade yang lalu. (Figure 15).

Asumsi target *lifting* Pemerintah yang untuk tahun 2011 adalah 945.000 hingga 970.000 barel per hari. Dengan demikian asumsi *lifting* Bank Dunia untuk tahun 2011 juga disesuaikan turun ke kisaran angka tersebut, pada 952.000 barel per hari, yang merupakan angka yang diberikan oleh pemegang kontrak karya di dalam program dan anggaran kerja mereka untuk tahun berjalan (harian Jakarta Post tanggal 3 Juni 2011). Dengan adanya ketidakpastian akan tingkat ini, Tabel 4 menunjukkan analisis sensitivitas pada tingkatan tersebut. Penurunan *lifting* sebesar 5 persen dari asumsi ini diproyeksikan

¹ "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012", Kementerian Keuangan RI.

akan menurunkan penerimaan sebesar 2 persen. Analisis s ini mengasumsikan tidak ada perubahan harga minyak dan penyederhanaan pengaturan pembagian biaya yang berlaku di sektor ini.

Gambar 15: Tren turun *lifting* minyak Indonesia dan tren asumsi anggaran awal yang terlalu besar (*lifting* minyak, ribu barel per hari)



Sumber: Kemenkeu

Tabel 4: Sensitivitas penerimaan terhadap volume *lifting* minyak (*perubahan proyeksi anggaran tahun 2011*)

	WB Juni IEQ baseline	Perbedaan <i>lifting</i> dari baseline (persen dalam kurung)	
		5% rendah	5% tinggi
Total Penerimaan	1189.4	-23.5	24.2
1. Penerimaan Pajak – Minyak dan Gas	77	(-2.0%) -3.7	-2.00% 3.7
2. Penerimaan Bukan Pajak – Minyak dan Gas	197.5	(-4.8%) -19.8	-4.80% 20.5
Asumsi Produksi minyak ('000 barel/hari)	952	(-10.0%) 904.4	-10.40% 999.6
Harga ICP (USD/barel)	105	105	105

Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staff Bank Dunia

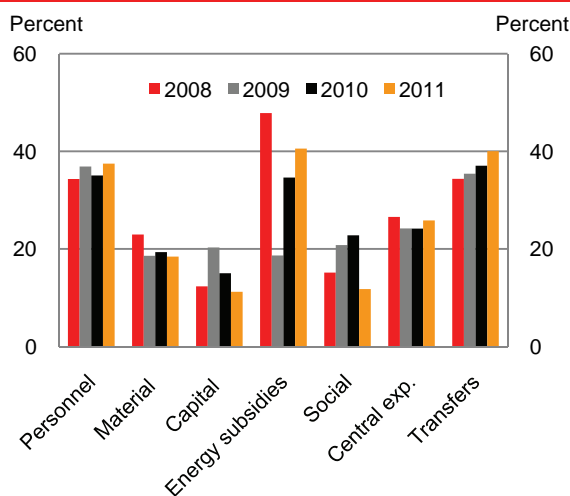
Belanja untuk program inti tetap lemah pada lima bulan pertama tahun 2011...

Jumlah belanja hanya mencapai 30 persen dari anggaran pada lima bulan pertama tahun 2011. Angka tersebut termasuk pengeluaran untuk subsidi energi yang lebih tinggi yang didorong oleh tingginya harga minyak, sementara belanja kementerian dan lembaga (K/L) tetap lemah. Di luar subsidi energi dan transfer ke daerah, belanja pemerintah pusat hanya mencapai 23 persen dari anggaran tahunan, bisa dibandingkan dengan periode 2010.

...dengan rendahnya belanja modal, seperti tahun yang lalu, tetapi juga rendahnya belanja sosial ...

Walaupun reformasi telah diterapkan untuk mempercepat pencairan anggaran (lihat ulasan pada Triwulanan bulan Desember 2010), realisasi belanja program inti tahun 2011 tetaplh lemah. Pencairan belanja modal, dimana anggarannya meningkat sekitar seperempat dari tahun 2010, tetap rendah sebesar 10 persen selama lima bulan pertama. Ini merupakan tingkat pencairan terendah selama lima tahun terakhir, seperti tingkat realisasi belanja sosial yang hanya mencapai 11 persen. Rumitnya pembebasan tanah, proses pengadaan dan anggaran yang lambat dan terbatasnya kapasitas kontraktor di lapangan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya belanja modal. Lemahnya pencairan belanja sosial mencerminkan faktor-faktor seperti rumitnya identifikasi dan verifikasi penerima manfaat, dan metode pembayaran berdasarkan klaim yang umumnya akan menumpuk di akhir tahun untuk program-

Gambar 16: Belanja subsidi menguat, tetapi realisasi belanja modal tetap lemah ... (*realisasi persen dari anggaran dalam 5 bulan pertama*)



Sumber: Departemen Keuangan dan perhitungan staff Bank Dunia

program seperti Jamkesmas. Kinerja belanja saat ini sekali lagi menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran saja tidak akan berhasil mencapai hasil pembangunan yang diharapkan jika kapasitas penyerapan dan pelaksanaan tidak ditingkatkan.

Akan tetapi belanja untuk subsidi energi kembali meningkat

Peningkatan harga minyak di tahun 2011 telah meningkatkan belanja subsidi energi selama lima bulan pertama tahun 2011. Seperti disinggung sebelumnya, harga rata-rata minyak bumi Indonesia diperkirakan 113 dolar Amerika per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 80 dolar Amerika per barel. Pada akhir bulan Mei, subsidi energi telah mencapai 40 persen dari anggaran satu tahun. Dan jumlahnya sekitar 26 persen dari seluruh belanja tidak termasuk transfer di tahun 2011. Sebagai perbandingan saja, subsidi energi tidak termasuk transfer mencapai 20 persen dari total belanja pada 2010 dan 32 persen pada 2008.

Dampak langsung dari tingginya harga minyak, biaya subsidi bahan bakar per liter meningkat, dengan harga jual Premium bersubsidi pada Rp 4.500 per liter yang hampir setengah dari harga jual Pertamina tanpa subsidi Rp 8300 per liter. Akan tetapi, tingginya pengeluaran juga disebabkan karena meningkatnya harga yang tidak disubsidi karena konsumen kembali beralih kepada bahan bakar bersubsidi. Selain itu, PLN menggunakan lebih banyak bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik pada triwulan pertama karena kelangkaan pasokan gas. Pada akhir bulan Mei, konsumsi bahan bakar bersubsidi mencapai 16,4 juta kilo liter atau 42 persen dari kuota untuk setahun. Jika tren tersebut terus berlanjut, pemerintah memproyeksikan konsumsi bahan bakar bersubsidi akan mencapai 41,3 juta kilo liter atau 7 persen di atas kuota tahunan². Penambahan ini akan meningkatkan biaya fiskal Pemerintah dan makin memperbesar *opportunity cost* dari buruknya penargetan subsidi bahan bakar.

Pemerintah telah kembali menunda rencana untuk menerapkan reformasi bahan bakar

Tekanan bagi reformasi subsidi bahan bakar makin meningkat walaupun masih belum ada kepastian apakah akan ada penyesuaian kebijakan, dan waktu pelaksanaannya. Pemerintah telah kembali menunda rencana untuk membatasi konsumsi bahan bakar bersubsidi untuk kendaraan pribadi yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April 2011. Mengikuti penundaan kedua dan diskusi dengan DPR di bulan Januari 2011, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk suatu tim dari tiga universitas ternama (Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada dan Institut Teknologi Bandung) untuk menilai pilihan-pilihan dan potensi dampak sosial dan ekonomi, sebagai bahan masukan rencana implementasi di bulan April 2011. Ketiga rekomendasi yang dihasilkan oleh tim adalah kombinasi penyesuaian harga dan volume, semuanya memasukkan perbedaan harga terhadap pengguna. Pemerintah, prihatin dengan tingginya harga minyak dan tingkat inflasi, memutuskan untuk menunda reformasi tersebut.

Proyeksi Bank Dunia terhadap belanja pemerintah tahun 2011 telah direvisi naik dengan naiknya belanja subsidi bahan bakar...

Revisi naik asumsi Bank Dunia untuk rata-rata harga minyak bumi untuk tahun 2011 menyebabkan naiknya proyeksi belanja untuk subsidi energi (untuk bahan bakar dan tenaga listrik) menjadi Rp 211,1 triliun (meningkat sebesar Rp 47,9 triliun dari proyeksi Triwulanan bulan Maret 2011 dan di atas asumsi APBN sebesar Rp 187,6 triliun). Naiknya harga minyak juga mengakibatkan peningkatan transfer ke daerah dan belanja pendidikan (yang harus mencapai 20 persen dari jumlah belanja nasional). Kinerja belanja inti diperkirakan akan meningkat pada semester kedua tahun ini tetapi secara keseluruhan diperkirakan jumlahnya masih berada di bawah anggaran. Secara keseluruhan, jumlah pengeluaran, termasuk transfer, diperkirakan akan mencapai Rp 1.280 triliun (sekitar Rp 50 triliun di atas tingkat APBN).

...dan proyeksi defisit Bank Dunia untuk tahun 2011 telah meningkat tetapi masih berada di bawah proyeksi anggaran Pemerintah

Proyeksi Bank Dunia untuk defisit anggaran tahun 2011 telah ditingkatkan menjadi Rp 90,9 triliun atau 1,2 persen dari PDB (Tabel 5). Peningkatan proyeksi belanja melebihi peningkatan penerimaan yang menyebabkan defisit naik sebesar Rp 27,2 triliun atau 0,4 persen dari PDB dari proyeksi Triwulanan edisi bulan Maret 2011. Proyeksi defisit Bank Dunia itu tetap masih berada di bawah tingkat anggaran awal Pemerintah pada Rp 124,7 triliun atau 1,8 persen dari PDB. Dengan tingginya belanja subsidi energi, Menteri Keuangan sebagaimana dilaporkan oleh Media, mengindikasikan bahwa pemerintah akan meningkatkan defisit anggaran lebih dari 2 persen dalam APBN-P yang akan dibahas pada bulan Juli.

² <http://www.bisnis.com/infrastruktur/energi/27090-bph-migas-ajukan-tambahan-kuota-bbm-bersubsidi>

Posisi pembiayaan fiskal Pemerintah masih tetap kuat dengan penerbitan obligasi global dalam mata uang dolar Amerika sebesar 2.5 miliar dolar

Kebutuhan pembiayaan kotor pemerintah pada 2011 diperkirakan sebesar Rp 258 triliun. Jumlah penerbitan obligasi yang dapat diperdagangkan di tahun berjalan hingga tanggal 7 Juni telah mencapai Rp 98.7 triliun atau 49 persen dari target penerbitan sebesar Rp 200 triliun untuk tahun 2011. Sebagai tambahan, menurut data Bank Indonesia, akumulasi surplus mencapai Rp 96 triliun walaupun pengesahan DPR diperlukan untuk dapat menggunakannya. Penerbitan surat berharga pemerintah selama kwartal pertama termasuk penerbitan obligasi global umum Indonesia untuk jangka waktu 10-tahun dalam mata uang dolar Amerika dengan nilai 2,5 miliar dolar, dengan *yield* sebesar 5,1 persen (dibanding *yield* 6,1 persen untuk penerbitan pada bulan Januari 2010). Pemerintah telah menunda rencana penerbitan obligasi samurainya di tahun 2011 karena kondisi ekonomi Jepang. Kementerian Keuangan juga telah mulai menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) untuk jangka waktu 3 bulan, dengan *yield* sebesar 5,185 persen. Surat ini akan memberikan suku bunga acuan bagi seri obligasi Pemerintah dengan suku bunga variabel, menggantikan Sertifikat Bank Indonesia 3-bulanan, yang penerbitannya telah dihentikan oleh Bank Indonesia di bulan November 2010. Pemerintah juga mengisyaratkan bahwa terdapat rencana untuk menerbitkan SUN untuk jangka waktu 6 dan 9 bulan.

Pemerintah telah mengumumkan kerangka makro dan fiskal untuk tahun 2012 dan kini sedang membahas asumsi anggarannya dengan DPR

Pemerintah telah mengumumkan rancangan kerangka makro dan fiskal untuk tahun 2012. Defisit anggaran berada pada kisaran 1,4 hingga 1,6 persen dari PDB (turun dari 1,8 persen pada APBN 2011). Pemerintah sedang membahas asumsi APBN 2012 dengan DPR, tetapi media telah melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada pada kisaran 6,6 hingga 7 persen, kurs tukar pada Rp 8.600-9.100 per dolar Amerika dan inflasi pada kisaran 4 hingga 5,3 persen.³

Prioritas belanja untuk tahun 2012 mencakup program sosial dan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dalam negeri dan pembangunan koridor-koridor ekonomi seperti tercakup di dalam Masterplan yang baru diterbitkan (lihat pembahasannya di Bagian C). Usulan Pemerintah juga termasuk peningkatan target penerima manfaat subsidi seperti penerapan distribusi bahan bakar bersubsidi secara tertutup, pengurangan subsidi listrik dan peningkatan sasaran subsidi pertanian.

³ <http://economy.okezone.com/read/2011/06/14/20/467996/inilah-asumsi-makro-apbn-2011>

Tabel 5: Peningkatan subsidi bahan bakar telah mendorong revisi naik proyeksi defisit anggaran Bank Dunia tahun 2011
(triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2009	2010	2011 (p)	2011 (p)	2011 (p)
	Outcome	Outcome	Budget	WB June estimates*	Revision from Mar 2011 estimates*
A. State revenue and grants	848.8	1,014.0	1,104.9	1,189.4	40.6
1. Tax revenue	619.9	744.1	850.3	858.6	11.8
a. Domestic tax	601.3	715.2	827.2	813.3	9.3
i. Income tax	317.6	356.6	420.5	432.3	9.0
- Oil and gas	50.0	58.9	55.6	77.0	8.7
- Non oil and gas	267.5	297.7	364.9	355.3	0.2
ii. Other domestic taxes	283.6	358.6	406.8	381.0	0.3
b. International trade tax	18.7	28.9	23.0	45.3	2.5
i. Import duties	18.1	20.0	17.9	24.5	1.6
ii. Export duties	0.6	8.9	5.1	20.7	1.0
2. Non-tax revenue	227.2	267.5	250.9	330.8	28.7
<i>o/w natural resources</i>	139.0	170.1	163.1	217.9	26.8
i. Oil and gas	125.8	152.7	149.3	197.5	26.6
ii. Non oil and gas	12.8	17.3	13.8	20.4	0.2
B. Expenditure	937.4	1,053.5	1,229.6	1,280.3	67.7
1. Central government	628.8	708.7	836.6	875.7	57.3
- Personnel	127.7	147.7	180.8	173.6	1.8
- Material expenditure	80.7	94.6	137.9	117.5	-6.6
- Capital expenditure	75.9	75.5	135.9	116.1	-6.1
- Interest payments	93.8	88.3	115.2	112.8	-0.8
- Subsidies	138.1	214.1	187.6	262.2	48.0
a. Energy	94.6	140.0	136.6	211.1	47.9
b. Non Energy	43.5	74.2	51.0	51.1	0.1
- Grants expenditure	0.0	0.1	0.8	0.8	0.5
- Social expenditure	73.8	68.4	63.2	61.3	0.6
- Other expenditures	38.9	20.0	15.3	31.4	20.0
2. Transfers to the regions	308.6	344.7	393.0	404.6	10.4
C. Primary balance	5.2	48.9	-9.4	21.9	-28.0
D. SURPLUS / DEFICIT	(88.6)	(39.5)	(124.7)	(90.9)	(27.2)
Deficit (percent of GDP)	(1.6)	(0.6)	(1.8)	(1.2)	(0.4)
Economic assumptions/outcomes					
Gross domestic product (GDP)	5,604	6,423	7,020	7,462	-13
Economic growth (per cent)	4.6	6.1	6.4	6.4	0.0
CPI (per cent)	4.8	5.1	5.3	5.9	-0.5
Exchange rate (IDR/USD)	10,356	9,074	9,250	8,713	-188
Interest rate of SBI (average %)	7.3	6.4	6.5	6.8	-0.2
Crude oil price (USD/barrel)	61.6	79.4	80.0	105	14.9
Oil production ('000 barrels/day)	950	954	970	952	-18

Catatan: *Proyeksi penerimaan Bank Dunia disusun dengan metodologi yang berbeda dengan yang digunakan oleh Pemerintah untuk mendapatkan proyeksi bagi PDB nominal (lihat pembahasan Bagian C dari Triwulan edisi Juni 2010)
Sumber: Kemenkeu dan proyeksi Bank Dunia

8. Ketidakpastian membayangi outlook

Serangkaian risiko negatif membayangi outlook perekonomian dan keuangan global, namun demikian Indonesia nampak cukup tangguh dalam meredam guncangan eksternal yang terjadi

Sebagaimana diulas dalam diskusi tentang perekonomian global di laporan triwulanan edisi bulan Maret 2011 lalu, ketidakpastian baru mulai tampak seiring dengan prospek pertumbuhan global yang relatif menguat. Bagi Indonesia, beberapa guncangan eksternal tak berefek signifikan terhadap penurunan perekonomian domestik karena transmisi yang relatif terbatas. Sebagai contoh, efek negatif langsung pada perdagangan luar negeri Indonesia akibat pelemahan pertumbuhan di AS dan Uni Eropa relatif kecil dirasakan dibandingkan dengan yang dirasakan oleh negara di Asia Tenggara lainnya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki rantai produksi yang lebih kuat dibanding Indonesia

khususnya untuk rantai global barang-barang manufaktur. Adapun guncangan lainnya cenderung memiliki dampak yang lebih berarti. Sebagai contoh, sebuah guncangan negatif untuk investasi pembangunan di Cina dan India akan mempengaruhi permintaan ekspor komoditas Indonesia. Guncangan naik harga komoditas global, seperti dibahas pada Triwulanan sebelumnya, juga dapat menguntungkan sektor perdagangan Indonesia, tetapi, dengan sistem subsidi energi yang sekarang berlaku, Indonesia tetap memiliki risiko fiskal, dan potensi inflasi, dari dampak kenaikan harga minyak. Harga bahan pangan internasional yang lebih tinggi juga dapat mempengaruhi outlook inflasi domestik. Akhirnya, ruang untuk guncangan di pasar keuangan internasional yang dapat memicu aliran keluar modal masih tetap terbuka, terutama yang berasal dari krisis hutang zona Euro. Dapat berupa peningkatan penghindaran risiko atau, dalam hal restrukturisasi apapun, dampak kerugian pada neraca bank yang dapat mendorong penurunan pemberian hutang lebih lanjut, yang mempengaruhi aliran modal internasional ke negara-negara berkembang.

Di satu sisi, pendorong pertumbuhan domestik dan neraca sektor publik dan keuangan yang kuat menempatkan Indonesia dalam posisi yang relatif baik untuk mengelola setiap guncangan tersebut. Di sisi lain, perkembangan terakhir domestik maupun internasional telah menyoroti karakteristik struktural tertentu, seperti sistem subsidi bahan bakar, bagian arus portofolio jangka pendek yang relatif tinggi dan dangkalnya pasar keuangan domestik, yang rentan terhadap jenis guncangan tersebut. Reformasi kebijakan jangka pendek dan menengah untuk mengatasi hal-hal itu dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan-guncangan tersebut di masa depan.

Secara domestik, outlook untuk inflasi tergantung risiko utama jangka pendek ...

Prospek inflasi secara umum tak lepas dari gambaran ekspektasi tentang harga beras di masa datang. Sementara untuk harga energi, risiko transmisi harga internasional yang tinggi yang berdampak kepada harga konsumen domestik sangat bergantung pada profil dan besarnya penyesuaian yang dilakukan pemerintah terhadap harga bahan bakar. Walaupun peningkatan inflasi inti hingga saat ini masih jinak, dan terutama yang didorong oleh harga emas, kewaspadaan terhadap tanda-tanda potensial terjadinya *overheating* tetap dibutuhkan.

...resiko harga beras berdampak lebih kuat kepada inflasi yang dirasakan oleh kaum miskin dibanding dengan inflasi yang dirasakan secara umum

Harga beras merupakan faktor penting inflasi IHK dan inflasi keranjang kemiskinan, dan adalah salah satu sumber ketidakpastian kunci di sekitar perkiraan dasar. Mengingat tingginya kesulitan dalam memperkirakan harga beras karena ketidakpastian atas kualitas panen dalam negeri, kondisi cuaca dan volume impor, dapat dievaluasi berbagai skenario pertumbuhan harga beras.

Tabel 6: Dampak skenario harga eceran beras pada inflasi pada triwulan 4/2011

	Skenario pertumbuhan harga eceran beras				
	Sangat rendah	Rendah	Baseline	Kecil	Besar
Inflasi IHK	5,2	5,5	5,7	5,9	6,2
<i>Perubahan dari baseline</i>	-0,5	-0,2	-	0,2	0,4
Inflasi keranjang kemiskinan	2,6	4,2	5,8	7,3	8,8
<i>Perubahan dari baseline</i>	-3,1	-1,5	-	1,5	3,0
<i>Memo:</i> Pertumbuhan harga eceran beras Triwulan 4/2011	-8,2	-1,5	5,4	12,5	19,9

Catatan: Inflasi adalah inflasi tahun-ke-tahun pada Triwulan 4 2011. Baseline mengasumsikan pertumbuhan harga eceran beras pada triwulan 3 dan 4 sejalan dengan rata-rata dekade yang lalu (naik 5 persen tahun-ke-tahun). Skenario rendah dan kecil memiliki laju pertumbuhan pada +/- 1 deviasi standar dari mean tersebut dan sangat besar dan rendah pada +/- 2 deviasi standar
Sumber: Proyeksi Bank Dunia

Tabel 6 menyajikan dampak terhadap inflasi *headline* dan inflasi keranjang kemiskinan pada

triwulan keempat tahun 2011 menurut sejumlah skenario untuk pertumbuhan harga eceran beras hingga akhir tahun, berdasarkan catatan pertumbuhan harga beras di triwulan tiga dan empat. Secara umum, dua-pertiga dari waktu, pertumbuhan harga beras

eceran biasanya akan terletak di antara skenario rendah dan kecil dan kemungkinan terjadinya skenario yang ekstrim hanya sekitar 5 persen. Lintasan menuju skenario yang tinggi tersebut akan serupa dengan peningkatan yang terjadi pada tahun 2006, dan peningkatan yang sedikit lebih rendah pada tahun 2010. Hasilnya jelas menunjukkan adanya sensitivitas outlook inflasi terhadap variabilitas harga beras dan kenyataan bahwa dampak terbesar terutama terjadi inflasi keranjang kemiskinan di mana beras adalah sekitar seperlima dari keseluruhan keranjang, sementara pada keranjang IHK besarnya hanyalah empat persen.

Harga minyak yang tinggi dan tak bisa diprediksi juga mengandung risiko fiskal dan *opportunity cost*

Posisi fiskal saat ini dirasakan cukup kuat dengan tingkat hutang dan konservatif budget defisit yang rendah. Akan tetapi, dirasakan juga kemungkinan risiko disisi penerimaan dan belanja. Meningkatnya belanja fiskal dan biaya kesempatan (*opportunity cost*) akibat *status quo*-nya kebijakan subsidi kemungkinan dapat terabaikan dengan adanya kondisi pencairan dana yang masih lambat (baik belanja modal dan bagi program-program lain seperti BOS). Menurunnya *lifting* minyak hingga akhir tahun menambah risiko penurunan di sisi penerimaan, dibanding peningkatan penerimaan jika harga minyak makin meningkat.

Risiko-risiko utama jangka menengah terus mengikuti penerapan kebijakan dan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan di masa depan

Risiko jangka menengah mengelilingi aspirasi pertumbuhan dalam RPJMN dan target jangka panjang dari Masterplan tentang penempatan prioritas, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan investasi infrastruktur publik yang dapat membantu untuk mendorong tingkat dan jenis investasi swasta yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kunci untuk membuka simpul hambatan reformasi seperti UU pembebasan tanah, sangat diperlukan baik untuk fungsi mereka sendiri dan sebagai pemberian sinyal. Mengingat sifat lintas-sektor dari sebagian besar kendala pertumbuhan tersebut, tidak ada upaya yang menjadi satu-satunya solusi dan kemajuan dalam beragam bidang akan mendukung pencapaian target pertumbuhan yang ambisius tersebut. Memenuhi sasaran Pemerintah untuk pertumbuhan yang luas dan berkelanjutan juga akan membutuhkan investasi dalam jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan, bersama-sama dengan penggunaan sumberdaya alam Indonesia yang berkelanjutan. Jika tantangan-tantangan ini dapat ditangani maka Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pendorong pertumbuhan utama untuk beberapa dekade berikutnya (Kotak 2).

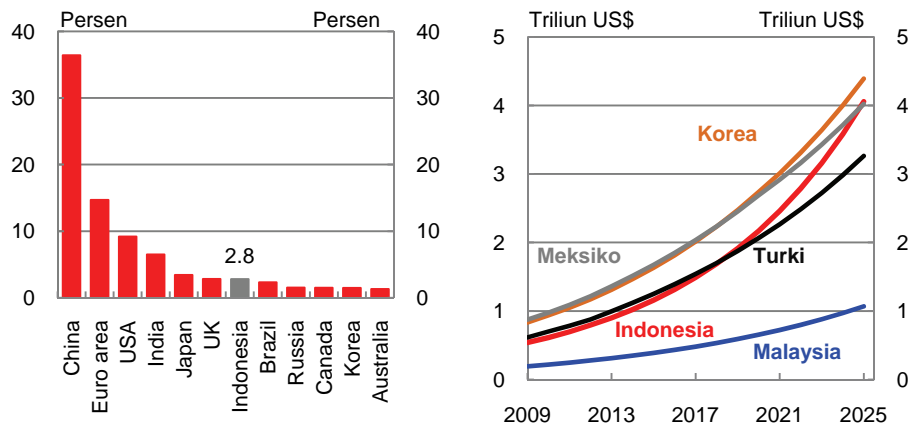
Kotak 2: Potensi Indonesia dalam perkembangan dunia yang multi-poros

Bagaimana sistem ekonomi dan keuangan dunia akan berubah selama bertahun-tahun hingga tahun 2025? Pertanyaan itu dibahas pada laporan Bank Dunia terakhir dengan judul *Global Development Horizons 2011, Multipolarity: The New Global Economy*. Hasil analisis menemukan bahwa suatu orde ekonomi global baru sedang terbentuk dengan keseimbangan pertumbuhan global bergeser dari negara-negara maju ke ekonomi berkembang seperti Indonesia. Dalam dunia multi-poros yang baru ini terdapat lebih dari dua poros pertumbuhan dunia, yaitu negara-negara yang mendorong pertumbuhan dunia karena ukurannya, dinamikanya dan hubungannya dengan negara-negara lain di dunia. Laporan itu memperkirakan bahwa Amerika Serikat, daerah Euro dan Cina akan menjadi tiga kutub pertumbuhan pada tahun 2025, yang memberikan dorongan kepada negara-negara lain, termasuk Indonesia, melalui saluran perdagangan, keuangan dan teknologi. Negara-negara berkembang lain juga akan tumbuh sebagai kutub pertumbuhan utama, yang mencerminkan pertumbuhan mereka yang relatif kuat. Antara tahun 2011 dan 2025 negara-negara berkembang akan meningkat sebesar rata-rata 4,7 persen per tahun, sementara negara-negara maju hanya tumbuh 2,3 persen per tahun.

Hasil analisis tersebut menyoroti potensi Indonesia untuk bergabung dengan poros pertumbuhan global utama, walaupun dibutuhkan kerja keras untuk mencapai posisi tersebut. Analisis menyebutkan pencapaian itu akan bergantung pada keberhasilan kebijakan dan investasi untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan selama periode tersebut. Jika hal ini dapat tercapai, maka pada tahun 2025, Indonesia dapat menjadi salah satu dari enam ekonomi berkembang yang menghasilkan setengah output dunia, bersama-sama dengan Brasil, Cina, India, Korea dan Rusia. Sesuai skenario ini, bagian dari pertumbuhan global Indonesia di tahun 2025 akan berkisar 2,8 persen (Gambar 18), di depan Brasil dan Rusia. Angka itu berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,1 triliun dolar Amerika secara nominal pada tahun 2025 (Gambar 19) dan PDB per kapita akan dua kali lipat lebih besar secara riil dari nilai sekarang.

Gambar 17: Indonesia dapat menjadi pendorong pertumbuhan global pada tahun 2025...
(bagian kontribusi pertumbuhan global, 2021–25)

Gambar 18: ...dan berpotensi menjadi salah satu negara berkembang terbesar (lintasan PDB nominal, 2009–25)



Sumber: Bank Dunia (2011), *Global Development Horizons* Sumber: Bank Dunia (2011), *Global Development Horizons*

Catatan: Kotak ini menggunakan laporan Bank Dunia (2011), *Global Development Horizons*

B. PERKEMBANGAN TERBARU PEREKONOMIAN INDONESIA

1. ASEAN 2011: Kepemimpinan Indonesia

Indonesia dapat memainkan peran yang penting dalam membentuk agenda masa depan ASEAN dengan kedudukannya sebagai ketua di tahun 2011

Sebagai Ketua ASEAN untuk tahun 2011, kini Indonesia memiliki peran utama untuk membentuk program kerja masa depan kelompok sepuluh negara Asia Tenggara ini.⁴ Apa saja tujuan ekonomi ASEAN, ukuran ekonominya dan apa sasaran Indonesia selama tahun kepemimpinannya? Setelah rapat Pimpinan ASEAN pertama tahun ini di Jakarta pada awal bulan Mei, bagian ini memberikan ulasan singkat dari masalah-masalah tersebut.

a. Indonesia dan ASEAN

ASEAN adalah kelompok yang beraneka-ragam...

Setelah pendiriannya dengan Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, empat dekade terakhir kerjasama regional dalam ASEAN tidaklah selalu mulus. ASEAN merupakan wilayah dengan ekonomi, politik, keragaman sosial budaya yang signifikan. Keanekaragaman yang telah menghasilkan suatu bentuk kerjasama dan diplomasi ASEAN yang - menurut suatu penelitian ADB baru-baru ini oleh Hill & Memon - memiliki ciri sikap hati-hati, pragmatisme dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. "ASEAN Way" ini dapat membatasi kecepatan dan pengambilan keputusan tetapi juga dapat menjadi kekuatan untuk membangun kebijakan yang inklusif. Namun demikian, kemunculan negara-negara berkembang utama, seperti Cina dan India dalam beberapa tahun terakhir, telah memberikan dorongan tambahan bagi ASEAN untuk menciptakan pengelompokan wilayah yang lebih kuat, lebih bersatu dan kohesif untuk bertindak baik sebagai mitra dan sebagai penyeimbang kedua kekuatan ekonomi tersebut.

...yang mana Indonesia memiliki peran yang unik

Sebagai populasi dan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki modal yang unik untuk memimpin ASEAN dan mewakili ASEAN dalam forum Internasional. Sebagai contoh, sebagai satu-satunya ekonomi ASEAN yang juga sebagai anggota G20, Indonesia dapat memainkan peran penting sebagai suara global untuk wilayahnya, bekerja sama dengan Ketua ASEAN, yang berganti setiap tahun, dan Sekretaris Jenderal. Indonesia juga dapat menggunakan ASEAN sebagai alat untuk memajukan kepentingannya internasionalnya. Ketika kepentingan-kepentingan tersebut selaras dengan kepentingan kelompok ASEAN yang lebih luas, Indonesia dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk kemitraan yang lebih efektif dengan negara besar lainnya, seperti Cina, India, Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini dapat terlaksana melalui ASEAN atau "lingkaran konsentris" yang lain dari regionalisme Asia Timur seperti ASEAN+3 yang meliputi Jepang, Cina dan Korea Selatan atau East Asia Summit (EAS) yang juga antara lain menyertakan India, AS dan Rusia.⁵

b. ASEAN dan integrasi ekonomi wilayah Asia Timur

Langkah menuju integrasi ekonomi ASEAN ditetapkan dalam serangkaian deklarasi formal

Langkah-langkah yang cukup besar terlihat pada dekade terakhir untuk memperkuat struktur kelembagaan ASEAN, termasuk penandatanganan Piagam ASEAN, Roadmap untuk Masyarakat ASEAN tahun 2009-2015 dan Blueprint Komunitas ASEAN. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar: politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) merupakan komitmen yang ambisius para anggota ASEAN untuk membentuk pasar dan basis produksi tunggal, dengan aliran bebas barang-barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja yang terampil pada tahun 2015. Pada gilirannya, AEC didefinisikan oleh tiga Skema Integrasi ASEAN: perdagangan, investasi dan jasa. Meskipun perkembangan ini telah memperkuat kelembagaan ASEAN, Hill & Memon (2010) mencatat bahwa kelompok ini telah membuat kemajuan yang relatif kurang untuk menjadi kesatuan ekonomi formal dan mencatat bahwa ASEAN tetap menjadi suatu wilayah dengan pengaturan perdagangan yang preferensial, sementara para anggota masih mempertahankan struktur ekonomi dan perdagangan mereka sendiri yang sangat berbeda.

⁴ Association of South-East Asian Nations (ASEAN) terdiri dari : Brunei Darussalam; Kamboja; Indonesia; Laos; Malaysia; Myanmar; Filipina; Singapura; Thailand; dan Vietnam. Rincian lebih lanjut akan sejarah dan program kerja ASEAN dapat ditemukan pada <http://www.aseansec.org/>.

⁵ Kelompok ASEAN+3 didirikan pada tahun 1998. Awalnya EAS terdiri dari 13 ASEAN+3, dengan Australia, India dan Selandia Baru. Di tahun 2011, keanggotaan EAS ditambah menjadi 18 negara, dengan AS dan Rusia bergabung dengan EAS sebagai anggota penuh.

Integrasi ekonomi ASEAN menekankan pada masalah pengembangan perdagangan, pengawasan dan mitigasi krisis, dan pasar keuangan

Melalui kombinasi ASEAN, ASEAN +3 dan EAS, integrasi ekonomi Asia Timur telah berkembang seiring tiga kategori besar: perdagangan; pembiayaan krisis; dan pengembangan pasar keuangan. Integrasi perdagangan dan investasi telah berkembang melalui serangkaian perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang terkait, tetapi kadang terpecah-pecah. Dengan ASEAN FTA (AFTA) sebagai dasarnya, ASEAN ingin melakukan liberalisasi perdagangan dengan serangkaian mitra dagang utama melalui FTA 'ASEAN+1'. Kesepakatan ini memungkinkan para anggota ASEAN untuk melakukan negosiasi sebagai suatu blok, meningkatkan daya tawar mereka. FTA Asia Timur yang lebih luas juga turut diteliti, termasuk FTA untuk pengelompokan ASEAN +3 dan satu untuk kelompok East Asia Summit. Para FTA yang lebih luas ini dapat menghasilkan manfaat strategis yang cukup besar dan dapat digunakan untuk membantu merasionalisasi jaringan FTA yang telah ada.

Prakarsa Chiang Mai muncul untuk menyediakan pembiayaan krisis regional dari pengalaman krisis keuangan Asia

Mungkin isu yang paling kuat menyatukan regionalisme Asia Timur adalah pengawasan dan mitigasi krisis. Setelah pembentukan kelompok ASEAN+3 setelah krisis keuangan Asia, pada bulan Mei 2000 kelompok itu mendirikan Chiang Mai Initiative (CMI). Awalnya adalah serangkaian *swap* valuta bilateral antara perekonomian ASEAN+3 dengan jumlah 24,5 miliar dolar Amerika, dan setelah berjalan 11 tahun, CMI telah berkembang menjadi suatu himpunan krisis pembiayaan multilateral, senilai lebih dari 120 miliar dolar Amerika pada tahun 2010.⁶ CMI belum pernah diuji sehingga efektivitas dan ketegasannya dalam menghadapi krisis ekonomi atau keuangan belum diketahui. Sebagai tanggapan, disepakati untuk mendirikan Kantor Pemantauan Regional Ekonomi Makro ASEAN+3 (AMRO) untuk memberikan analisis dan pengujian stress bagi perekonomian ASEAN +3 dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi deteksi dini risiko, implementasi tindakan perbaikan yang cepat, dan pengambilan keputusan yang efektif untuk pencairan CMI dalam hal terjadinya krisis.

Serangkaian upaya telah diajukan untuk mengembangkan pasar obligasi

Dalam rangka memberikan sumber dana yang lebih terdiversifikasi untuk dunia usaha, pengembangan pasar obligasi regional di dalam Asia Timur telah menerima banyak perhatian. Sebagai contoh, pada sisi permintaan, Asian Bond Fund, yang merupakan prakarsa dari bank-bank sentral Asia Timur dan Pasifik, dirancang untuk menginvestasikan portofolio himpunan cadangan internasional ke dolar Amerika dan obligasi negara dan kuasi-negara dalam mata uang lokal. Prakarsa Asian Bond Market, suatu prakarsa ASEAN+3, menekankan pada masalah sisi penawaran seperti instrumen hutang sekuritas yang baru, mekanisme jaminan kredit, proses penyelesaian, pengembangan lembaga pemeringkat daerah dan lokal dll. ASEAN+3 Bond Market Forum juga mengamati isu-isu kelembagaan, menyediakan platform bersama untuk mendorong standarisasi praktik pasar dan harmonisasi peraturan yang berkaitan dengan transaksi obligasi lintas batas di wilayah tersebut. Meskipun terdapat prakarsa ini, ukuran pasar obligasi regional relatif terhadap PDB tidak banyak berubah dibanding satu dekade lalu. Akan tetapi, menurut makalah terakhir dari IMF, perkembangan kelembagaan pasar dan kuatnya ketertarikan investor asing, akan menempatkan pasar pada posisi untuk berkembang pesat dalam dekade berikutnya.⁷

c. Peningkatan Ekonomi ASEAN

ASEAN mewakili wilayah ekonomi yang besar dan berkembang pesat...

Dinamika ekonomi di dalam kelompok ASEAN berpotensi untuk mendampingi Cina dan India sebagai pendorong ekonomi global pada dekade yang akan datang. Menurut jumlah populasinya, ASEAN berukuran sekitar setengah dari Cina dan India. Ukuran ekonominya dihitung dalam PDB dolar Amerika di tahun 2009, sekitar sepertiga ukuran PDB Cina dan seperlima lebih besar dari India. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk ASEAN dua kali lipat dari penduduk Amerika Serikat, dan sekitar 20 persen lebih besar dari EU-27 – tetapi ukuran ekonominya hanya sekitar sepersepuluh dari keduanya.

⁶ Lihat http://www.adb.org/Documents/ERD/Working_Papers/wp006.pdf dan <http://www.asean.org/24433.htm> untuk rinciannya.

⁷ Feldman, J. et al. (2011) "ASEAN5 Bond Market Development: Where Does it Stand? Where is it Going?" *IMF Working Paper*.

...yang ukurannya diperkirakan akan meningkat relatif terhadap ekonomi utama lainnya pada 15 tahun yang akan datang

Melihat ke depan, ukuran relatif pasar ASEAN akan siap berkembang. Menurut perhitungan PBB, penduduk ASEAN diperkirakan akan meningkat di atas 16 persen antara tahun 2009 dan 2025. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk negara-negara maju dan penduduk Cina diperkirakan akan tumbuh kurang dari 5 persen pada periode tersebut. Mengenai ukuran ekonomi, gabungan ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand akan meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil pada periode 2009 hingga 2025 (Bank Dunia, Global Development Horizons, 2011). Peningkatan ini merupakan tiga kali lipat lebih tinggi dari Cina dan 2,5 kali dari India, dan jauh lebih tinggi dari peningkatan sepertiga dari Amerika Serikat dan setengah dari zona Euro. Dinamika pasar domestik ASEAN dapat menjadi kesempatan yang besar bagi kelompok negara itu untuk mendapatkan pengaruh dan pengakuan yang lebih besar dari panggung internasional.

Terdapat peningkatan bertahap dalam aliran perdagangan dalam wilayah ASEAN dan peningkatan PMA yang cukup besar

Dekade yang lalu terjadi penguatan bertahap pada integrasi dalam wilayah ASEAN pada serangkaian pengukuran. Total perdagangan ASEAN mencapai 1,5 triliun dolar Amerika di tahun 2009, dengan perdagangan di dalam ASEAN mencapai 25 persen. Angka ini lebih tinggi dari 22 persen di tahun 2000, tetapi sebagai pembandingan, angka itu relatif rendah dibanding laju di dalam pasar gabungan ekonomi Uni Eropa, yang mana sekitar 70 persen perdagangan adalah di dalam wilayah itu sendiri. Sementara itu, aliran masuk PMA dalam wilayah telah meningkat pesat sejak tahun 2000, sebesar 3 persen dari jumlah aliran masuk PMA ke 20 persen pada tahun 2008.

d. Prioritas Indonesia bagi ASEAN

Indonesia ingin memulai pembahasan tentang bentuk ASEAN pasca tahun 2015 dan juga telah mendahulukan kemajuan dalam konektivitas, ketahanan pangan dan jaminan energi

Sebuah platform kunci untuk Kepemimpinan Indonesia tahun 2011 adalah keinginan untuk memulai diskusi tentang visi ASEAN pasca 2015. Setelah pertemuan bulan Mei di Jakarta, para pemimpin ASEAN mengindikasikan bahwa pada tahun 2022, ASEAN akan berusaha untuk mencapai "posisi ASEAN lebih terkoordinasi, terpadu dan koheren pada isu-isu global". Kerangka kerja tersebut dapat berharga dengan ASEAN berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya di isu-isu regional maupun global. Indonesia juga menekankan pada diskusi ASEAN tentang kemajuan pada konektivitas, ketahanan pangan dan jaminan energi. Hal-hal yang mendapat prioritas tersebut konsisten dengan prioritas kebijakan domestik Indonesia, seperti yang terlihat dalam Masterplan Pemerintah yang baru diluncurkan (lihat Bagian C). Bagi Indonesia, meningkatkan konektivitas tetap menjadi isu penting untuk meningkatkan daya saing ASEAN secara keseluruhan karena kelompok itu adalah suatu wilayah kepulauan yang beragam. Sementara itu peningkatan pesat dalam harga bahan pangan global dan energi sejak pertengahan tahun 2010 sekali lagi telah memberikan tekanan pada rumah tangga miskin di Asia Timur, dan merupakan risiko yang signifikan terhadap ruang fiskal bagi banyak pemerintahan ASEAN. Jika dilaksanakan, kerjasama dalam isu-isu ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi ASEAN. Namun, implementasi dari perjanjian tersebut akan membutuhkan waktu, usaha, dan kemauan politik yang cukup besar dari masing-masing anggota ASEAN.

Para pemimpin setuju untuk mempercepat penerapan Masterplan untuk Konektivitas ASEAN...

Dalam konektivitas, para pemimpin ASEAN di Jakarta menyerukan kepada Komite Koordinasi Konektivitas ASEAN dan Koordinator Nasional Konektivitas ASEAN yang baru dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan Masterplan Konektivitas ASEAN. Ditandatangani pada bulan Oktober 2010, Masterplan tersebut menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memajukan hubungan regional melalui peningkatan perdagangan, investasi, pariwisata dan pertukaran antar orang, dan mencakup baik faktor fisik maupun kelembagaan konektivitas.

...untuk mendirikan suatu Kerangka Jaminan Bahan Pangan Terpadu...

Masalah ketahanan pangan di ASEAN sudah berjalan sejak penandatanganan Cadangan Jaminan Pangan ASEAN pada tahun 1979. Kemajuan dalam masalah ini secara historis berjalan lambat, tapi perjanjian baru dapat menyegarkan kembali kerjasama regional ini. Pada pertemuan di Jakarta, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Kerangka Jaminan Bahan Pangan Terpadu, yang terdiri dari Rencana Strategis ASEAN untuk Aksi Ketahanan Pangan (2009-2013) dan ASEAN+3 Cadangan Beras Darurat (APTERR), yang dijadwalkan untuk ditandatangani pada akhir tahun 2011. Rencana Strategis Aksi Ketahanan Pangan adalah suatu kerangka kerja multi-aspek yang meliputi isu-isu seperti memperkuat program jaminan bahan pangan nasional dan mendorong perdagangan yang tidak membeda-bedakan. Termasuk didalamnya upaya sisi penawaran seperti mendorong riset dan pengembangan yang lebih besar, investasi dalam industri pangan dan pertanian, mendorong transfer teknologi dan investasi dalam infrastruktur pertanian. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong pemantauan ketahanan pangan dan untuk

membantu dalam penargetan bantuan bila guncangan bahan pangan terjadi. Sementara itu, APTERR diharapkan untuk menyediakan cadangan beras - terutama dari Jepang, Cina dan Korea - untuk membantu menjamin stabilitas pasokan bahan pangan untuk ASEAN, dalam hal terjadi kelangkaan atau krisis pangan.

...dan telah memberikan penekanan yang baru untuk solusi jaminan energi wilayah.

Untuk jaminan energi, para pemimpin ASEAN menyepakati bahwa upaya-upaya lebih lanjut diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Rencana Aksi ASEAN untuk Kerjasama Energi tahun 2010-2015 (APEAC). Meskipun telah terdapat berbagai pencapaian positif di bawah APEAC sebelumnya - seperti pendirian Jaringan Listrik ASEAN dan Pipa Gas Trans-ASEAN – perlu ditekankan bahwa terdapat kebutuhan untuk mempercepat kerjasama untuk memastikan jaminan dan keberlanjutan energi yang lebih besar, misalnya melalui peningkatan transfer teknologi. Juga perlu ditekankan bahwa kerjasama harus ditingkatkan untuk pengembangan energi alternatif dan terbarukan, termasuk tenaga air, panas bumi dan bahan bakar bio.

Apa yang perlu dilakukan ASEAN untuk membuat sesuatu yang berarti di bidang-bidang tersebut?

Membuat kemajuan pada masalah-masalah tersebut, dan mengedepankan pandangan ASEAN dalam forum-forum global, akan membutuhkan komitmen dan koordinasi yang berkelanjutan dari para anggota ASEAN. Secara khusus, ASEAN harus bekerja keras untuk mempertahankan kemajuan melalui rotasi tahunan Ketua, yang akan diteruskan ke Kamboja pada tahun 2012. Pada integrasi ekonomi, salah satu alat yang jelas bagi para anggota untuk menunjukkan komitmen mereka adalah dengan mengatasi masalah integrasi yang ada sesuai dengan Scorecard Ekonomi ASEAN, yang mengukur kemajuan setiap anggota dalam mencapai prioritas integrasi yang telah disepakati bersama. Akhirnya, untuk memastikan konsistensi antara mekanisme nasional, wilayah dan dunia, ASEAN dapat terus mengembangkan suara yang terkoordinasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan anggota ASEAN mendapatkan perhatian selama perubahan yang sedang berlangsung di dalam arsitektur ekonomi dan keuangan global.

2. Kebangkitan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia?

Indonesia mencatat arus masuk PMA tertinggi pada beberapa triwulan terakhir...

Aliran masuk dana ke Indonesia belakangan ini didorong oleh aliran portofolio dan Penanaman Modal Asing (PMA). Aliran PMA bersih ke Indonesia mencapai 4,5 miliar dolar Amerika pada triwulan pertama tahun 2011 (Gambar 19), triwulan yang mencatat aliran tertinggi sejak tahun 2004. Sebelumnya, jumlah aliran modal masuk sebesar 13,3 miliar dolar Amerika terjadi di tahun 2010, yang juga merupakan salah satu nilai tertinggi. Data-data terakhir tersebut, bersamaan dengan makin meratanya penyebaran PMA di berbagai sektor, meningkatkan harapan akan tren kebangkitan kembali aliran PMA - yang selama ini cukup lemah – yang dapat turut serta menjadi pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi selanjutnya.

...yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan Indonesia melalui investasi pendanaan dan melalui saluran-saluran lain seperti transfer teknologi dan hubungannya dengan jaringan pasokan global

PMA memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang penting dalam perekonomian. Sebagai contoh, PMA dapat membantu memenuhi kebutuhan Indonesia akan investasi yang lebih besar untuk tercapainya sasaran pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Masterplan tahun 2011-2025 yang baru saja diluncurkan oleh Pemerintah (lihat bagian berikut) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) paham benar akan kebutuhan tersebut; di mana RPJM menargetkan pertumbuhan investasi riil tahunan yang lebih tinggi ke tingkat 11,7-12,1 persen pada tahun 2014. Relatif rendahnya tingkat simpanan dan tipisnya pasar keuangan Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan menggunakan sumber-sumber dalam negeri saja tampak sulit untuk pemenuhan kebutuhan investasi yang sangat tinggi (lihat, sebagai contoh, tulisan Silmy Karim dari Universitas Paramadina, pada harian Jakarta Post, dengan judul "Assessing Benefits of PMA to the Nation", bulan November 2010).

PMA juga dapat mempunyai manfaat yang lain, yang dapat melebihi manfaat langsung dari tambahan pendanaan untuk investasi. Sesuai dengan sifatnya, PMA juga bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi karena PMA memperkenalkan negara penerimanya dengan proses bisnis, sistem, praktik manajemen dan teknologi yang baru, sekaligus juga menjadi media penghubung ke pasar-pasar ekspor dan rantai pasokan internasional. PMA juga dapat membawa pekerjaan dalam bidang produksi dan manajemen. Sementara manfaat non-keuangan PMA tidak secara langsung bisa dinikmati, terdapat banyak contoh tentang bagaimana investasi oleh perusahaan asing telah memelopori pertumbuhan industri dalam negeri, seperti tekstil dan pakaian di Bangladesh, perangkat lunak di Costa Rica dan sektor elektronik di daerah pantai di Cina.

Dalam bagian ini, kami mencoba untuk memberikan ikhtisar akan tren-tren terakhir PMA ke Indonesia dan menguraikan beberapa pendorong utamanya. Bagian ini juga menyoroti cakupan dari upaya kebijakan dalam negeri, sebagai contoh, untuk meningkatkan konektivitas, iklim investasi dan keterampilan, yang tidak hanya dapat secara langsung meningkatkan prospek pertumbuhan tetapi juga dapat menarik PMA yang lain, sehingga dapat menciptakan suatu lingkaran peningkatan PMA dan pendapatan dalam negeri yang bijak.

a. Pola PMA ke Indonesia telah mengalami perubahan pada tahun-tahun terakhir

Tren peningkatan PMA dilihat dari dua sumber data yang berbeda ...

Tren peningkatan PMA ke Indonesia dapat dilihat melalui dua sumber data utama, yaitu dari data Neraca Pembayaran Bank Indonesia (BI) dan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Kotak 3). Kecuali dinyatakan lain, pembahasan di bawah adalah mengenai tren-tren pada aliran bersih PMA ke Indonesia, seperti nilai bersih aliran PMA ke Indonesia dari investor asing setelah repatriasi modal tersebut oleh para investor, seperti diukur oleh data Neraca Pembayaran BI.

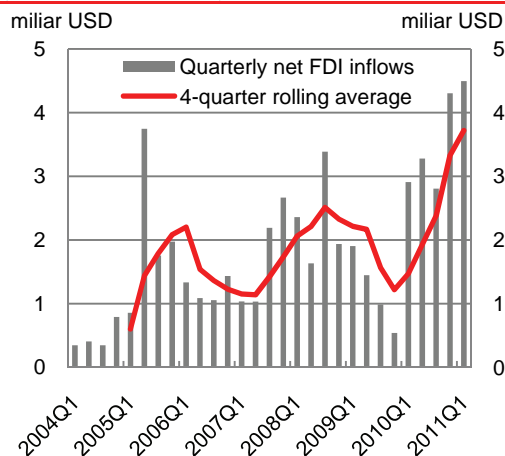
...juga menyoroti pergeseran komposisi PMA melewati beberapa sudut pandang

Dengan tren meningkatnya PMA, komposisinya telah bergeser melewati beberapa dimensi seperti jenis aliran modal yang masuk, sumber dan sektor dan daerah tujuannya. Sebagai contoh, walaupun modal saham langsung merupakan tiga per empat dari seluruh PMA pada empat tahun terakhir, pada tahun 2010 terdapat peningkatan kontribusi dari pendapatan yang ditanamkan kembali dan aliran masuk bersih hutang yang tampaknya mencerminkan kuatnya pertumbuhan dalam negeri Indonesia dan pemulihan kondisi ekonomi dan keuangan dunia.

Aliran PMA kini didominasi oleh aliran dari Jepang dan Singapura...

Data BI menunjukkan bahwa aliran masuk PMA per negara asal kini didominasi oleh aliran masuk dari Jepang dan Singapura, sementara aliran masuk dari Amerika Serikat baru-baru ini menunjukkan tren yang menurun (Tabel 7). Akan tetapi, peningkatan pada sumber PMA regional, terutama dari Singapura, mungkin mencerminkan sebagian perubahan dalam praktik usaha dengan perusahaan multinasional memilih untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui perusahaan afiliasi berbasis regional, dan bukan investasi langsung dari perusahaan induk, yang disebabkan oleh pengaturan pajak dan undang-undang, atau karena perubahan dalam strategi perusahaan.

Gambar 19: Tren meningkatnya aliran PMA ke Indonesia (miliar dolar Amerika)



Sumber: BI dan staf Bank Dunia

Tabel 7: Aliran PMA regional menjadi makin penting (bagian total aliran masuk PMA per negara asal, persen)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jepang	-1,6	18,5	21,5	16,3	12,3	18,4	28,0
AS	-27,6	41,3	-11,2	15,8	11,2	3,3	4,3
Erope	82,5	19,0	41,0	37,8	21,1	13,8	2,1
Cina	15,5	3,6	2,5	1,7	5,7	7,3	2,7
Korea	12,1	2,9	6,5	3,6	2,0	1,6	2,6
ASEAN	10,8	10,6	27,5	16,0	36,5	28,3	44,4
Malaysia	6,4	1,7	5,6	3,3	10,9	6,4	2,6
Singapura	4,4	8,9	21,9	12,1	24,7	20,8	41,2
Lainnya	8,3	4,2	12,1	8,8	11,3	27,3	16,0
Total	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BI dan staf Bank Dunia

Manufaktur masih menjadi sektor utama bagi aliran masuk PMA, sementara sektor jasa makin meningkat

Melihat pada komposisi sektoral dengan menggunakan data BI, PMA mengalir masuk menuju empat sektor utama (Tabel 8). Manufaktur tetap menjadi tujuan utama aliran masuk PMA, relatif stabil dengan ukuran sekitar sepertiga dari keseluruhan. Seperti juga keseluruhan aliran masuk PMA, sumber PMA kepada sektor manufaktur juga telah bergeser pada beberapa tahun terakhir. Aliran masuk kini didorong oleh investasi dari Jepang dan ASEAN, sementara sebelumnya aliran PMA yang kuat kepada sektor manufaktur lebih banyak didorong oleh investasi dari Uni Eropa (EU).

Aliran masuk ke sektor penggalian dan pertambangan meningkat cukup besar sebelum penurunan global tahun 2008/09, dengan mayoritas aliran berasal dari Amerika Serikat (AS). Setelah mengalami penurunan paling banyak dibanding sektor-sektor lain selama krisis, aliran masuk ke sektor itu telah kembali ke tingkat sebelum krisis tetapi kini sumber alirannya relatif setara antara AS, EU, Korea dan Cina. Porsi sektor perdagangan kulakan dan eceran dan sektor jasa lainnya, seperti transportasi dan telekomunikasi, juga mengalami peningkatan dibanding total PMA. Sebaliknya, PMA ke sektor keuangan telah mengalami penurunan besar selama krisis global dan masih belum sepenuhnya pulih.

Kotak 3: Sumber-sumber data yang berbeda mengenai aliran masuk PMA ke Indonesia

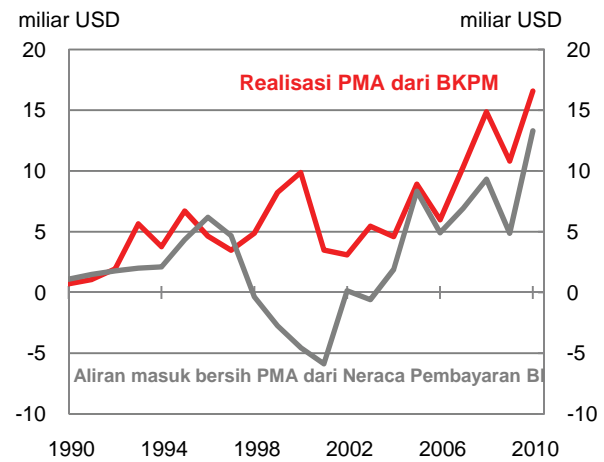
Terdapat dua sumber data yang umumnya digunakan untuk menganalisis tren PMA ke Indonesia. Yang pertama adalah data Neraca Pembayaran BI. Yang kedua adalah data realisasi PMA dari BKPM. Sementara kedua sumber data menampilkan tren yang umumnya serupa, perbedaan metodologi dari keduanya menunjukkan beberapa perbedaan yang signifikan (Gambar 20).

Penyebab utama dari perbedaan itu terletak pada pengelompokan PMA. Sesuai dengan panduan Neraca Pembayaran IMF, data dari BI memandang bahwa "investasi langsung adalah kelompok investasi lintas perbatasan yang berkaitan dengan penduduk di suatu ekonomi yang mengendalikan atau memiliki tingkat pengaruh yang signifikan pada manajemen suatu perusahaan yang berada pada ekonomi yang lain". Dengan demikian, suatu investasi pada suatu perusahaan Indonesia oleh seorang investor asing dicatat sebagai PMA jika investasi itu meningkatkan kendali atau pengaruh, baik melalui hutang, saham (yang melebihi 10 persen dari total saham), pendapatan yang ditanamkan kembali atau investasi balik. Sebaliknya, data BKPM menghitung suatu proyek investasi sebagai PMA bila proyek itu memiliki bagian pendanaan yang berasal dari penduduk asing, berapapun besar investasinya. Selain itu, untuk proyek *joint venture* apapun yang menyertakan investasi dalam dan luar negeri, keseluruhan nilai proyek akan dihitung sebagai PMA. Hal itu membuat perkiraan BKPM akan nilai PMA di Indonesia menjadi lebih condong ke atas. Selain itu, data BKPM tidak mencatat divestasi yang dibuat oleh investor asing (yang berkontribusi terhadap aliran negatif PMA pada rangkaian data Neraca Pembayaran pasca krisis tahun 1997/1998).

Selain itu, terdapat perbedaan dalam cakupan sektor dari kedua sumber tersebut. Data BI menyertakan aliran PMA ke seluruh sektor sementara data BKPM tidak menyertakan sektor-sektor tertentu seperti migas dan institusi perbankan dan keuangan. Walaupun terdapat perbedaan, kedua rangkaian data itu berguna dengan saling melengkapi. Sebagai contoh, keduanya memberikan rincian PMA per industri dan per negara sumber, tetapi hanya data BKPM yang memiliki rincian lokasi / provinsi PMA di Indonesia.

Sumber: OECD Investment Policy Review, Indonesia, 2010

Gambar 20: Rangkaian data BKPM dan Neraca Pembayaran mengikuti tren yang sama tetapi dengan perbedaan yang signifikan (miliar dolar Amerika)



Sumber: Bank Indonesia dan BKPM

Tabel 8: Manufaktur tetap menjadi bagian terbesar dari aliran masuk PMA ke Indonesia (bagian dari total aliran masuk bersih PMA per sektor, persen)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	6,7	0,0	4,6	4,1	2,1	-1,1	2,1	2,7
Perikanan	0,0	0,1	0,1	0,3	-0,3	0,2	0,4	0,1
Penggalian dan Pertambangan	5,9	14,7	6,5	27,5	38,7	26,7	13,5	19,1
Manufaktur	39,3	63,1	34,4	34,8	24,9	32,3	36,2	37,9
Listrik, Gas dan Air	0,0	1,9	0,0	-0,9	-0,6	1,1	1,6	0,4
Konstruksi	-0,8	1,6	1,7	2,8	0,3	0,1	-0,4	0,8
Eceran & Kulakan	-10,1	0,7	7,6	3,1	12,4	1,5	19,4	4,9
Hotel & Rumah Makan	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	10,7	4,6	12,1	8,6	1,4	36,9	18,7	13,3
Intermediasi Keuangan	20,5	9,4	20,9	19,3	20,7	3,1	3,2	13,9
Real Estate and Business Activity	-0,8	0,2	-0,3	-0,1	-2,2	-0,5	0,2	-0,5
Others	28,6	3,6	12,2	0,5	2,3	-0,3	5,1	7,4
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bank Indonesia dan staf Bank Dunia

Aliran masuk PMA masih terpusat di Jawa tetapi belakangan mulai meningkat ke pulau-pulau lain, terutama Kalimantan

Sementara itu, BKPM menunjukkan bahwa aliran masuk PMA masih sangat terpusat di pulau Jawa, yang menerima 70 hingga 90 persen aliran PMA setiap tahun (Tabel 9). Di pulau Jawa pun, PMA lebih terpusat di ibukotanya, Jakarta, dan pada bagian Barat dari pulau. Investasi tersebut umumnya berupa investasi ke bidang manufaktur, eceran & kulakan, dan sektor jasa-jasa lainnya. Terdapat peningkatan aliran masuknya PMA di daerah lain, tetapi Kalimantan menunjukkan peningkatan yang paling nyata. Kandungan sumber daya alam yang kaya di pulau itu ternyata banyak menarik minat aliran masuk PMA yang berkaitan dengan proyek pertambangan dan migas, terutama di bagian Timur pulau itu. Sementara itu pulau Sumatera telah mengalami penurunan aliran masuk PMA yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir, terutama didorong oleh turunnya PMA yang masuk ke Riau.

Tabel 9: Aliran masuk PMA masih terpusat di pulau Jawa, terutama di ibukota
(bagian dari keseluruhan PMA untuk daerah penerima, persen)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Jawa	70,6	81,3	73,8	82,3	91,2	86,7	70,9	79,5
<i>DKI Jakarta</i>	32,1	36,7	24,6	45,2	66,8	51,0	39,9	42,3
<i>Jawa Barat</i>	24,7	28,8	27,1	12,8	17,2	17,9	10,3	19,8
<i>Jawa Timur</i>	4,2	7,9	6,4	16,4	3,1	3,9	10,5	7,5
<i>Banten</i>	7,3	7,5	8,6	6,9	3,2	13,1	9,8	8,0
Kalimantan	8,0	2,0	9,0	3,0	0,8	2,6	12,5	5,4
<i>Kalimantan Timur</i>	8,0	0,4	6,8	1,6	0,1	0,7	6,9	3,5
Sumatera	18,5	13,7	14,8	13,4	6,8	7,2	4,8	11,3
<i>Riau</i>	11,2	8,9	9,8	7,0	3,1	2,3	0,9	6,2
Sulawesi	0,6	1,6	0,2	0,8	0,4	1,3	5,1	1,4
Nusa Tenggara	2,3	1,2	1,8	0,5	0,6	2,2	2,2	1,6
<i>Bali</i>	2,3	1,1	1,7	0,5	0,5	2,1	1,7	1,4
Maluku	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	2,3	0,4
Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2,4	0,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BKPM dan staf Bank Dunia

b. Walaupun nilai aliran masuk meningkat, jumlah PMA relatif terhadap PDB masih tetap lemah

Aliran masuk PMA ke Asia Timur menerima dampak buruk selama krisis keuangan Asia

Dari tahun 1993 hingga 1997, nilai rata-rata aliran masuk PMA ke Indonesia hampir mencapai dua persen dari PDB (Gambar 21). Perbandingan terhadap PDB ini lebih tinggi, misalnya, dibanding perbandingan di India dan Thailand. Akan tetapi dampak krisis keuangan Asia cukup besar, yang memicu investor asing untuk menarik kembali modal mereka dan akibatnya terjadi penarikan bersih PMA dari Indonesia selama periode tahun 1998 hingga 2001 (yaitu aliran masuk PMA dengan nilai negatif).

Walaupun telah pulih, rasio aliran masuk PMA ke Indonesia terhadap PDB masih relatif lemah dibanding negara-negara pembanding kawasan...

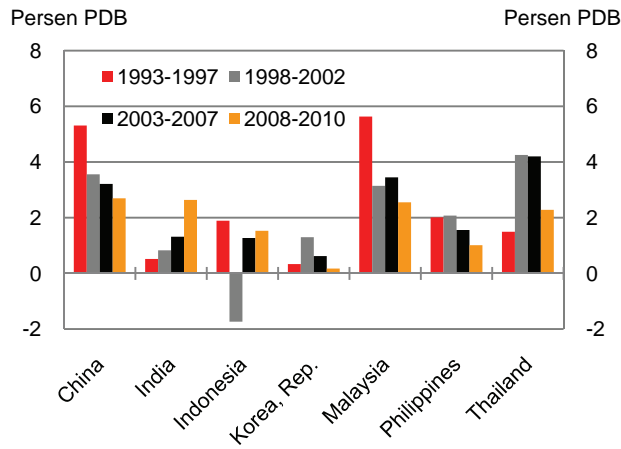
Sementara nilai nominal laju investasi dalam negeri di Indonesia telah kembali ke tingkat pra-krisis (seperti dirinci pada Kotak 2 pada Triwulanan edisi bulan Maret 2011), PMA sebagai bagian dari PDB belum mencapai tingkat pemulihan dengan laju yang sama. Di luar kenaikan tajam satu kali di tahun 2005 (yang disebabkan oleh akuisisi perusahaan rokok nasional, Sampoerna, oleh Phillip Morris dari Amerika), PMA tetap bertahan pada angka kurang dari satu persen dari PDB selama periode tahun 2002 hingga 2009 sebelum meningkat sedikit di bawah dua persen di tahun 2010. PMA bagi negara-negara lain di wilayah yang sama, seperti Malaysia dan Filipina, juga tetap bertahan pada tingkat di bawah tingkat sebelum krisis. Akan tetapi, tingkat PMA terhadap PDB Indonesia tetap relatif lemah dibandingkan negara-negara pembanding dalam wilayah yang sama, terutama dibanding Cina, dan juga India, yang telah mencatat peningkatan tajam dalam aliran masuk PMA selama dekade yang lalu.

...dan relatif terhadap ekonomi-ekonomi lainnya yang juga kaya akan sumber daya

Pelajaran juga dapat dipetik dengan membandingkan tingkat PMA Indonesia dengan yang dimiliki oleh ekonomi-ekonomi lain yang juga kaya akan sumber daya. Sekali lagi, aliran masuk PMA ke Indonesia masih relatif rendah (Gambar 22). Sebagai contoh, perbandingan PMA terhadap PDB Indonesia di tahun 2010 adalah 1,9 persen dari PDB, dibanding 2,3 persen untuk Brazil dan lebih dari 7 persen bagi Chili. Sekali lagi, hal ini bertolak belakang dengan kinerja laju nominal investasi dengan Indonesia jauh meninggalkan banyak negara-negara pembandingnya (walaupun seperti dibahas pada Triwulanan edisi bulan Maret 2011, sebagian dari penyebabnya adalah peningkatan harga relatif dari barang-barang investasi).

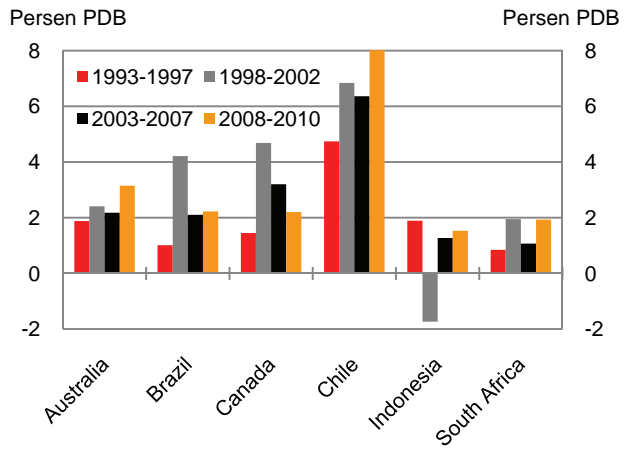
Perbandingan ekonomi regional dan berdasar atas sumberdaya sesuai waktu ini tentu saja tidak memberikan penilaian statistik yang rinci tentang tingkat aliran masuk PMA ke Indonesia, dengan adanya berbagai karakteristik ekonomi seperti populasi penduduk, biaya tenaga kerja, geografis dan sumberdaya alam. Mereka lebih ditujukan untuk memberi gambaran sesuai konteksnya sebagai cara untuk melihat peningkatan aliran PMA ke Indonesia yang terjadi belakangan ini.

Gambar 21: Aliran PMA Indonesia terhadap PDB tetap relatif rendah dibanding negara pembanding di wilayah yang sama... (aliran bersih PMA terhadap PDB, persen)



Catatan: Data PMA Indonesia dari BI
Sumber: BI, CEIC, World Development Indicators, dan perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 22: ...dan dibandingkan dengan aliran ke ekonomi kaya sumberdaya berpenghasilan menengah dan tinggi (aliran bersih PMA terhadap PDB, persen)



Catatan: Data PMA Indonesia dari BI
Sumber: BI, CEIC, World Development Indicators, dan perhitungan staf Bank Dunia

c. Outlook yang positif untuk PMA ke Indonesia...

Perkiraan untuk masa depan aliran PMA ke Indonesia adalah positif...

Pengumuman niat untuk melakukan investasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional mendukung berlanjutnya outlook yang positif bagi aliran masuk PMA ke Indonesia. BKPM, misalnya, menargetkan peningkatan PMA sebesar 22 persen untuk tahun 2011. Pemerintah juga bertindak aktif dalam mempromosikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan telah menandatangani persetujuan dengan Jepang (24 miliar dolar Amerika), India (15 miliar dolar Amerika) dan Singapura (10 miliar dolar Amerika). Kerjasama dengan Jepang adalah melalui rencana infrastruktur, yang ditandatangani pada bulan Desember 2010 adalah untuk mendukung pembangunan daerah prioritas metropolitan Jakarta.

...mencerminkan suatu rangkaian pendorong dasar – sumberdaya alam, pasar dalam negeri yang berkembang dan biaya tenaga kerja yang relatif rendah

Seperti terlihat dari komposisi sektoral aliran masuk tersebut, pendorong PMA ke Indonesia berjumlah cukup banyak. Salah satu daya tarik yang tidak dapat dipungkiri adalah kekayaan sumberdaya alam Indonesia. Berikutnya adalah ukuran konsumen Indonesia yang besarnya masih terus bertambah. Hal ini menarik PMA yang mencari pasar dengan suatu perusahaan membangun suatu pabrik dengan harapan untuk meningkatkan keberadaannya di pasar lokal yang besar. Daya tarik ketiga adalah bagi PMA yang mencari efisiensi, karena upah buruh Indonesia yang relatif rendah dapat digunakan untuk proses produksi bagi pasar ekspor, terutama untuk barang-barang manufaktur. Selain itu, suatu perusahaan dapat memiliki maksud mencari pasar dan sekaligus efisiensi untuk melakukan PMA, dan kombinasinya dapat berbeda sesuai

dengan berjalannya waktu. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan seperti Hyundai dan Hankook Tire dari Korea telah menyatakan maksud investasi mereka di Indonesia adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pangsa pasar dalam negeri dan juga memanfaatkan biaya produksi yang lebih rendah untuk pasar ekspor.

Permintaan global yang kuat untuk komoditas tampaknya akan mendorong PMA...

Perkiraan akan pertumbuhan yang kuat dan terus berlanjut di Cina dan India, bersama-sama dengan ekonomi berkembang lainnya, menunjukkan bahwa permintaan komoditas dan harga akan tetap tinggi pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, sumberdaya alam Indonesia, dan letaknya yang strategis untuk melayani pasar India dan Cina, tampaknya akan makin menarik aliran PMA ke sektor-sektornya, seperti terlihat pada investasi oleh Newmont Mining dan BHP di sektor penggalian dan pertambangan di Kalimantan. BKPM memperkirakan bahwa investasi asing pada sektor migas Indonesia akan mencapai 3,2 miliar dolar Amerika di tahun 2011 sementara Asosiasi Pertambangan Indonesia memperkirakan bahwa PMA yang mengalir ke sektor tersebut akan mencapai 8 miliar dolar Amerika sepanjang tahun. BKPM juga telah mengumumkan mereka telah menerima permohonan investasi untuk berbagai sektor mineral, termasuk proyek pabrik aluminium dan nikel di Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

...dan juga peningkatan pendapatan dalam negeri dan kelas menengah Indonesia

Meningkatnya jumlah kelas menengah Indonesia, bersama-sama dengan perkiraan peningkatan pendapatan dan belanja konsumsi, menjadi daya tarik bagi PMA yang terus berburu mencari peluang dan pasar baru. Seperti dibahas pada Triwulanan edisi Maret 2011, hingga dekade berikutnya jumlah kelompok kelas menengah akan terus meningkat, dan yang lebih penting bagi produsen dari barang-barang konsumen yang tahan lama, meningkatnya orang-orang di dalam kelompok kelas menengah itu sendiri. Peningkatan kelas menengah ini – bersama-sama dengan outlook positif untuk pertumbuhan ekonomi – terus memberikan insentif kepada perusahaan asing untuk mencari kehadiran pasar di Indonesia, termasuk melalui PMA pada produksi lokal, seperti yang dilakukan oleh L'Oreal dan Honda yang membangun basis produksi di Indonesia.

Indonesia juga berpotensi untuk memetik manfaat dari PMA relokasi manufaktur-untuk-ekspor dari Cina dengan meningkatnya upah buruh di sana

Dengan meningkatnya upah buruh di wilayah pantai di Cina, Indonesia memiliki potensi untuk menarik jumlah manufaktur untuk ekspor yang makin meningkat. Persaingan yang ketat dari negara-negara lain pasti akan dijumpai, dan juga dengan daerah-daerah lain di Cina itu sendiri. Akan tetapi, relatif rendahnya biaya buruh dan produksi di Indonesia tampaknya masih menarik. India dan Filipina juga menunjukkan terdapat potensi untuk menggunakan upah buruh yang rendah untuk membangun PMA bagi ekspor jasa, seperti pada proses usaha, jika dikombinasikan dengan infrastruktur yang kuat, keterampilan dan pendidikan.

d. ...yang sebetulnya dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan peningkatan iklim investasi, infrastruktur dan keterampilan

Daya tarik Indonesia bagi aliran masuk PMA dapat lebih ditingkatkan dengan perbaikan kelemahan infrastruktur dan keterampilan dan peningkatan pada lingkungan usaha...

Sementara pendorong struktural di atas memberikan daya tarik yang kuat bagi mengalirnya PMA ke Indonesia, perusahaan-perusahaan asing mungkin masih terhalang oleh peraturan yang masih membingungkan, kelemahan infrastruktur atau masih timpangnya antara permintaan keterampilan yang diinginkan investor dengan apa yang tersedia di pasar tenaga kerja dalam negeri Indonesia. Sebagai contoh, dalam survei tahun 2010 oleh Japanese External Trade Organisation (JETRO), perusahaan-perusahaan terafiliasi Jepang di Indonesia menyebutkan sejumlah faktor, seperti prosedur pengeluaran barang dari bea cukai yang rumit dan kesulitan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja, yang menghambat kegiatan usaha mereka (Kotak 4). Dengan kata lain, peningkatan pada iklim peraturan investasi, menangani hambatan infrastruktur di bidang transportasi, tenaga listrik, jaringan komunikasi dan informasi dalam negeri dan memperkuat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja akan menambah daya tarik ke perusahaan asing untuk membangun basis produksi, atau untuk memindahkan produksi ekspor, ke Indonesia.

... juga sangatlah penting diusahakan pemanfaatan optimal dari PMA

Penerapan reformasi kebijakan dan investasi tersebut dapat meningkatkan daya tarik Indonesia bagi PMA pencari efisiensi. Seperti ditekankan pada Masterplan yang baru diluncurkan oleh Pemerintah, investasi dan reformasi tersebut sangatlah penting untuk meningkatkan laju pertumbuhan Indonesia untuk beberapa dekade berikutnya. Peningkatan pendapatan dalam negeri juga tampaknya akan mendorong lebih banyak aliran masuk yang tertarik oleh bertumbuhnya jumlah konsumen di Indonesia. Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan keterampilan dan konektivitas dapat meningkatkan

potensi untuk limpahan teknologi yang positif dari kegiatan perusahaan multinasional ke perusahaan-perusahaan lokal. Berbagai dimensi yang berbeda itu mengangkat kemungkinan bahwa reformasi kebijakan dan investasi yang mendukung pertumbuhan dapat menciptakan suatu 'lingkaran yang bijak' dari prospek peningkatan pertumbuhan dan aliran masuk PMA, yang jika diwujudkan, dapat memiliki dampak yang besar kepada pendapatan dan penyerapan tenaga kerja penduduk, yang tentunya makin membantu upaya pengentasan kemiskinan. Tidak ada jaminan akan hasilnya. Pengalaman menunjukkan bahwa pemanfaatan PMA bagi pertumbuhan dan investasi tergantung pada faktor spesifik suatu negara, termasuk kapasitas institusi (seperti kepastian hukum) atau tingkat sumber daya manusianya. Selanjutnya, untuk mendapatkan peluang pemanfaatan PMA diperlukan penetapan prioritas, koordinasi dan implementasi berkelanjutan dari penunjang reformasi dan investasi yang dibutuhkan. Misalnya, fokus terhadap peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mengimbangi kebutuhan perusahaan-perusahaan yang mengutamakan kreasi kerja dari aliran PMA.

Kotak 4: Outlook yang optimistik, tetapi tantangan tetap ada: pandangan perusahaan afiliasi Jepang di Indonesia

Survei perilaku perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dapat memberikan masukan yang berharga tentang faktor penting pendorong masuknya PMA dan faktor penghambat yang dapat mengganggu aliran masuk tambahan. Salah satu dari survei tersebut adalah yang dilaksanakan oleh Japanese External Trade Organisation (JETRO). Survei yang baru dilaksanakan ini, yang dilakukan pada bulan Agustus dan September 2010, mencakup hampir 3.500 perusahaan afiliasi Jepang di 18 negara Asia dan Oceania, termasuk sekitar 130 responden dari Indonesia, yang umumnya berada pada sektor manufaktur.

Pada pertanyaan tentang tujuan para perusahaan afiliasi, apakah pasar ekspor atau domestik, survei itu menunjukkan bahwa untuk keseluruhan wilayah, 45 persen dari perusahaan memberikan prioritas yang lebih bagi pengembangan posisi mereka di pasar lokal dibanding ekspor. Sekitar 30 persen memberi bobot yang sama antara kedua pasar itu, sementara 11 persen memberi prioritas yang lebih kepada ekspor dan 7 persen hanya menekankan kepada ekspor belaka. Seperti diperkirakan, pengembangan pasar lokal keluar sebagai prioritas yang kuat di pasar-pasar dengan jumlah populasi yang besar atau rata-rata pendapatan yang tinggi. Sebagai contoh, di Indonesia sebanyak 51 persen perusahaan menekankan pada pasar lokal, sedikit di bawah China dan Australia, tetapi cukup jauh dari India, dengan 74 persen.

Kepercayaan usaha dan perkiraan pertumbuhan tampaknya meningkat lintas wilayah. Mayoritas responden survei diperkirakan akan mencetak laba di tahun 2010, dengan proyeksi penjualan yang semakin baik di tahun 2011. Hal ini tercermin dalam penjualan pasar lokal dan ekspor, dengan menjadi normalnya permintaan ekspor dan pertumbuhan regional setelah penurunan di tahun 2008 dan 2009. Sebagai akibatnya, lebih dari 60 perusahaan melaporkan rencana untuk memperlus usahanya dalam satu – dua tahun ke depan, umumnya untuk mengembangkan pasar baru. Outlook di Indonesia merupakan salah satu yang paling kuat di wilayahnya, mencerminkan kekuatan relatif dari permintaan domestik pada beberapa tahun terakhir. 80 persen dari perusahaan memperkirakan bahwa mereka akan mencetak laba di tahun 2010 – salah satu persentase tertinggi untuk pasar di mana saja – sementara 65 persen perusahaan memperkirakan laba mereka akan lebih tinggi di tahun 2011. Hampir dua per tiga usaha di Indonesia diperkirakan akan memperluas kegiatannya di Indonesia dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan.

Survei itu juga mencatat masalah-masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan afiliasi di dalam operasi usaha. Informasi itu dapat memberikan masukan yang berharga bagi para penyusun kebijakan untuk menemukan, menyusun dan mendahulukan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri. Untuk Indonesia, para responden menemukan bahwa masalah-masalah berikut membelenggu kegiatan usaha: rendahnya kapasitas pekerja lokal dan staf manajemen; pembatasan dalam pemberhentian tenaga kerja; terbatasnya informasi tentang peraturan perundangan perdagangan; prosedur bea cukai yang rumit dan memakan waktu; terbatasnya pasokan tenaga listrik yang memadai (pemadaman); dan gejolak mata uang rupiah terhadap dolar Amerika.

Di seluruh wilayah, para responden survei juga mengatakan bahwa peningkatan biaya buruh sebagai tantangan yang paling signifikan terhadap kegiatan usaha, dengan perusahaan-perusahaan pada enam dari 18 negara melaporkan peningkatan rata-rata gaji tahunan sebesar dua digit. Tekanan upah sangat kuat di Cina dan Vietnam dan pada sektor elektronik, transportasi dan tekstil. Sementara hasilnya hanya terbatas dengan survei ini, dan dengan jumlah perusahaan yang relatif kecil, mereka mengatakan bahwa biaya tenaga kerja di Indonesia tetap rendah dibanding rata-rata nasional – dan terutama, lebih rendah dari Cina – pada sektor manufaktur dan non-manufaktur, dan bagi pekerja dan manajemen.

Menurut para responden, pada waktu survei dilakukan, rata-rata gaji bulanan dalam dolar Amerika bagi pekerja di sektor manufaktur dikatakan berada pada kisaran 40 persen lebih rendah di Indonesia dibanding di Cina (sekitar 45 persen lebih rendah ketika tunjangan, bonus, lembur dan asuransi sosial turut disertakan). Insinyur di sektor manufaktur juga menerima gaji pokok bulanan sekitar satu per lima lebih rendah dibanding Cina. Bagi staf non-manufaktur, terdapat perbedaan yang lebih besar. Upah pokok bagi staf non-manufaktur di Indonesia hanya kurang dari setengah dari yang sama di Cina, sementara jumlah beban upah sekitar seperempat. Sekali lagi, hasil-hasil ini hanyalah sebagian gambaran yang tidak mencerminkan kondisi usaha seluruh perusahaan asing, dan angkanya juga tidak disesuaikan untuk produktivitas relatif pekerja dari berbagai negara, tetapi upah pekerja yang rendah dapat menjadi daya tarik bagi perusahaan asing lain untuk pindah ke Indonesia. Seperti telah disinggung sebelumnya, terdapat sejumlah literatur yang membicarakan dampak yang dibawa PMA kepada kesejahteraan pekerja domestik dan ekonomi yang luas, tetapi hanya ketika dilengkapi dengan kebijakan yang mendukung mengenai kesehatan dan pelatihan. Sebagai contoh, hal itu dapat mendukung *transfer* pengetahuan kepada pekerja dalam negeri dan membangun modal manusianya, yang akan membawa tingkat produksi dan upah yang lebih tinggi.

Sumber: JETRO (2010). "Survey of Japanese-Affiliate Firms in Asia and Oceania", Survei tahun fiskal 2010, <http://www.jetro.go.jp/en/reports/survey/biz/>

C. INDONESIA 2014 KE DEPAN: SEBUAH PANDANGAN SELEKTIF**1. Menangani tantangan infrastruktur Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan**

Kelemahan infrastruktur merupakan salah satu penghalang utama bagi Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ke tahap yang lebih tinggi...

Rendahnya tingkat pembangunan infrastruktur menghalangi potensi pertumbuhan dan laju pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tanda-tanda dari rendahnya investasi infrastruktur selama lebih dari satu dekade termasuk peningkatan kemacetan di daerah perkotaan, tingginya biaya transportasi kargo antar pulau, pemadaman listrik dan terbatasnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang baik. Peringkat Indonesia termasuk yang paling rendah dibanding negara-negara lain di wilayah yang sama dalam hal kualitas infrastruktur dan kurangnya ketersediaan infrastruktur tersebut selalu disebut oleh perusahaan-perusahaan sebagai hambatan dalam operasional dan investasi mereka. Infrastruktur yang buruk juga dapat membawa dampak negatif terhadap kesejahteraan penduduk melalui berbagai jalur lainnya. Dampak terhadap kesehatan dapat segera terlihat dalam hal air kotor dan fasilitas sanitasi sementara biaya transportasi yang tinggi menghalangi akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lemahnya keterkaitan infrastruktur antar daerah juga dapat memperburuk situasi jika terjadi gejolak, seperti yang berhubungan dengan cuaca, karena sulitnya memindahkan produk antar wilayah.

Pemerintah Indonesia memahami pentingnya penanganan tantangan infrastruktur Indonesia dalam rencana jangka panjang ...

Memahami masalah-masalah ini, Pemerintah telah memberikan komitmennya untuk menghadapi tantangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utamanya. Hal ini ditekankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk periode 2010-2014 yang menetapkan sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur yang akan dicapai pada tahun 2014. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan jalan tol sepanjang 2,800 km, penambahan kapasitas pemasangan listrik sebesar 3000 MW per tahun, peningkatan rasio pemasangan listrik, dan meningkatkan akses terhadap air dan sanitasi untuk memenuhi target *Millennium Development Goal* (MDG). Seperti dibahas pada bagian selanjutnya, peningkatan infrastruktur juga merupakan fokus dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025.

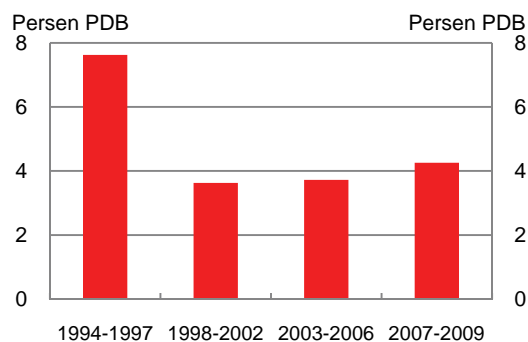
... dan juga dalam kebijakan jangka pendek

Prioritas untuk belanja infrastruktur juga terlihat dalam alokasi anggaran dan kebijakan akhir-akhir ini. Sebagai contoh, alokasi belanja modal di tahun 2011 sebesar 40 persen relatif terhadap anggaran yang direvisi tahun 2010. Akan tetapi, seperti dibahas pada Bagian A, tantangan pencairan anggaran masih tetap ada dan harus diatasi. Terdapat perkembangan positif terhadap peraturan perundangan yang mendukung seperti pendirian Unit Manajemen Risiko pada Kementerian Keuangan dan penetapan Perpres 67/2005 yang menetapkan kriteria yang berlaku untuk proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta yang membutuhkan dukungan keuangan Pemerintah. Undang-undang Pengadaan Tanah juga telah disampaikan kepada DPR. Masih banyak masalah yang masih harus ditangani, termasuk dalam meningkatkan koordinasi kebijakan pada berbagai tingkat di Pemerintahan. Bagian ini memberikan ulasan singkat terhadap tren dan kinerja investasi infrastruktur yang terjadi belakangan ini di Indonesia.

Investasi Indonesia dalam bidang infrastruktur turun dengan tajam pasca krisis keuangan Asia pada akhir 90an dan hanya pulih sebagian

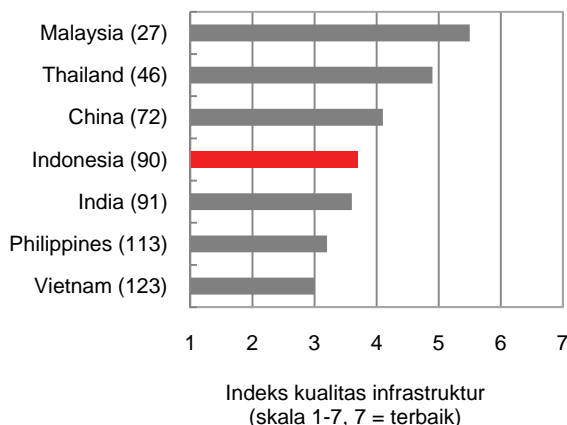
Walaupun telah pulih sebagian, tingkat investasi Indonesia dalam infrastruktur masih berada di bawah tingkat sebelum krisis tahun 1997/1998 (Gambar 23). Investasi infrastruktur turun dari di atas 8 persen dari GDP di tahun 1995 dan 1996 menjadi sekitar 3 persen di tahun 2000 dengan penekanan Pemerintah pada konsolidasi fiskal dan pemotongan hutang publik. Investasi BUMN dan pihak swasta pada sektor infrastruktur juga menurun. Sebagai akibatnya Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan bagi investasi infrastruktur pada akhir tahun 90an. Sejak itu, tingkat investasi hanya meningkat secara perlahan, hanya ke sekitar 4 persen dari PDB di tahun 2008-09 (Gambar 23). Walaupun data antar negara cukup sulit untuk didapat, angka-angka ini masih tergolong rendah dibanding beberapa negara lain di wilayah yang sama. Sebagai contoh, laporan Bank Dunia tahun 2005 dengan judul "Connecting East Asia: A New Framework for Infrastructure" memperkirakan tingkat investasi infrastruktur terhadap PDB di Cina, Thailand dan Vietnam berada di atas 7 persen. Walaupun rasio optimal atau rasio yang tepat untuk investasi infrastruktur terhadap PDB untuk suatu negara akan bergantung pada faktor-faktor khusus negara tersebut seperti infrastruktur yang ada, kualitasnya, letak geografis dan tujuan pembangunan, dampak dari tingkat investasi belakangan ini dapat terlihat dari ukuran kualitas infrastruktur yang buruk di Indonesia.

Gambar 23: Investasi infrastruktur Indonesia turun tajam pasca krisis Asia (persen PDB)

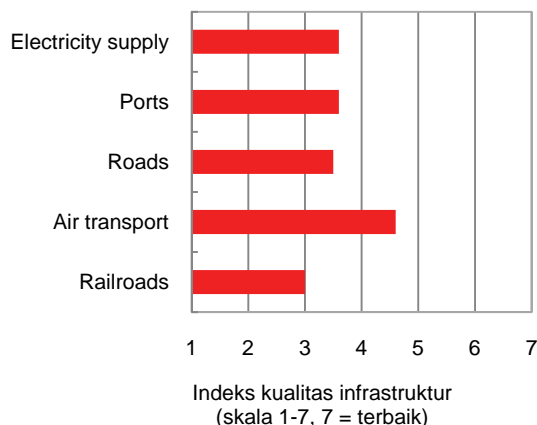


Sumber: Kemenkeu, laporan tahunan BUMN, pangkalan data Infrastruktur Pemerintah-Publik Bank Dunia untuk investasi swasta

Gambar 24: Peringkat Indonesia termasuk yang terendah dalam indeks kualitas infrastruktur... (Keseluruhan indeks kualitas infrastruktur, 2010-2011)



Gambar 25: ...dengan kinerja yang rendah untuk berbagai jenis infrastruktur (Keseluruhan indeks kualitas infrastruktur, 2010-2011)



Catatan: Pengukuran infrastruktur Indeks Daya Saing Dunia disusun berdasarkan tanggapan survei eksekutif akan kualitas jalan, rel kereta api, pelabuhan, transportasi udara, pasokan listrik dan data tentang kabel telepon tetap dan pelanggan telepon selular dan daftar kilometer kursi pesawat udara
 Sumber: World Economic Forum Global Competitiveness Report 2010-2011

Catatan: Indeks di atas disusun berdasarkan tanggapan survei eksekutif
 Sumber: World Economic Forum Global Competitiveness Report 2010-2011

Sebagai akibatnya, kualitas infrastruktur Indonesia adalah salah satu yang paling rendah di wilayahnya...

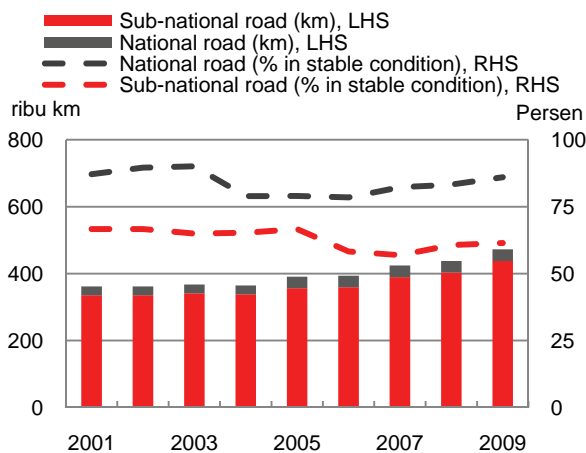
Terbatasnya investasi pada pemeliharaan dan infrastruktur yang baru terlihat dari rendahnya peringkat kualitas infrastruktur (Gambar 24), walaupun nilainya secara umum sejalan dengan tren berdasar tingkat pendapatan per kapita. Peringkatnya relatif serupa pada transportasi dan pasokan energi (Gambar 25). Laporan "Indonesia Competitiveness Report 2011" dari World Economic Forum yang baru dikeluarkan menyoroti kualitas infrastruktur sebagai faktor penghalang dari peningkatan lebih lanjut peringkat daya saing Indonesia.

Peringkat ini mencerminkan makin buruknya kondisi jalan-jalan, peningkatan kemacetan lalu-lintas di daerah-daerah perkotaan, terbatasnya kapasitas pelabuhan dan kebutuhan modernisasi rel kereta api. Data yang tersedia akan kondisi jalan-jalan memberikan beberapa kuantifikasi dari tren tersebut. Sejak tahun 2005, bagian dari jalan-jalan daerah dengan kondisi yang stabil (dengan penilaian kondisi baik atau cukup) telah merosot secara bertahap (Gambar 26). Karena jalan-jalan tersebut merupakan bagian terbesar dari keseluruhan jaringan jalan, tren ini tidak dapat mengimbangi peningkatan yang terjadi pada jalan nasional berdasarkan proporsi kondisi yang stabil dari keseluruhan jalan. Pada tahun 2009, 63 persen dari keseluruhan jaringan jalan berada pada kondisi yang stabil, 22 persen pada kondisi buruk dan 15 persen rusak, dibanding dengan kondisi pada tahun 2001 dengan 68 persen stabil, 19 persen buruk dan 13 persen rusak.

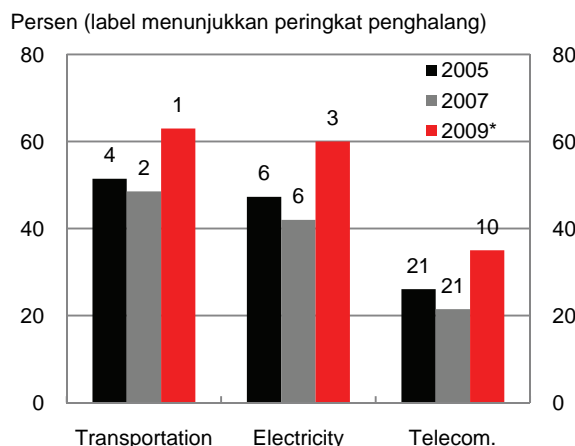
...dan meningkatkan tantangan bagi investasi dan kegiatan usaha

Kelemahan infrastruktur tersebut telah menjadi keprihatinan yang makin meningkat bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei tentang penghalang utama dari operasi dan investasi mereka. Dari tahun 2005 hingga 2009 peringkat masalah infrastruktur telah meningkat dalam hal jumlah perusahaan yang menyebutnya sebagai penghalang (Gambar 27). Di tahun 2009 transportasi dan pasokan energi adalah yang paling banyak dan nomor tiga terbanyak disebut, dengan sekitar 60 persen responden memandang mereka sebagai salah satu kendala utama. Kendala telekomunikasi lebih jarang disebutkan tetapi juga meningkat ke peringkat tengah dari tabel dari tahun 2005 hingga 2009.

Gambar 26: Kualitas jalan daerah di Indonesia telah menurun secara bertahap (panjang jalan, km; bagian dari jalan dalam kondisi stabil, persen)



Gambar 27: Masalah infrastruktur semakin menjadi penghalang utama bagi kegiatan perusahaan di Indonesia (bagian dari perusahaan yang menyebutkan masalah itu sebagai penghalang utama operasi dan investasi, persen)



Catatan: Kondisi stabil adalah jalan dalam kondisi baik atau cukup (sisanya dalam keadaan buruk atau rusak)
Sumber: Data jalan nasional dari Kementerian-PU, data jalan provinsi dan kab/kota dari BPS

Catatan: * Survei paling akhir dari tahun 2010 tetapi pertanyaan adalah tentang situasi di tahun 2009. Peringkat dari 22 penghalang yang diteliti
Sumber: Survei iklim investasi perusahaan Bank Dunia – LPEM-UI

...dengan dampak pada pertumbuhan produktivitas dan ekonomi makro secara agregat

Tantangan dari buruknya infrastruktur bagi kegiatan perusahaan tampaknya akan terlihat dari tingkat investasi, produktivitas dan pertumbuhan secara agregat. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan baru-baru ini oleh IMF (*Regional Economic Outlook: Asia and Pacific, October 2010*) menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur berhubungan sangat erat dengan investasi swasta di wilayah Asia Pacific. Studi ini merupakan bagian

dari banyak literatur yang dikembangkan untuk melakukan analisis dan mengkuantifikasi hubungan ini (lihat Kotak 5 untuk ulasan singkat). Perbedaan data, sampel dan pendekatan metodologi membuat penelitian-penelitian tersebut sulit untuk dibandingkan, tetapi ada konsensus umum terdapat pengaruh positif dari infrastruktur terhadap pertumbuhan, terutama bila digunakan ukuran infrastruktur fisik.

... memotivasi investasi yang besar dalam infrastruktur yang ditargetkan dalam Masterplan Pemerintah (MP3EI) 2011-

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pemerintah telah memahami bahwa investasi dalam infrastruktur telah tertinggal dan RPJMN saat ini memfokuskan lebih banyak investasi publik. Masterplan Ekonomi Pemerintah yang baru (MP3EI) 2011-2025 yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya, kembali menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan. Jika target lebih besar dari IDR 1.786 triliun, tambahan investasi infrastruktur dibandingkan dengan total investasi IDR 4.012 triliun di enam koridor ekonomi selama 2011-2025. Investasi infrastruktur ini mencakup hampir semua area yang saat ini masih lemah, dengan fokus utama di transportasi dan energy. Akan tetapi, belum terlalu jelas apa yang akan dilakukan dalam kebijakan insentif dan perbaikan iklim usaha untuk mempromosikan investasi yang diperlukan oleh pihak swasta dan BUMN

Kotak 5: Pembahasan tentang infrastruktur dan pertumbuhan – suatu ulasan singkat

Terdapat debat yang panjang tentang kaitan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Umumnya ada tiga saluran transmisi yang mendapat penekanan. Pertama, dampak peningkatan produktivitas dari infrastruktur, misalnya, lewat penurunan biaya transportasi dan peningkatan komunikasi. Kedua, peningkatan dalam sumberdaya manusia, seperti keluaran pendidikan dan kesehatan yang lebih baik karena lebih banyaknya klinik dan sekolah yang dibangun terhubung dengan penduduk. Ketiga, dukungan infrastruktur terhadap skala ekonomi dan cakupan produksi, sebagai contoh, dengan mendukung pemusatan kegiatan di dalam klaster atau memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk melayani pasar yang lebih besar. Sebaliknya terdapat potensi masalah yang berhubungan dengan penurunan investasi lain dalam jangka pendek (*crowding-out effect*), walaupun terdapat potensi peningkatan keuntungan jangka panjang dari investasi infrastruktur. Juga, jika suatu investasi baru dilakukan dengan mengurangi belanja untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada, maka mungkin ada masalah dalam hal efektivitas biayanya. Dari sudut pandang ekonomi politik, bergantung pada situasi kelembagaan, peningkatan tajam dalam belanja infrastruktur dapat memperlus perilaku pencari keuntungan, yang sekali lagi berpengaruh terhadap efektivitas biaya.

Beralih ke empiris, suatu penelitian oleh Straub (2008) menyoroti variasi antar studi-studi dari sampel dan periode waktu negara mereka, teknik ekonometris, penggunaan jumlah investasi infrastruktur atau pengukuran fisik dan himpunan penekanan pada pertumbuhan, output atau produktivitas dan antara pengaruh sementara dan jangka panjang. Dari 80 spesifikasi, sekitar setengah menemukan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, dua per lima tidak menemukan pengaruh dan sisanya menemukan pengaruh yang negatif dan signifikan. Temuan pengaruh positif akan output atau pertumbuhan akan lebih mungkin pada studi-studi yang menggunakan indikator fisik infrastruktur dibanding data investasi (yang tidak selalu dapat memetakan tingkat investasi fisik sebenarnya dengan baik).

Makalah yang baru diterbitkan oleh Calderon dkk. (2011) merupakan salah satu penelitian yang menemukan hubungan positif antara output dan tingkat infrastruktur fisik. Secara khusus, suatu indeks infrastruktur disusun sebagai perhitungan pembobotan dari dukungan negara dalam bidang transportasi, listrik dan telekomunikasi. Indeks itu kemudian digunakan sebagai variabel penjelas di dalam analisis empiris dari 88 negara pada periode tahun 1960–2000. Untuk menggambarkan pentingnya hasil analisis secara ekonomi, jika tingkat pelayanan infrastruktur suatu negara akan ditingkatkan dari median sampel di tahun 2000 ke persentil ke-75, maka akan didapatkan peningkatan output per pekerja sedikitnya di bawah 8 persen. Selanjutnya, dengan memindahkan tingkat median dari negara dengan pendapatan menengah-bawah ke median negara berpenghasilan menengah-atas, maka output per pekerja akan meningkat sebesar 5,2 persen. Yang menarik, terdapat sedikit variasi antar negara terhadap elastisitas antara infrastruktur dan pertumbuhan. Akan tetapi mereka menemukan bahwa tambahan manfaat terhadap pertumbuhan dengan peningkatan infrastruktur adalah lebih besar bagi negara-negara dengan tingkat infrastruktur yang lebih rendah dan negara dengan jumlah penduduk yang lebih besar dapat menerima tambahan manfaat yang lebih kecil karena dampak kemacetan.

Catatan: Lihat juga Makalah Riset Kebijakan Bank Dunia oleh Straub (2008), “Infrastructure and Development: A Critical Appraisal of the Macro Level Literature” dan Calderon dkk. (2011) “Is Infrastructure Capital Productive? A Dynamic Heterogeneous Approach” tersedia di <http://go.worldbank.org/GVSDC9EPB0>

2. Konektivitas dan Masterplan tahun 2011-2025

Pemerintah Indonesia baru-baru ini meluncurkan suatu Masterplan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan menghantarkan Indonesia menjadi satu dari sepuluh kekuatan ekonomi paling besar pada tahun 2025

Walaupun mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen selama 30 tahun untuk periode tahun 1967 hingga 1997 dan 5,6 persen pada periode terakhir dari tahun 2004 hingga 2010, Indonesia masih menyimpan potensi untuk meraih tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi lagi dengan kekayaan sumber daya alam dan manusianya, ditambah dengan lokasinya yang strategis di dalam motor Asia penyokong pertumbuhan ekonomi global. Untuk sepenuhnya memberdayakan potensi tersebut, Presiden Indonesia baru-baru ini mengumumkan suatu Rencana Induk atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). Strategi jangka panjang ini, mencakup masa yang lebih lama tetapi dirancang untuk tetap terpadu dan terkoordinasi dengan rencana pembangunan lima tahunan, bertujuan untuk menghantarkan Indonesia menjadi satu dari sepuluh ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2025. Dengan tingkat pertumbuhan yang dipatok pada kisaran tujuh hingga sembilan persen, Masterplan juga diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan transformasi struktur ekonomi serta mengubah praktik *'business as usual'* untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

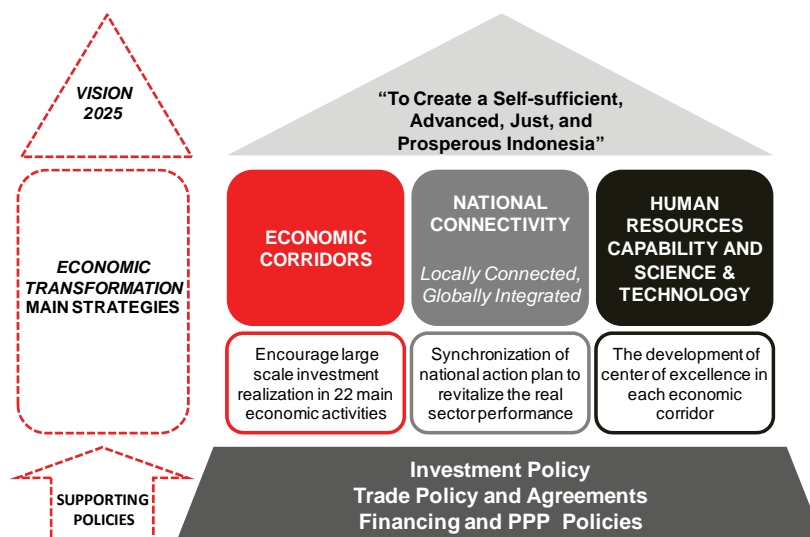
Sehubungan dengan potensi pentingnya Masterplan tersebut sebagai suatu kerangka bagi strategi pembangunan Indonesia menuju ke masa depan, bagian ini akan memberikan ulasan singkat mengenai apa itu Masterplan; dan sesuai dengan penekanan edisi Triwulanan ini yaitu investasi infrastruktur, maka bahasan akan lebih mendalam berkenaan dengan masalah konektivitas, yang merupakan pilar utama dari Masterplan.

a. Menggabungkan pendekatan sektoral dan regional terhadap pembangunan

Tiga pilar Masterplan adalah pembangunan koridor ekonomi, penguatan konektivitas nasional dan peningkatan SDM dan Iptek

Rencana baru tersebut memiliki tiga strategi sebagai dasarnya: (i) pembangunan enam koridor ekonomi, (ii) penguatan konektivitas nasional, dan (iii) peningkatan kapasitas teknologi dan kapasitas penelitian dan pengembangan. Strategi pertama menekankan pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap pulau dengan membangun klaster sektor unggulan, yang hanya akan berhasil jika strategi kedua telah dilaksanakan dan sinergi telah terbangun antara pusat-pusat pertumbuhan tersebut dan mereka terhubung secara internasional untuk mendukung perdagangan dan pariwisata. Strategi ketiga juga hendak memperkuat kinerja ekonomi dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan meningkatkan investasi pada penelitian dan pengembangan. Menurut rencana baru tersebut, manfaat dari strategi-strategi tersebut hanya akan dapat dipetik bila mereka didukung oleh penyusunan kebijakan perdagangan dan investasi yang baru, termasuk perjanjian perdagangan, dan juga kebijakan keuangan yang baru, termasuk kerjasama pemerintah-swasta (Gambar 28).

Gambar 28: Mencapai transformasi ekonomi melalui strategi Masterplan



Sumber: Bank Dunia berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian "Grand Design Transformasi Ekonomi" tahun 2011 dan "Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025".

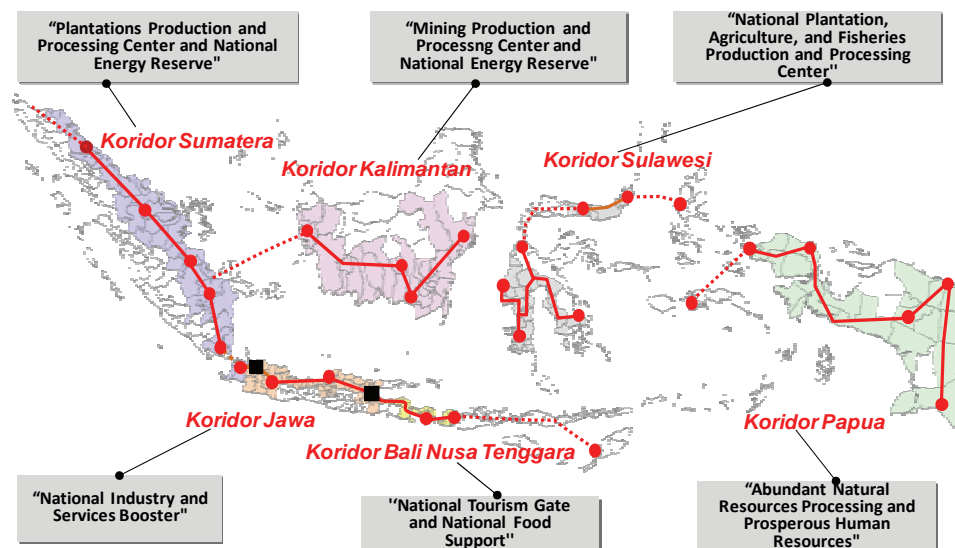
Masterplan itu menggabungkan pendekatan sektoral dan regional pada pembangunan di setiap koridor ekonomi

Masterplan itu menekankan pada penyatuan pendekatan pembangunan sektoral dan regional di dalam koridor ekonomi yang telah ditentukan. Pendekatan sektoral menekankan pada identifikasi sektor-sektor unggulan pada setiap koridor yang memiliki prospek pertumbuhan global yang tinggi, dan di mana Indonesia memiliki potensi dan kemampuan untuk meningkatkan daya saingnya. Pendekatan regional melengkapi pendekatan sektoral dan menentukan, bagi setiap koridor, peraturan regional atau nasional yang perlu diubah, investasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk daerah tersebut, dan jenis pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan ilmu dan teknologi yang akan memberi manfaat bagi sektor-sektor tersebut. Penekanan regional ini bertujuan untuk menjembatani bagian Barat dan Timur Indonesia, membantu menutup jurang pembangunan antara pulau-pulau.

Masterplan menetapkan 22 sektor investasi dan dua proyek infrastruktur berskala besar...

Masterplan tersebut menempatkan Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator bagi investasi-investasi baru, mengundang sektor swasta, BUMN dan modal asing untuk meningkatkan industri pengolahan pada sektor-sektor utama. Masterplan tersebut menemukan kesempatan investasi pada 22 sektor, termasuk minyak sawit, karet, batu bara, nikel, tembaga, migas, pariwisata, perikanan, food estate, industri makanan dan minuman, tekstil, mesin/transportasi, perkapalan, besi-baja, aluminium dan telematika. Masterplan itu juga menyertakan dua proyek infrastruktur berskala besar: peningkatan jaringan transportasi Jabodetabek dan pembangunan jembatan antara pulau Jawa dan Sumatra. Kesempatan investasi nasional tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam enam koridor regional, yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-NTT, Papua dan Maluku (Gambar 29).

Gambar 29: Masing-masing dari enam koridor ekonomi memiliki penekanan pembangunan yang berbeda



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian "Grand Design Transformasi Ekonomi" tahun 2011

... dan memperkirakan investasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk setiap koridor

Masterplan tersebut juga menunjukkan jenis investasi tambahan untuk setiap koridor, umumnya dalam bidang infrastruktur, yang akan dibutuhkan untuk memastikan bahwa investasi sektoral tersebut akan memiliki dampak ekonomi yang paling tinggi. Pembangunan jalan-jalan, pelabuhan, rel kereta api dan pembangkit listrik mendapatkan prioritas utama. Sebagai contoh, pengembangan lebih lanjut dari industri batu bara di Sumatra dan Kalimantan membutuhkan investasi pada rel kereta api dan pelabuhan untuk menjamin pengiriman batu bara yang efisien ke bagian lain dari Nusantara dan untuk ekspor.

Total investasi menurut Masterplan tersebut diperkirakan mencapai Rp 4.012 triliun (468 miliar dolar Amerika) yang didorong oleh sektor swasta

Untuk lima belas tahun berikutnya, Masterplan itu memperkirakan investasi sebesar Rp 4.012 triliun (468 miliar dolar Amerika pada kurs tukar yang kini berlaku) pada enam daerah tersebut yang mana 55 persen akan berupa kegiatan sektoral dan 45 persen lainnya untuk infrastruktur. Investasi sektor swasta merupakan pendorong utama dan diperkirakan akan menutup 51 persen dari jumlah tersebut, sementara besar sumbangan BUMN diperkirakan akan mencapai 18 persen. Pemerintah pusat dan daerah akan menyumbang 10 persen dalam bentuk infrastruktur dasar, seperti jalan-jalan, pelabuhan laut, bandara, rel kereta api dan pembangkit tenaga listrik. Sisa 21 persen akan dipenuhi dengan gabungan dana-dana, termasuk investasi asing dan PPPs.

Selain bagi investasi, Masterplan juga menyoroti beberapa reformasi lintas sektoral

Bersama-sama dengan investasi, Masterplan yang baru juga sedikit menyinggung tentang kebutuhan yang mendasar untuk beberapa reformasi lintas sektoral. Hal itu mencakup penyalarsan antara undang-undang dan peraturan nasional dan daerah, penerbitan undang-undang dan peraturan baru untuk mendukung peningkatan pengolahan komoditas dalam negeri, membangun sistem insentif untuk mendorong investasi dan menyederhanakan prosedur perijinan investasi di seluruh negeri.

b. Meningkatkan konektivitas Indonesia

Peningkatan konektivitas Indonesia mencakup hubungan di dalam pulau, antar pulau dan internasional

Sasaran-sasaran di dalam Masterplan tidak dapat dicapai tanpa peningkatan konektivitas di Indonesia, termasuk mata rantai pasokan yang menghubungkan produsen ke konsumen. Hal itu mencakup hubungan di dalam pulau, antar pulau dan internasional. Sementara Masterplan lebih banyak menekankan pada konektivitas di dalam pulau, seperti pada rantai biasa, kekuatan seluruh mata rantai pasokan hanyalah sekuat mata rantai terlemahnya, sehingga peningkatan harus dilakukan pada seluruh tiga tingkat. Meningkatkan konektivitas antara produsen dalam negeri dan konsumen dalam negeri yang berada di lokasi yang tersebar di Indonesia akan membutuhkan hubungan di dalam dan antar pulau yang kuat. Pengaitan produsen dan konsumen dalam dan luar negeri membutuhkan gerbang internasional, seperti pelabuhan dan bandara, yang handal dan efisien.

Peningkatan konektivitas di dalam pulau dapat saling menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan perkotaan dan juga dengan daerah pedesaan

Kunci untuk konektivitas di di dalam pulau adalah terletak pada menghubungkan daerah pedesaan dengan daerah perkotaan, menghubungkan daerah pedesaan ke kutub pertumbuhan di pulau tersebut serta yang terpenting adalah menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan tersebut. Hubungan yang lebih kuat di dalam suatu pulau dapat memberikan sinergi antar kutub pertumbuhan dan memperluas manfaat pertumbuhan ke daerah-daerah yang kurang berkembang dengan adanya akses ke pusat-pusat kota dan pasar daerah yang lebih besar. Sebagai akibatnya, manfaat investasi pada koridor-koridor tidak akan hanya terbatas pada pusat-pusat pertumbuhan.

Peningkatan konektivitas di dalam pulau pada dasarnya merupakan tugas pemerintah daerah dengan transfer fiskal dari pemerintah pusat yang memberikan dana untuk membangun dan memelihara proyek-proyek infrastruktur lokal. Sementara peran pemerintah pusat lebih kepada penyusunan suatu kerangka kebijakan yang mendukung dan koordinasi hubungan antar kutub-kutub pertumbuhan dan dengan daerah-daerah tertinggal di dalam pulau yang sama.

Pendekatan-pendekatan kepada konektivitas di dalam pulau bervariasi menurut kepadatan penduduk dari suatu daerah...

Dibutuhkan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan konektivitas di dalam pulau, bergantung pada kepadatan penduduk dari suatu daerah. Suatu strategi *fishbone* (tulang ikan) menghubungkan daerah-daerah perkotaan dengan lalu-lintas yang tinggi melalui jalur utama yang terdiri dari jalan-jalan yang lebar, jalan bebas hambatan dan rel kereta api dan menghubungkan daerah-daerah perkotaan itu dengan daerah pedalaman melalui jalan-jalan pengumpan yang berhubungan dengan jalur utama. Strategi ini sangat tepat diterapkan di pulau-pulau dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi di Indonesia, karena penggunaan dengan intensitas yang tinggi oleh penduduk dapat memberi justifikasi kepada tingginya biaya pembangunan.

... dan dapat menyertakan strategi tulang ikan atau titik tinta

Sebaliknya, strategi *ink-spot* (noda tinta) menghubungkan daerah-daerah pinggiran dengan suatu pusat dengan menggunakan sistem transportasi yang lebih kecil dan lebih murah lebih tepat diterapkan pada daerah-daerah yang tidak padat dan lebih terpencil, seperti pada bagian Timur Indonesia. Dengan makin meningkatnya titik-titik tinta tersebut, mereka akan saling terhubung, dan secara perlahan-lahan bentuknya akan menyerupai strategi tulang ikan.

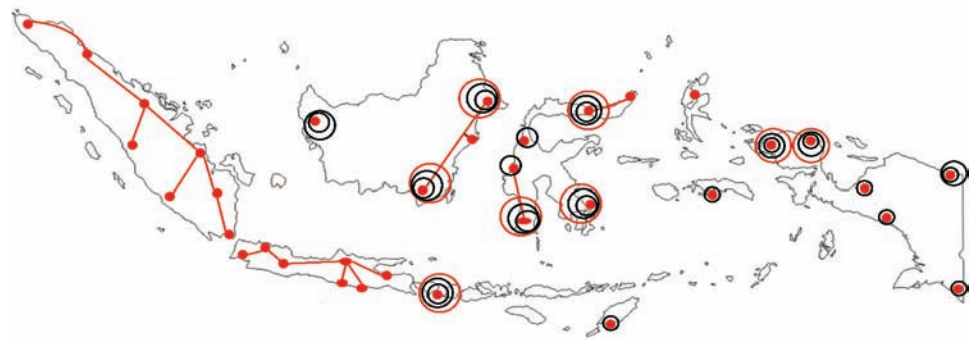
...dilengkapi dengan infrastruktur tertentu untuk mendukung sektor sumber daya

Di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, strategi tulang ikan atau titik tinta harus dilengkapi dengan infrastruktur pengiriman komoditi khusus dari daerah sumber daya alam ke pelabuhan (seperti kereta api batu bara di Kalimantan atau pembangunan pelabuhan pusat bagi komoditas tertentu) Gambar 30 berikut menunjukkan kemungkinan pemetaan pendekatan tulang ikan dan titik tinta ke berbagai daerah di Indonesia.

Penggunaan strategi tulang ikan dan titik tinta yang tepat dapat membantu meningkatkan konektivitas di dalam pulau pada tingkat biaya yang efektif

Master Plan merancang penggunaan strategi tulang ikan pada setiap koridor untuk menghubungkan kota-kota dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Pada wilayah dengan pertumbuhan lebih kecil dan tersebar, penguatan sistem transportasi di sekitar pusat wilayah melalui investasi yang ditargetkan dapat memfasilitasi hubungan dari pusat wilayah tersebut menjadi koridor-koridor ekonomi dari Master Plan. Kombinasi dari strategi titik tinta dan tulang ikan dapat digunakan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan menyebarkan pemanfaatan pertumbuhan pada sektor cluster dari koridor-koridor.

Gambar 30: Penerapan pendekatan tulang ikan dan titik tinta kepada konektivitas dalam pulau



Sumber: Bank Dunia tahun 2010

Peningkatan konektivitas di dalam pulau dibutuhkan untuk mencapai integrasi ekonomi di dalam suatu negara kepulauan...

Konektivitas di dalam pulau sangat penting untuk meningkatkan integrasi ekonomi di dalam suatu negara kepulauan. Walaupun Masterplan berisi beberapa proyek-proyek infrastruktur berukuran besar dan berbiaya tinggi untuk meningkatkan konektivitas antar pulau (seperti Jembatan Selat Sunda antara pulau Jawa dan Sumatra), dibutuhkan arah dan strategi kebijakan yang lebih jelas untuk menjawab keterbatasan yang paling mendesak dan penting di daerah-daerah tersebut.

...dan mengharuskan pemangkasan biaya transportasi kargo dan peningkatan kehandalan

Untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, tujuan utamanya adalah menghemat biaya transportasi antar pulau dan peningkatan kehandalan, terutama transportasi barang-barang konsumsi ke pulau-pulau terpencil yang umumnya miskin. Biaya transportasinya sekarang sangatlah tinggi, dengan biaya transportasi laut dalam negeri yang lebih tinggi secara signifikan dibanding biaya transportasi laut ke negara-negara lain dengan jarak yang serupa. Biaya tinggi ini merupakan faktor penyumbang yang penting terhadap harga-harga barang konsumsi yang umumnya lebih tinggi pada propinsi-propinsi terpencil. Biaya itu juga merupakan penghalang dari pengiriman komoditas ke fasilitas pengolahan dan pengiriman barang-barang ke pasar (umumnya di pulau Jawa dan luar negeri).

Juga terdapat kasus subsidi transportasi antar-pulau untuk meningkatkan konektivitas di pulau-pulau bagian Timur Indonesia

Terdapat kasus subsidi transportasi laut antar pulau untuk meningkatkan tingkat konektivitas antar daerah-daerah terpencil dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah pada daerah-daerah Indonesia bagian Timur dengan pusat-pusat perkotaan yang utama. Daerah-daerah tersebut memiliki permintaan yang rendah dan ketidakseimbangan perdagangan yang tinggi, yang menghalangi pengadaan jasa transportasi pada harga yang terjangkau. Akan tetapi, sangatlah penting untuk menerapkan sistem subsidi dengan cara yang menjamin penyampaian jasa yang berkualitas dan efisien yang tidak mendistorsi pasar yang lain.

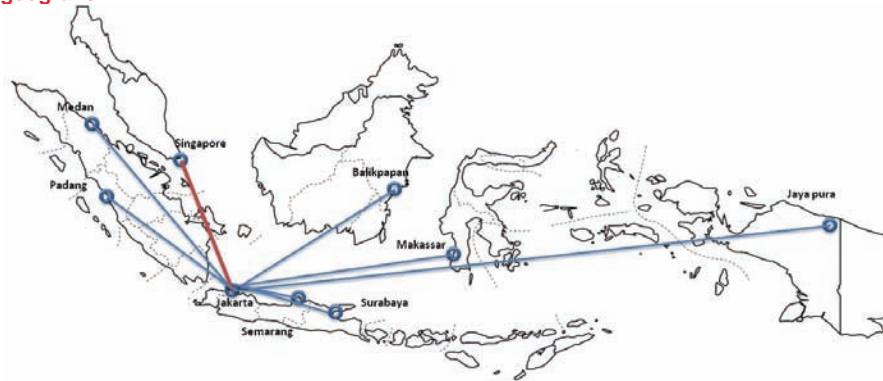
<p>Pada akhirnya, peningkatan konektivitas antar pulau secara efisien membutuhkan pendekatan yang terencana baik dan multi-jenis</p>	<p>Peningkatan konektivitas antar pulau tidak hanya berkenaan dengan biaya transportasi dan pengiriman, tetapi juga berbagai jenis sistem transportasi, yang mencakup fasilitas transportasi darat, laut, sungai dan udara. Hal ini harus direncanakan secara teliti untuk mencegah tumpang tindih dan ketidakefisienan yang menghabiskan biaya. Sangatlah penting agar pusat-pusat pemindahan antar berbagai jenis transportasi mengutamakan kemudahan. Sebagai contoh, suatu sistem multi-jenis dapat menyertakan fasilitas <i>roll on, roll off</i> untuk meningkatkan integrasi antara jasa transportasi kapal ferry dan jalan-jalan penghubung. Penempatan pusat transportasi multi-jenis juga harus direncanakan secara teliti, dengan penempatan yang didasarkan pada identifikasi pusat-pusat pertumbuhan daerah yang akurat untuk memastikan konektivitas nusantara secara keseluruhan.</p>
<p>Konektivitas internasional yang kuat dapat meningkatkan daya saing ekspor perusahaan Indonesia dan membuka akses kepada konsumen dan produsen nasional kepada barang-barang dan jasa yang baru dan lebih murah</p>	<p>Kemampuan untuk memindahkan barang-barang dan jasa melintasi perbatasan-perbatasan secara cepat, murah dan tingkat periklanan yang tinggi merupakan suatu faktor penentu daya saing suatu negara yang sangat penting. peningkatan konektivitas internasional dapat meningkatkan daya saing ekspor produsen Indonesia dengan memungkinkan produk-produk mereka untuk mencapai pasar luar negeri pada tingkat harga yang bersaing. Produsen dan konsumen dalam negeri juga mendapatkan akses terhadap impor produk masukan dan produk konsumen yang dapat memiliki harga yang lebih rendah atau dengan jenis-jenis yang berbeda dari yang diproduksi di dalam negeri. Tingginya biaya transaksi yang disebabkan oleh ketidakefisienan pelabuhan, kemacetan dan transaksi di perbatasan merupakan salah satu penghalang terbesar yang membatasi perusahaan dan konsumen Indonesia dari secara sepenuhnya memetik manfaat dari jaringan perdagangan internasional dunia yang terus meningkat.</p>
<p>Penanganan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok yang hampir melebihi batas membutuhkan tindakan segera ...</p>	<p>Penumpukan yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta menghambat konektivitas antar pulau dan internasional Indonesia. Hingga 70 persen peti kemas ekspor dan impor Indonesia melalui pelabuhan ini, yang merupakan gerbang internasional utama dan pintu utama distribusi produk dalam negeri. Sebagian barang-barang yang diekspor melalui pelabuhan ini tidak mencapai kapalnya sesuai jadwal. Sebagai akibatnya, mereka seringkali terlambat tiba di Singapura atau Malaysia. Sesuai proyeksi makin meningkatnya lalu-lintas peti kemas, kapasitas maksimum Tanjung Priok akan tercapai dalam waktu kurang dari empat tahun. Pemerintah perlu segera mengambil tindakan untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas Tanjung Priok dan untuk membangun pelabuhan baru di Jakarta untuk mendukung kegiatan niaga.</p>
<p>... yang turut disertakan di dalam Masterplan yang baru</p>	<p>Masterplan yang baru secara jelas menyatakan kebutuhan yang mendesak untuk upaya meningkatkan pelabuhan Jakarta. Akan tetapi, keputusan peningkatan kapasitas pelabuhan itu telah mengalami beberapa kali penundaan dan terdapat ancaman yang makin meningkat bahwa penambahan kapasitas tidak akan tersedia tepat waktu, dengan proyeksi bahwa kapasitas maksimum akan tercapai pada tahun 2014. Bila hal itu terjadi, kegiatan logistik ekspor impor akan melambat dan harga akan meningkat, yang dapat menghambat penerapan proyek-proyek utama lainnya seperti tercantum dalam rencana induk.</p>
<p>Gabungan peningkatan infrastruktur lunak dan keras di pelabuhan lain di seluruh negeri juga dapat meningkatkan konektivitas internasional</p>	<p>Meningkatkan efisiensi dan memperbesar kapasitas pelabuhan internasional lain diseluruh negeri dapat makin meningkatkan konektivitas internasional Indonesia. Untuk meraih hal ini, sangat dibutuhkan perbaikan infrastruktur dan pemangkasan birokrasi pada fasilitas-fasilitas tersebut. Selain peningkatan kapasitas dari pelabuhan internasional yang telah ada, Pemerintah dapat mempertimbangkan pembukaan sejumlah perbatasan darat untuk perdagangan luar negeri dan menambah jumlah pelabuhan internasional.</p>

Kotak 6: Jarak geografis vs jarak ekonomis di Indonesia

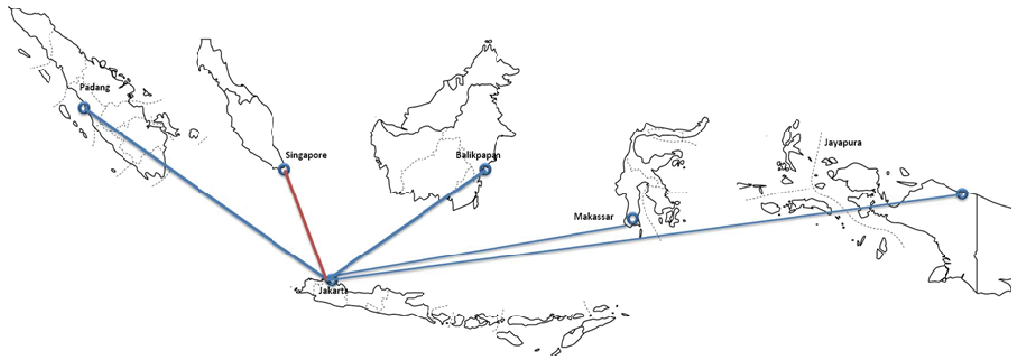
Tingginya tingkat biaya transportasi pengiriman barang antar pulau meningkatkan jarak ekonomi antar daerah-daerah di Indonesia. Gambar 31 menunjukkan biaya transportasi dari Jakarta ke tujuan dalam negeri dan ke Singapura. Peta pertama menunjukkan jarak geografis. Peta kedua menunjukkan biaya relatif untuk mengirimkan peti kemas ukuran 20 kaki lewat laut ke Padang, yang ternyata menelan biaya 2,7 kali lipat lebih tinggi dari pada mengirimkan peti kemas yang sama ke Singapura. Dengan adanya biaya tinggi tersebut, jarak ekonomi antara pulau-pulau nusantara menjadi lebih tinggi sesuai dengan lokasi geografisnya. Peta ketiga menunjukkan bahwa terdapat pola sebaliknya pada moda transportasi pesawat udara, di mana lebih penumpang membayar lebih murah untuk penerbangan dari Jakarta ke tujuan di dalam negeri dibanding ke Singapura. Namun demikian, faktor persaingan yang terbatas seperti ini bukanlah hal utama yang menyebabkan tingginya biaya transportasi laut. Ada dua hal lain yang dianggap berkontribusi lebih signifikan terhadap adanya masalah ini yaitu kurang padatnya permintaan serta tidak meratanya peminat untuk perjalanan ke daerah tertentu. Ini dicontohkan dengan adanya temuan bahwa sebagian besar kapal yang membawa barang ke daerah tertentu dan kembali Jawa ternyata hanya mengangkut barang jauh kurang dari kapasitasnya (setengah kosong). Sehingga yang dibutuhkan dalam hal ini adalah sebuah kerjasama yang lebih erat antara sesama moda transportasi yang tentunya disusun dalam sebuah kerangka kebijakan yang lebih memadai.

Gambar 31: Variasi biaya transportasi – menjauhkan kota-kota dan membawanya lebih dekat

a) Jarak geografis



b) Jarak ekonomi berdasar biaya transportasi laut (biaya unit=1,00 jarak ke Singapura)



c) Jarak ekonomi berdasarkan harga tiket pesawat udara (biaya unit=1,00 jarak ke Singapura)



Catatan: Jarak ekonomi berdasarkan biaya per mil dari Jakarta ke Singapura sebagai unit dasar: untuk pengiriman peti kemas 20 kaki lewat laut 0,23 dolar Amerika per mil=1,00 dan untuk penumpang pesawat terbang Rp 936 per mil=1,00. Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan Maersk, Lion Air dan Garuda (2009)

c. Penerapan Masterplan

Masterplan memiliki tiga tahap penerapan yang berurutan

Kembali ke Masterplan, kunci untuk memenuhi tujuannya yang ambisius terletak pada penerapannya. Dokumen itu menetapkan tiga tahap yang berurutan. Tahap pertama adalah dari tahun 2011 hingga 2015 yang menenankan pada sasaran-sasaran yang dapat cepat dicapai dan pada persiapan rencana untuk menyederhanakan berbagai peraturan, izin dan insentif yang tertunda, dan juga mempersiapkan landasan bagi investasi-investasi. Diperkirakan bahwa rencana-rencana tersebut akan memastikan bahwa strategi-strategi akan diterapkan dengan baik untuk tahap berikutnya. Tahap kedua dari tahun 2016 hingga 2020 akan menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur jangka panjang, meningkatkan inovasi untuk memperbaiki daya saing dan mendorong penciptaan industri-industry dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Tahap ketiga dan terakhir dimulai dari tahun 2021 hingga 2025 dengan asumsi bahwa landasan telah terbentuk bagi industri Indonesia untuk bersaing secara global sementara menerapkan teknologi tingkat tinggi.

Tahap pertama bertujuan untuk menyatukan berbagai rencana nasional, daerah dan sektoral Pemerintah menjadi suatu peta jalan aksi

Pada tahap pertama, rencana-rencana pemerintah tingkat nasional, daerah dan sektoral disatukan menjadi suatu peta jalan untuk aksi. Sebagai contoh, untuk memperkuat konektivitas nasional, komponen-komponen dari empat rencana pemerintah akan dipadukan: (a) Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), (b) Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), (c) Rencana Pembangunan (RPJMN dan RTRWN); (d) Teknologi Komunikasi and Informasi (TKI). Untuk memastikan penerapan dari berbagai strategi, rencana itu menyinggung suatu komite khusus yang dipimpin oleh Presiden RI untuk meningkatkan efisiensi koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis.

d. Menuju ke depan

Masterplan memberi arah strategis bagi investor tentang di mana penekanan industri akan diletakkan oleh Pemerintah untuk 15 tahun ke depan

Masterplan yang baru secara jelas bertujuan untuk mendukung usaha dan kesempatan investasi dalam negeri dan merupakan suatu upaya yang berani yang dipimpin oleh pemerintah untuk menyatukan pemerintah propinsi dan daerah, pemimpin usaha dan BUMN kepada suatu kerangka pembangunan nasional. Masterplan tersebut diatur oleh peraturan presiden, yang tampaknya akan memberikan payung hukum yang lebih baik bagi kementerian jajaran depan dan pemerintah daerah, dan pada saat yang bersamaan, memberi tekanan yang lebih besar kepada mereka untuk mendorong pembangunan industri dan infrastruktur. Lebih luas lagi, Masterplan menyertakan arah strategis bagi investor yang menunjukkan penekanan industri yang akan dilakukan oleh pemerintah pada 15 tahun ke depan. Pemerintah juga mengetahui bahwa dibutuhkan peningkatan iklim investasi dan reformasi peraturan untuk mendukung investasi seperti yang ditetapkan di dalam Masterplan, terutama oleh sektor swasta. Akan tetapi, kunci kepada penerapan reformasi yang berhasil akan tetap terletak pada pelaksanaan dan penerapannya.

Masterplan akan menjadi dokumen yang terus diperbarui dan disesuaikan

Masterplan adalah bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, dan karenanya, dokumen itu akan diperbarui dan disesuaikan secara progresif. Hal-hal berikut mengusulkan jalan ke depan yang dapat meningkatkan penerapan strategi utama, terutama pada pilar konektivitas:

Identifikasi prioritas kebijakan dan investasi dan komitmen politik untuk menangannya akan dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi

Tahap pertama implementasi memperlihatkan suatu agenda reformasi lintas sektor yang sangat ambisius. Identifikasi prioritas akan sangat membantu untuk menetapkan *batch* reformasi pertama untuk membuka kunci beberapa penghalang investasi yang paling penting. Identifikasi dari prioritas kegiatan yang tepat untuk meningkatkan konektivitas pada tingkat di dalam pulau, antar pulau dan internasional juga akan membantu mendorong suatu tingkat integrasi yang lebih tinggi antara berbagai rencana dan cetak biru.

Akan dibutuhkan komitmen politik untuk menangani peraturan yang menghambat yang telah menghalangi investasi selama bertahun-tahun, seperti pembebasan tanah, mekanisme harga seperti pada bidang energi, yurisdiksi aturan yang saling bersaing, pencairan belanja pemerintah yang lambat dan masalah pemulihan biaya. Juga termasuk penekanan yang lebih besar akan pentingnya perencanaan pemerintah daerah dalam

memelihara dan mendorong iklim usaha. Bahkan tampaknya proyek-proyek tersebut telah direncanakan selama beberapa tahun terakhir ketika peraturan-peraturan penghalang tersebut masih berlaku (seperti jalan raya Trans-Jawa).

Konektivitas antar pulau akan menjadi penting untuk membangun sinergi di dalam dan antara koridor-koridor

Seperti telah disinggung, sebagian besar pembicaraan konektivitas di dalam Masterplan menekankan pada konektivitas di dalam pulau. Meningkatkan konektivitas antar pulau juga sangat penting, karena akan membangun sinergi di dalam dan di antara masing-masing koridor. Sebagai contoh, bahan masukan untuk pembangunan koridor tertentu tampaknya akan datang dari pulau-pulau lain dan sangatlah penting bahwa bahan-bahan itu tersedia pada harga yang terjangkau. Konektivitas antar pulau mendukung pergerakan produk menuju pasar. Sebagai contoh, Masterplan menetapkan daerah sekitar Merauke (Papua) untuk pembangunan sentra penanaman pangan, tetapi tidaklah jelas apakah hasil produksinya dapat dijual pada tingkat yang menguntungkan di belahan barat Indonesia dengan tingginya biaya transportasi laut.

Uraian lanjutan dari pilar ketiga tentang sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan akan berguna di dalam pendekatan menyeluruh terhadap persaingan ekonomi

Analisa mendalam akan pilar ketiga tentang kemampuan sumber daya manusia dan dukungan penelitian dan pengembangan akan menjadi penting untuk memungkinkannya memainkan peran yang fundamental dalam mendorong pertumbuhan. Saat ini kerangkanya tidak menyertakan analisis klaster industri yang telah diidentifikasi atau usulan bagi reformasi pasar tenaga kerja secara keseluruhan.

Selain itu elemen-elemen lain dari pandangan menyeluruh atas daya saing ekonomi dapat lebih diperluas. Termasuk di dalamnya adalah peran logistik dalam menghubungkan kegiatan di dalam dan antar koridor ekonomi. Sejalan dengan itu, dorongan pada pembangunan sektor jasa yang bersaing dapat lebih meningkatkan produktivitas koridor ekonomi baik dalam hal jasa transportasi maupun usaha dan jasa-jasa lainnya yang menjadi input terhadap produksi. Infrastruktur keras Masterplan dapat dilengkapi dengan memberikan infrastruktur lunak dalam bentuk layanan masyarakat, keterampilan dan pendidikan bagi pekerja sehingga peran mereka akan semakin besar di dalam pembangunan koridor ekonomi.

Langkah berikut lainnya yang berguna termasuk identifikasi mekanisme untuk menggerakkan pendanaan swasta ...

Masterplan tidak menjelaskan bagaimana target investasi sektor swasta yang berjumlah besar akan dapat dipenuhi. Sektor swasta Indonesia tertarik untuk turut serta di dalam beberapa kesempatan investasi dengan jumlah yang besar tetapi hal itu akan membutuhkan skema pendanaan, mekanisme dan peraturan jangka panjang.

...dan pengaturan kelembagaan untuk koordinasi, pemantauan dan evaluasi tingkat tinggi

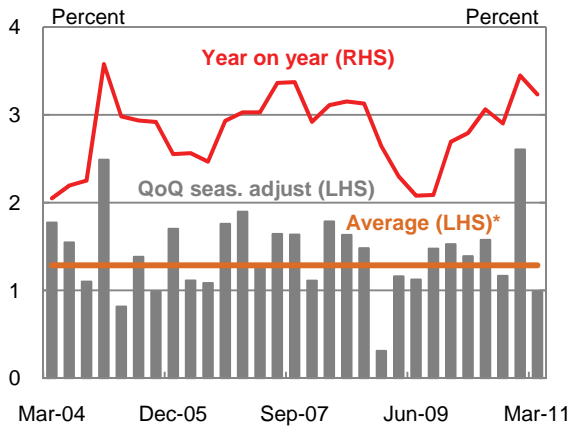
Langkah tambahan berikut yang penting adalah penguraian pengaturan kelembagaan yang dibutuhkan untuk koordinasi tingkat tinggi antar kementerian dan lembaga yang terlibat di dalam perancangan dan implementasi Masterplan. Rencana ini merupakan upaya yang berukuran raksasa yang juga akan membutuhkan pemantauan mendalam oleh suatu tim yang juga dapat membuat penyesuaian yang dibutuhkan. Berdasarkan kinerja dari kelompok kerja antar-departemen yang lain, pengaturan pemantauan yang ada sekarang tampaknya membutuhkan penguatan lebih lanjut.

Sebagai rangkuman, selain mengetahui adanya tantangan penerapan, Masterplan juga memiliki potensi sebagai alat transformasi

Terdapat risiko bahwa Masterplan yang baru akan menghadapi penundaan penerapan dan halangan dan tampaknya akan bernasib serupa seperti rencana-rencana dan cetak-cetak biru yang dihasilkan oleh Pemerintah. Akan tetapi, bagi mereka yang bersikap optimis dan berhati-hati, rencana induk itu memiliki potensi untuk menjadi alat transformasi yang memungkinkan negara ini untuk mengejar kebijakan yang pro-usaha dan investasi yang akan menjadi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang melibatkan, berkelanjutan dan berjangka panjang.

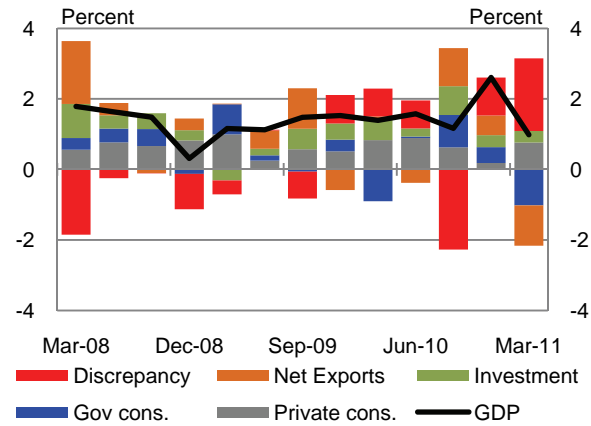
LAMPIRAN: GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Gambar Lampiran 1: Pertumbuhan PDB (persen pertumbuhan)



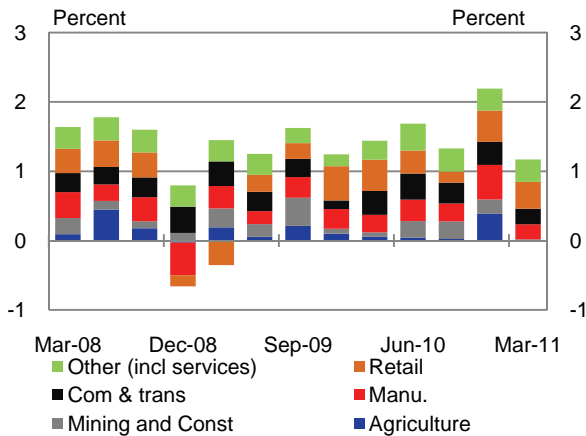
Catatan: *rata-rata pertumbuhan triwulanan dari Q12000-Q32010
Sumber: BPS, Bank Dunia

Gambar Lampiran 2: Kontribusi terhadap PDB (pertumbuhan trimulan-ke-triwulan), seasonally adjusted)



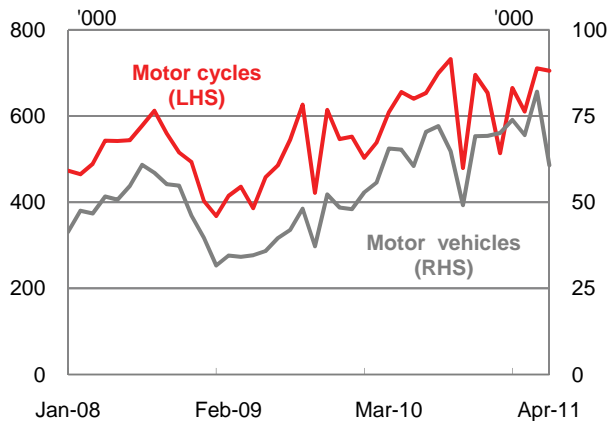
Sumber: BPS dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 3: Kontribusi terhadap PDB (sektor) (pertumbuhan trimulan-ke-triwulan, seasonally adjusted)



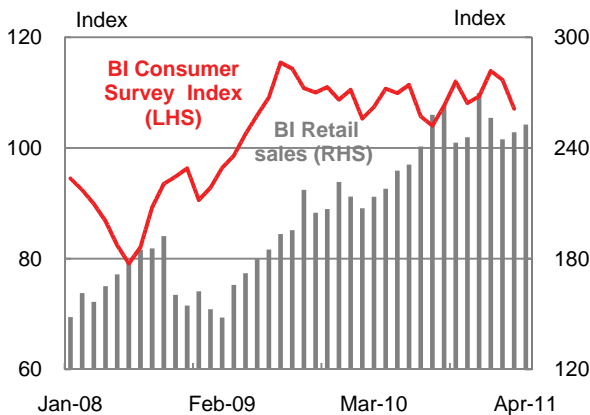
Sumber: CEIC

Gambar Lampiran 4: Penjualan sepeda motor dan kendaraan bermotor (unit)



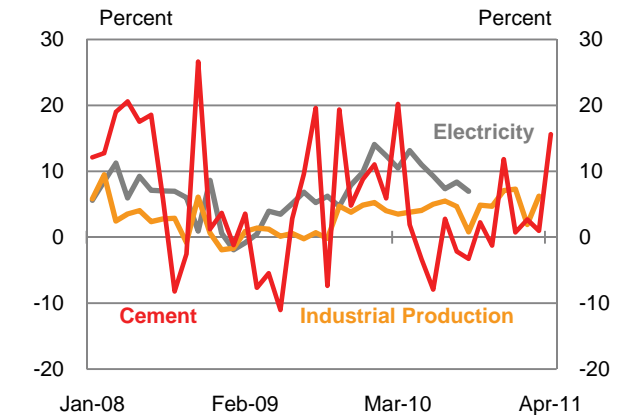
Sumber: CEIC

Gambar Lampiran 5: Indikator konsumen (indeks)



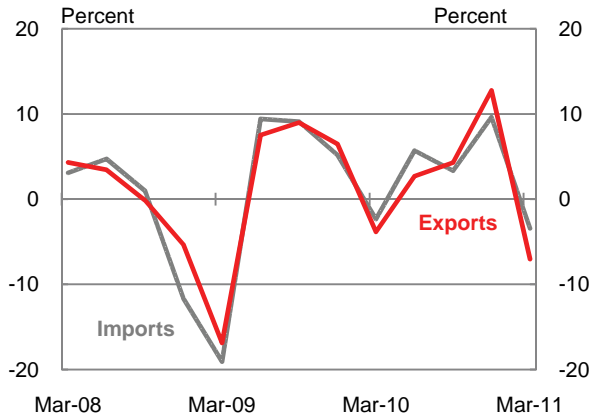
Sumber: CEIC

Gambar Lampiran 6: Indikator kegiatan industri (pertumbuhan tahun-ke-tahun)



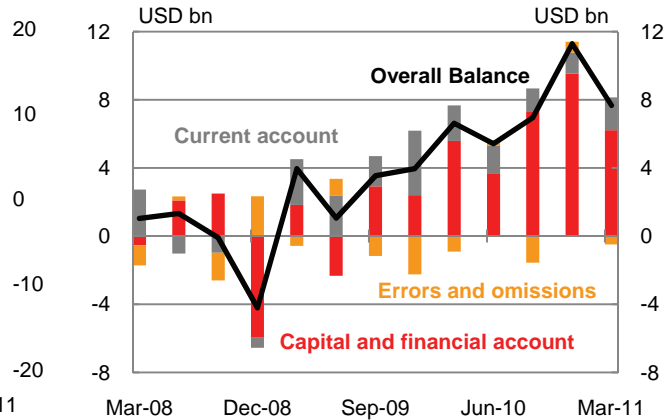
Sumber: CEIC

Gambar Lampiran 7: Aliran perdagangan riil (pertumbuhan trimulan-ke-triwulan)



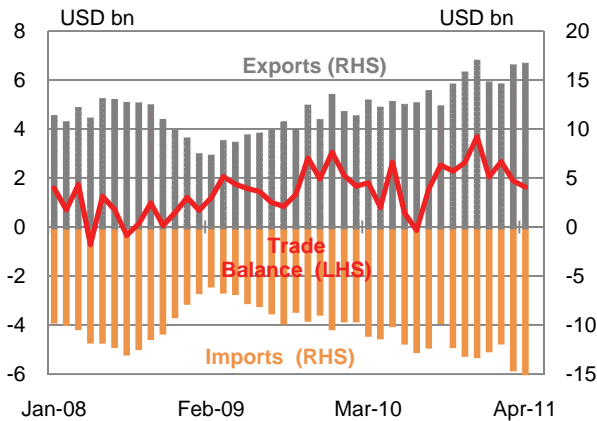
Sumber: CEIC

Gambar Lampiran 8: Balance of Payments (miliar dolar Amerika)



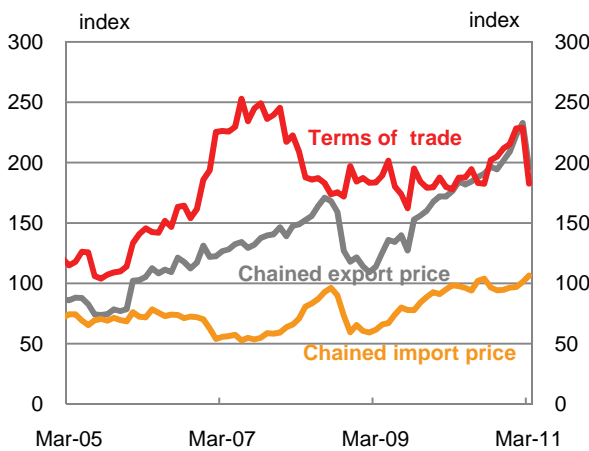
Sumber: BI dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 9: Neraca perdagangan (miliar dolar Amerika)



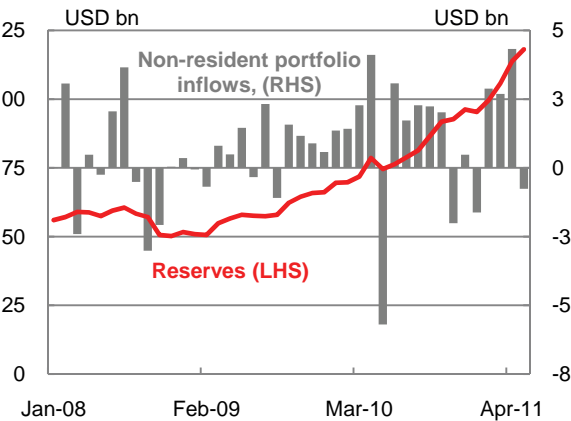
Sumber: BPS dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 11: Term of trade dan implicit ekspor dan impor berdasarkan chained Fisher-Price indices



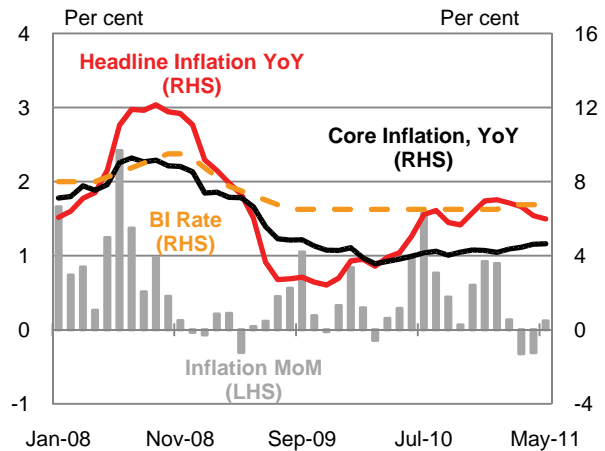
Sumber: BPS dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 10: Cadangan internasional dan dana capital asing (miliar dolar Amerika)



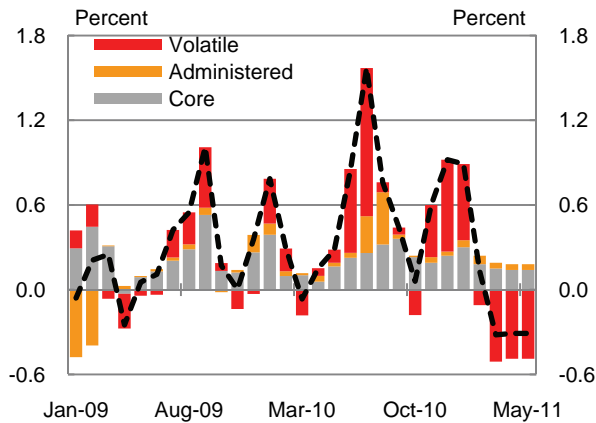
Sumber: BI dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 12: Inflasi dan kebijakan moneter (pertumbuhan bulan-ke-bulan & tahun-ke-tahun)



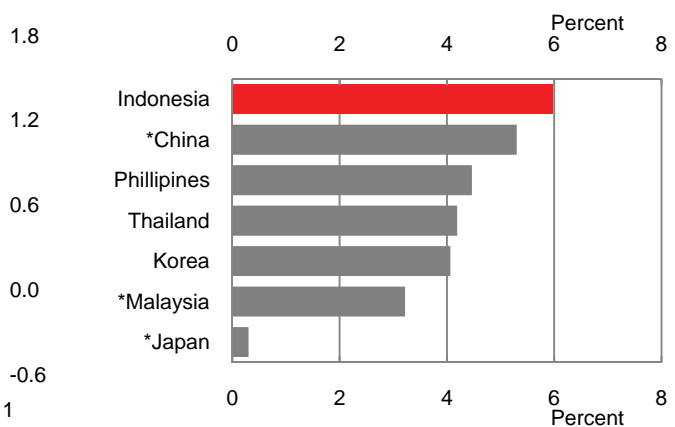
Sumber: BPS dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 13: Rincian tingkat harga konsumen (persentasi dari kontribusi inflasi bulanan)



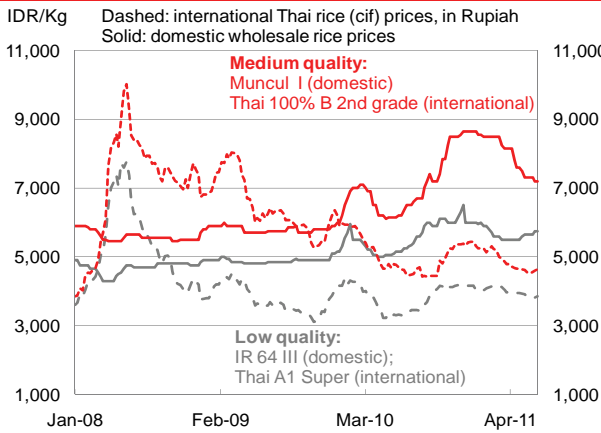
Sumber: BPS dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 14: Tingkat inflasi negara tetangga (pertumbuhan tahun-ke-tahun, May 2011)



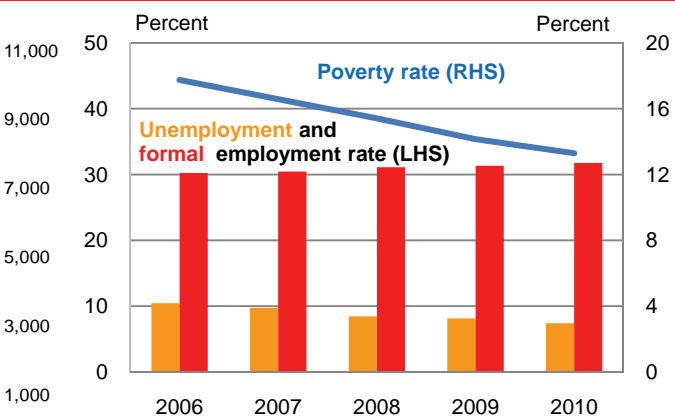
*April data terkini
Sumber: CEIC dan BPS

Gambar Lampiran 15: Harga beras domestic dan internasional (rupiah per kilogram)



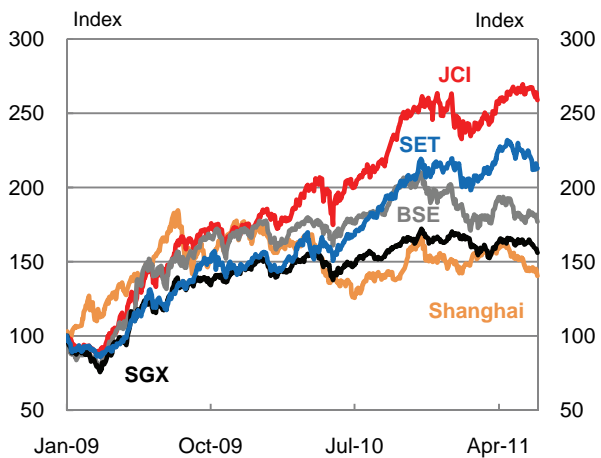
Sumber: PIBC, FAO dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 16: Tingkat kemiskinan, bekerja, dan tidak bekerja (data tahunan, persen)



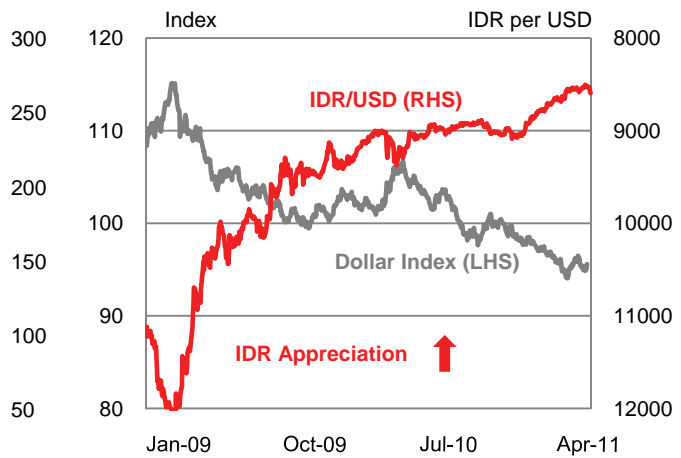
Sumber: BPS, dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 17: Indeks saham regional (indeks harian)



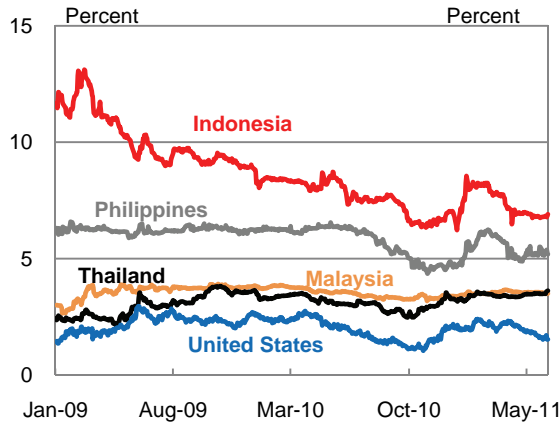
Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 18: Indeks spot dollar dan rupiah (indeks dan tingkat harga harian)



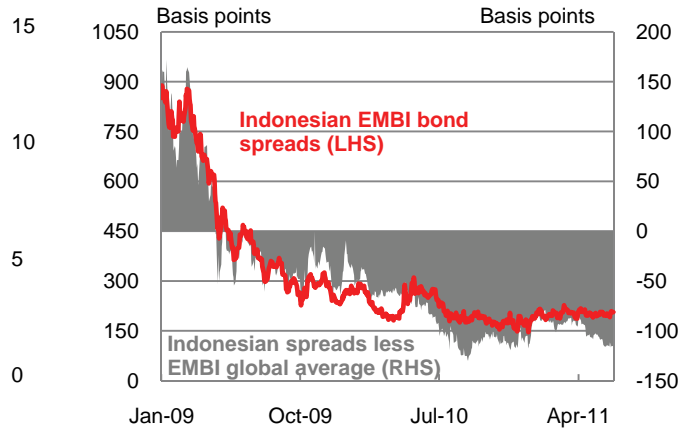
Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 19: Yield obligasi 5 tahunan mata uang lokal (persen, harian)



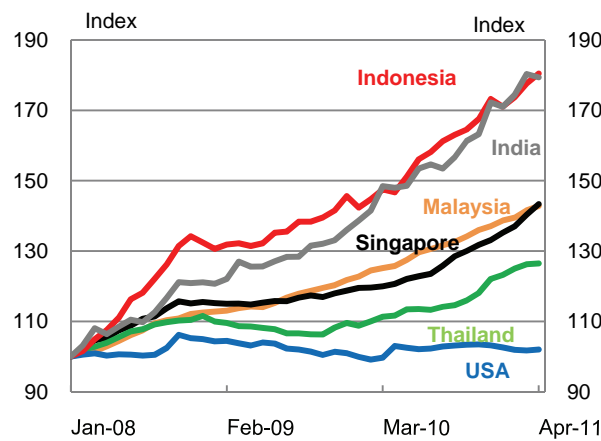
Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 20: Spread EMBI obligasi pemerintah dengan obligasi dollar amerika (basis poin, harian)



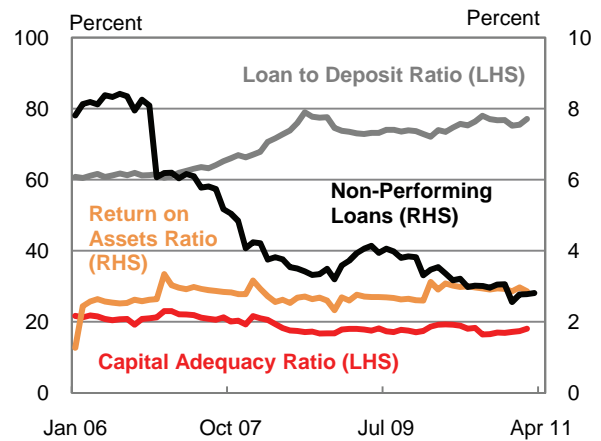
Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 21: Perbandingan tingkat kredit bank umum (indeks bulanan)



Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Gambar Lampiran 22: Indikator keuangan sektor perbankan (persen, bulanan)



Sumber: BI dan Bank Dunia

**Tabel Lampiran 1: Realisasi dan estimasi anggaran belanja pemerintah
(triliun rupiah)**

	2008	2009	2010	2011 (p)	2011 (p)
	Outcome	Outcome	Outcome	Budget	WB June estimates*
A. State revenue and grants	981.6	848.8	1,014.0	1,104.9	1,189.4
1. Tax revenue	658.7	619.9	744.1	850.3	858.6
<i>o/w income tax</i>	327.5	317.6	356.6	420.5	432.3
- Oil and gas	77.0	50.0	58.9	55.6	77.0
- Non oil and gas	250.5	267.5	297.7	364.9	355.3
2. Non-tax revenue	320.6	227.2	267.5	250.9	330.8
<i>o/w natural resources</i>	224.5	139.0	170.1	163.1	217.9
i. Oil and gas	211.6	125.8	152.7	149.3	198
ii. Non oil and gas	12.8	12.8	17.3	13.8	20
B. Expenditure	985.7	937.4	1,053.5	1,229.6	1,280.3
1. Central government	693.4	628.8	708.7	836.6	875.7
2. Transfers to the regions	292.4	308.6	344.7	393.0	404.6
C. Primary balance	84.3	5.2	48.9	-9.4	21.9
D. SURPLUS / DEFICIT	(4.1)	(88.6)	(39.5)	(124.7)	(90.9)
Deficit (percent of GDP)	(0.1)	(1.6)	(0.6)	(1.8)	(1.2)

Catatan: * Untuk penghitungan proyeksi PDB nominal, Bank Dunia menggunakan metoda perhitungan perkiraan penerimaan yang berbeda dengan perhitungan pemerintah (lihat bagian C pada IEQ Juni 2011 keterangan lebih lanjut).
Sumber: Depkeu dan Bank Dunia

**Tabel Lampiran 2: Neraca pembayaran
(milyar dollar amerika)**

	2008	2009	2010	2009		2010			2011	
				Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Balance of Payments	-1.9	12.5	30.3	3.5	4.0	6.6	5.4	7.0	11.3	7.7
<i>Percent of GDP</i>	-0.4	2.3	4.3	2.4	2.6	4.1	3.1	3.7	6.1	3.9
Current Account	0.1	10.6	5.7	1.8	3.8	1.9	1.4	1.2	1.1	1.9
<i>Percent of GDP</i>	0.0	2.0	0.8	1.2	2.5	1.2	0.8	0.6	0.6	1.0
Trade Balance	9.9	21.2	21.3	4.7	7.1	4.8	4.6	5.4	6.4	6.2
Net Income & Current Transfers	-9.8	-10.6	-15.7	-2.9	-3.3	-2.9	-3.2	-4.2	-5.3	-4.3
Capital & Financial Accounts	-1.8	4.9	26.1	2.9	2.4	5.6	3.7	7.3	9.6	6.2
<i>Percent of GDP</i>	-0.4	0.9	3.7	2.0	1.6	3.5	2.1	3.9	5.1	3.2
Direct Investment	3.4	2.6	10.6	0.6	0.8	2.5	2.3	1.6	4.2	3.0
Portfolio Investment	1.8	10.3	13.2	3.0	3.5	6.2	1.1	4.5	1.4	3.6
Other Investment	-7.3	-8.2	2.2	-0.7	-1.9	-3.1	0.3	1.2	3.8	0.0
Errors & Omissions	-0.2	-3.0	-1.5	-1.2	-2.2	-0.9	0.3	-1.6	0.6	-0.5
Foreign Reserves*	51.6	66.1	96.2	62.3	66.1	71.8	76.3	86.6	96.2	105.7

Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode.
Sumber: BI dan BPS



Investing in Indonesia's Institutions
for Inclusive and Sustainable Development

